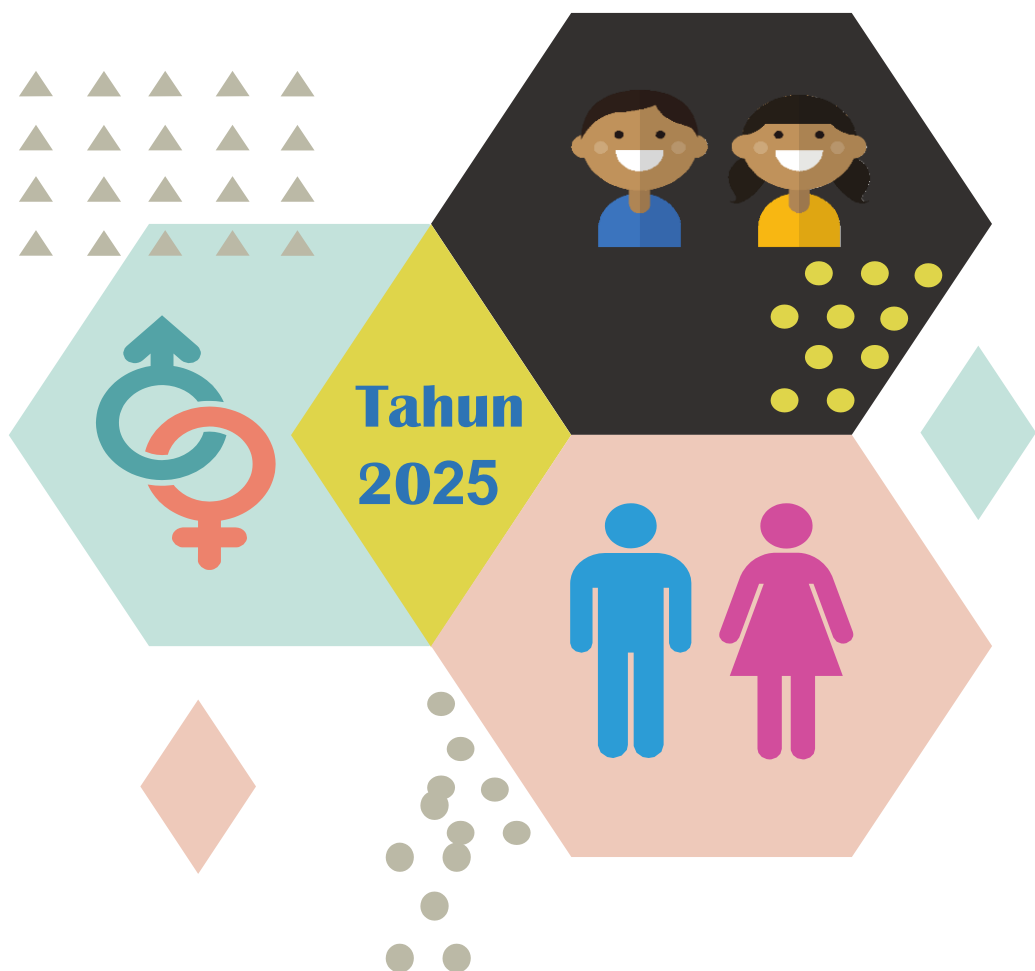




# **Profil Gender dan Anak Kabupaten Pasaman Barat 2025**



**Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pasaman Barat**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya sehingga Tim Penulis dapat menyelesaikan penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 dengan baik.

Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2025 ini disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pasaman Barat dan Instansi terkait lainnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan data dan informasi gender dan anak di Kabupaten Pasaman Barat dalam berbagai bidang pembangunan. Data gender dan anak merupakan elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG) serta Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) yang dapat membantu para pengambil kebijakan untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai peran, situasi dan kondisi perempuan dan laki-laki di Kabupaten Pasaman Barat sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam penyusunan program pembangunan yang responsif gender di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam penyusunan Buku ini, kami telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Bapak Sekda yang telah mendukung pelaksanaan kebijakan perencanaan daerah melalui pengarusutamaan gender.

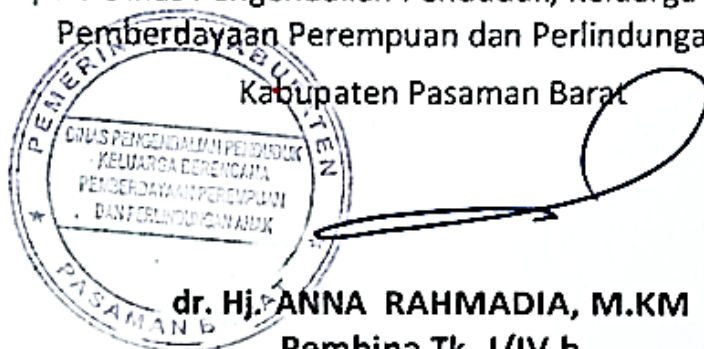
2. Bapak/Ibu Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat yang telah memfasilitasi ketersediaan data dan informasi gender dan anak sesuai dengan tupoksi masing-masing
3. Bapak/Ibu anggota Kelompok Kerja data terpilah gender dan anak se-Kabupaten Pasaman Barat yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi, sumbangan pemikiran, saran dan masukan yang diperlukan dalam penyusunan buku ini.

Semoga semua bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya tim penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala keterbatasan yang ada, maka kerjasama yang baik dan berkesinambungan serta kritikan dan saran sangat diperlukan demi sempurnanya penyusunan buku ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.

Simpang Empat, September 2025

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Pasaman Barat



**dr. Hj. ANNA RAHMADIA, M.KM**

**Pembina Tk. I/IV.b**

**NIP. 19820927 200905 2 001**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel .....	viii
Daftar Gambar .....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Tujuan .....	3
1.3	Sasaran.....	3
1.4	Sumber .....	3
1.5	Input.....	4
1.6	Output.....	4
1.7	Hasil Yang Diinginkan .....	4

### BAB II KEPENDUDUKAN

3.1	Jumlah dan Persebaran Penduduk.....	6
3.2	Distribusi Penduduk.....	13
3.3	Angka Beban Ketergantungan .....	19

### BAB III PENDIDIKAN

3.1	Angka Partisipasi Kasar .....	26
3.2	Angka Partisipasi Murni .....	28
3.3	Angka Partisipasi Sekolah .....	31
3.4	Angka Melek Huruf .....	33
3.5	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan .....	35
3.6	Rata-rata Lama Sekolah .....	37
3.7	Sertifikasi Guru.....	38
3.8	Angka Kelulusan Paket A, B, dan C.....	40

## **BAB IV KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

4.1	Kematian Ibu Melahirkan.....	45
4.2	Penyebab Kematian Ibu Melahirkan .....	48
4.3	Penolong Persalinan .....	51
4.4	Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4).....	57
4.5	Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil .....	61
4.6	Pemberian Tablet Zat Besi (Fe) pada Ibu Hamil .....	64
4.7	Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB).....	66
4.8	Pemberian Imunisasi pada Balita .....	69
4.9	Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang.....	74
4.10	Kematian Pada Bayi .....	78
4.11	Kematian Pada Balita (AKABa) .....	81
4.12	Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) .....	83
4.13	ASI Eksklusif .....	86
4.14	Usia Perkawinan Pertama .....	88
4.15	Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA).....	91
4.16	Penderita HIV / AIDS .....	94

## **BAB V EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN**

5.1	Rumah Tangga Miskin .....	99
5.2	Usaha Mikro dan Kecil (UMK) .....	104
5.3	Keanggotaan Koperasi .....	106
5.4	Penduduk Usia Kerja .....	109
5.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) .....	115
5.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	117
5.7	Distribusi Sektoral Penyerapan Tenaga Kerja .....	119
5.8	Pekerja Perempuan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dan Instansi Vertikal Di Kabupaten Pasaman Barat .....	122

## **BAB VI BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

6.1	Keterwakilan di Lembaga Legislatif .....	127
	a. Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Menurut Partai .....	127
	b. Anggota DPRD Kabupaten Menurut Komisi .....	130
	c. Pengurus Organisasi Sosial dan Politik .....	131
	d. Pengurus Harian Parpol .....	133
6.2	Peranan dan Komposisi di Lembaga Yudikatif .....	134
	a. Jaksa menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin .....	134
	b. Hakim Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin .....	137
	c. Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin .....	139
6.3	Peran dan Posisi di Lembaga Eksekutif .....	142
	a. PNS Pusat Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin .....	142
	b. PNS Pusat Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin .....	144
	c. PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin .....	147
	d. PNS Daerah Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin .....	149
	e. PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan .....	151
	f. Camat.....	154
	g. Walinagari .....	155
	h. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan .....	161
	i. Pengurus dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa/ Bamus Nagari .....	163

## **BAB VII BIDANG HUKUM, SOSIAL-BUDAYA DAN LINGKUNGAN**

7.1	Bidang Hukum dan Sosial Budaya .....	169
	a. Penghuni Lembaga Perasyarakatan ( Lapas) Menurut Jenis dan Jenjang Pendidikan .....	170
	b. Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur.....	172
	c. Jumlah Penghuni Lapas menurut Jenis Lapas dan Jenis Kasus	174
	d. Jumlah Jenis Lapas menurut Kabupaten .....	176
	e. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi .....	176
	f. Penyandang Disabilitas (Penda).....	179
7.2	Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan.....	189

## **BAB VIII KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

8.1	Kekerasan Terhadap Perempuan .....	192
1.	Perempuan Sebagai korban .....	192
a.	Kelompok Umur .....	193
b.	Tingkat Pendidikan .....	195
c.	Status Pekerjaan .....	197
d.	Status Perkawinan .....	199
e.	Jenis Pekerjaan .....	201
8.2	Perlindungan Terhadap Anak .....	203
a.	Kekerasan Terhadap Anak .....	203
b.	Jenis Kekerasan Terhadap Anak .....	204
c.	Tempat Kejadian Kekerasan Terhadap Anak .....	208
d.	Lembaga Layanan Yang Menangani Kekerasan Terhadap Anak .....	210
e.	Sifat Lembaga Layanan Anak Korban Kekerasan .....	211
f.	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Layanan Yang Diberikan .....	211
g.	Pelaku .....	214
h.	Anak Terlantar .....	217
i.	Kepemilikan Akta Kelahiran .....	219
j.	Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif .....	221
8.3	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) .....	225
a.	Sekolah Luar Biasa .....	225
b.	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) .....	229
8.4	Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) .....	231
8.5	Anak Dibawah 18 Tahun Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA).....	233

## BAB IX DAFTAR JENIS DATA KELEMBAGAAN

9.1	Kelembagaan Pengarustamaan Gender.....	251
9.2	Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak .....	255
BAB X PENUTUP .....		259



## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	7
Tabel 2.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	9
Tabel 2.3	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2024	11
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	16
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2024	17
Tabel 2.6	Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Tahun 2024	20
Tabel 2.7	Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023	21
Tabel 3.1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	27
Tabel 3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	29
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin 2024	31
Tabel 3.4	Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Tahun 2024	33
Tabel 3.5	Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Tahun 2024	36
Tabel 3.6	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024	37
Tabel 3.7	Jumlah Guru Negeri Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023	39
Tabel 3.8	Angka Kelulusan Paket A, B, dan C Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tahun 2023	42

Tabel 3.9	Jumlah Guru Negeri Yang Telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang Pendidikan SD, SLTP, dan SLTA Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023	41
Tabel 4.1	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	47
Tabel 4.2	Penyebab Kematian Ibu Karena Hamil, Melahirkan dan Nifas di Pasaman Barat Tahun 2024	49
Tabel 4.3	Jumlah Kelahiran Menurut Penolong Persalinan dan Kecamatan Tahun 2024	52
Tabel 4.4	Jumlah Kelahiran Bayi dengan Penolongan Persalinan oleh Dokter pada Rumah Sakit Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	55
Tabel 4.5	Jumlah Kelahiran Bayi (Bayi Lahir Hidup) Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	56
Tabel 4.6	Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2024	60
Tabel 4.7	Jumlah Imunisasi <i>Tetanus Toxoid</i> (TT) Pada Ibu Hamil Kab. Pasaman Barat Tahun 2024	64
Tabel 4.8	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) Menurut Kecamatan Tahun 2024	65
Tabel 4.9	Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	67
Tabel 4.10	Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	72
Tabel 4.11	Jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	76
Tabel 4.12	Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	79
Tabel 4.13	Jumlah Kematian Balita (AKABa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	81
Tabel 4.14	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	83
Tabel 4.15	Jumlah Bayi yang mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	87

Tabel 4.16	Persentase Penduduk yang Pernah Kawin menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Barat Tahun 2024	90
Tabel 4.17	Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2024	93
Tabel 4.18	Penderita HIV / AIDS di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	95
Tabel 5.1	Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	102
Tabel 5.2	Pelaku Usaha Mikro Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	104
Tabel 5.3	Keanggotaan Koperasi menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	107
Tabel 5.4	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2024	109
Tabel 5.5	Penduduk Usia Kerja 15+ Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Status Dalam Pekerjaan Utama di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	111
Tabel 5.6	Penduduk 15+ Berdasarkan Angkatan Kerja Menurut Pendidikan, dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023	113
Tabel 5.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kab. Pasaman Barat 2024	115
Tabel 5.8	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	118
Tabel 5.9	Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Usaha Tahun 2023	120
Tabel 5.10	Pekerja Perempuan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	122
Tabel 6.1	Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Menurut Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2024	128

Tabel 6.2	Anggota DPRD Kabupaten Pasaman barat Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2024	130
Tabel 6.3	Pengurus Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Pasaman Barat Tahun 2024	132
Tabel 6.4	Pengurus Harian Parpol Menurut Jenis Kelamin di Pasaman Barat Tahun 2024	133
Tabel 6.5	Jaksa Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	136
Tabel 6.6	Hakim Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	138
Tabel 6.7	Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	140
Tabel 6.8	Jumlah PNS Pusat Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	143
Tabel 6.9	Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2023	145
Tabel 6.10	Jumlah PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	147
Tabel 6.11	Jumlah PNS Daerah Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin 2024	149
Tabel 6.12	Jumlah PNS Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	152
Tabel 6.13	Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024	154
Tabel 6.14	Jumlah Wali Nagari Menurut Jenis Kelamin di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024	157
Tabel 6.15	Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan menurut Jenis Kelamin di Indonesia Tahun 2024	162
Tabel 6.16	Pengurus dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa/ Bamus Nagari menurut Jenis Kelamin di Pasaman Barat Tahun 2025	163
Tabel 7.1	Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Lapas dan Jenjang Pendidikan Tahun 2024	170

Tabel 7.2	Jumlah Penghuni LAPAS Menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur Tahun 2024	172
Tabel 7.3	Jumlah Penghuni LAPAS Menurut Jenis Lapas dan Jenis Kasus Tahun 2024	174
Tabel 7.4	Jumlah Jenis Lapas di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	176
Tabel 7.5	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	177
Tabel 7.6	Jenis dan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	182
Tabel 7.7	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2024	185
Tabel 7.8	Jumlah Penyandang Disabilitas/ Cacat Anak dibawah Umur 18 Tahun Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat, 2024	187
Tabel 7.9	Data Terpilah Bidang SDA Dan Lingkungan Tahun 2019	190
Tabel 8.1	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	193
Tabel 8.2	Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	195
Tabel 8.3	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024	197
Tabel 8.4	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024	199
Tabel 8.5	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024	201
Tabel 8.6	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	207
Tabel 8.7	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Jenis kekerasan Tahun 2024	210
Tabel 8.8	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Jenis Kejadian Tahun 2024	213
Tabel 8.9	Jumlah Lembaga Layanan Yang Menangani Anak Korban Kekerasan Menurut Kabupaten Tahun 2024	216

Tabel 8.10	Lembaga yang Menangani Anak Korban Kekerasan Menurut Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak menurut Kecamatan Jenis Pelayanan Yang Diberikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	212 212
Tabel 8.11	Jumlah Pelaku kekerasan Terhadap perempuan dan Anak Menurut Hubungan dengan Pelaku dan Jenis Kelamin Tahun 2024	215
Tabel 8.12	Jumlah Anak Terlantar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	218
Tabel 8.13	Jumlah Anak Yang Berumur Dibawah 18 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	219
Tabel 8.14	Jumlah Anak Yang Ditampung di Panti Asuhan dan Non Panti Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	222
Tabel 8.15	Jumlah Panti Asuhan Yatim Piatu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	224
Tabel 8.16	Jumlah SLB Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten Tahun 2023 Kab. Pasaman Barat	226
Tabel 8.17	Jumlah Siswa SLB Negeri dan Swasta Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	227
Tabel 8.18	Jumlah Guru SLB Negeri dan Swasta Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	228
Tabel 8.19	Jenis dan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tahun 2024	230
Tabel 8.20	Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	232
Tabel 8.21	Peraturan Per Undang-Undangan yang digunakan dalam penanganan ABH Tahun 2024	233
Tabel 8.22	Jumlah Anak Dibawah 18 Tahun Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)	234
Tabel 9.1	Daftar Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Berdasarkan Kabupaten Tahun 2024	252
Tabel 9.2	Jumlah dan Jenis Kebijakan/Program/Kegiatan Yang Responsif Gender Tahun 2024	252

Tabel 9.3	Jumlah Anak Dibawah 18 Tahun Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)	253
Tabel 9.4	Jumlah dan Jenis Kebijakan/Program/Kegiatan tentang Perlindungan Perempuan	253
Tabel 9.5	Daftar Kelembagaan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Pasaman Barat Tahun 2024	254
Tabel 9.6	Gugus Tugas dan Kebijakan terkait Pemeberantasan Perdagangan Orang Tahun 2024	254
Tabel 9.7	Jumlah dan jenis Peraturan Daerah yang peduli Anak Tahun 2024	255
Tabel 9.8	Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak Tahun 2024	256
Tabel 9.9	Jumlah Kelebagaan Partisipasi Anak Tahun 2024	256
Tabel 9.10	Jumlah Kelembagaan untuk Perlindungan Anak Tahun 2024	257

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	8
Gambar 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	10
Gambar 2.3 Sex Ratio Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	11
Gambar 2.4 Perbandingan Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2024	13
Gambar 2.5 Piramida Penduduk Pasaman Barat Tahun 2024	14
Gambar 2.6 Komposisi Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kelompok Umur Tahun 2024	17
Gambar 2.7 Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2024	18
Gambar 2.8 Komposisi Penduduk Menurut Umur Produktif dan Jenis Kelamin Tahun 2023	21
Gambar 3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	28
Gambar 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	30
Gambar 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	32
Gambar 3.4 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Tahun 2024	35
Gambar 3.5 Pendidikan Tertinggi yang Dimiliki menurut Jenis Kelamin Tahun 2023	37
Gambar 3.6 Jumlah Guru Negeri yang telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang Pendidikan SD dan SLTP Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023	40



Gambar 4.1	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	48
Gambar 4.2	Penyebab Kematian Ibu karena Hamil, Melahirkan dan Nifas di Pasaman Barat Tahun 2024	51
Gambar 4.3	Jumlah Kelahiran Menurut Penolong Persalinan dan Kecamatan, Tahun 2024	53
Gambar 4.4	Jumlah Kelahiran Bayi (Bayi Lahir Hidup) Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	57
Gambar 4.5	Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2024	60
Gambar 4.6	Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid Pada Ibu Hamil Kab.Pasaman Barat Tahun 2024	66
Gambar 4.7	Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) Menurut Kecamatan Tahun 2024	64
Gambar 4.8	Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Perempuan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	69
Gambar 4.9	Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	74
Gambar 4.10	Jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	77
Gambar 4.11	Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	80
Gambar 4.12	Jumlah Kematian Balita (AKABa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	82
Gambar 4.13	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	85
Gambar 4.14	Jumlah Bayi yang mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	88

Gambar 4.15	Persentase Penduduk yang Pernah Kawin menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Barat Tahun 2024	91
Gambar 5.1	Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	103
Gambar 5.2	Keanggotaan Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	108
Gambar 5.3	Penduduk Usia Kerja di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024	110
Gambar 5.4	Penduduk Usia 15+ Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Dan Status Dalam Pekerjaan Utama di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024	112
Gambar 5.5	Jumlah Angkatan Kerja (Penduduk Usia Kerja) Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	114
Gambar 5.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2024	117
Gambar 5.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024	119
Gambar 5.8	Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Tahun 2023	121
Gambar 5.9	Pekerja Perempuan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	125
Gambar 6.1	Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Menurut Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2024	129
Gambar 6.2	Anggota DPRD Kabupaten Pasaman barat Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2024	131
Gambar 6.3	Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	141
Gambar 6.4	PNS Pusat Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023	144
Gambar 6.5	Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2023	146

Gambar 6.6	Jumlah PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	148
Gambar 6.7	PNS Daerah Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2024	151
Gambar 6.8	PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	153
Gambar 7.1	Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Lapas dan Jenjang Pendidikan Tahun 2024	171
Gambar 7.2	Jumlah Penghuni LAPAS Menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur Tahun 2024	173
Gambar 7.3	Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Lapas dan Jenis Kasus Tahun 2024	175
Gambar 7.4	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023	178
Gambar 7.5	Jenis dan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	184
Gambar 7.6	Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2024	186
Gambar 7.7	Jumlah Penyandang Disabilitas/Cacat Anak dibawah Umur 18 Tahun Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	188
Gambar 8.1	Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	194
Gambar 8.2	Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024	196
Gambar 8.3	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024	198
Gambar 8.4	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024	200
Gambar 8.5	Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024	202

Gambar 8.6	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	207
Gambar 8.7	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Jenis Kekerasan Tahun 2024	210
Gambar 8.8	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Tempat Kejadian Tahun 2024	213
Gambar 8.9	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak menurut Kecamatan Jenis Pelayanan Yang Diberikan dan Jenis kelamin Tahun 2024	216
Gambar 8.10	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan Pelaku dan Jenis Kelamin Tahun 2024	222

BAB I

# PENDAHULUAN



## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah sumber daya manusia yang berkualitas baik dalam hal kemampuan (*skill*) maupun produktivitasnya. Untuk meningkatkan daya saing dan pembangunan suatu daerah perlu meningkatkan kesetaraan gender yaitu meningkatkan hak, tanggung jawab, kapabilitas dan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Dimana selama ini masih dikontaminasi oleh diskriminasi/kesenjangan gender yang sangat dirasakan oleh kaum perempuan.

Masih adanya isu gender disebabkan oleh adanya kesenjangan atau *diskriminasi* gender yang pada prakteknya sering menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan baik dilingkungan rumah tangga, pekerjaan, masyarakat, kultur, maupun negara. Oleh karena itu perlu upaya untuk menghilangkan kesenjangan tersebut di Indonesia maupun berbagai belahan dunia dengan mengevaluasi manfaat hasil pembangunan terhadap laki-laki dan perempuan itu sendiri.

Menurut PBB, kesetaraan gender merupakan pandangan bahwa semua orang menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan jenis kelamin mereka. Pada September 2015 PBB meluncurkan program pembangunan berkelanjutan yang diberi nama “*Sustainable Development Goals*” (SDGs) untuk menggantikan program sebelumnya “*Millennium Development Goals*” (MDGs) yang telah berakhir 2015. SDGs memiliki 17 program dan berlaku bagi semua negara, termasuk Indonesia. Isu gender masuk dalam agenda pembangunan Tujuan

5. Isi tujuan tersebut diantaranya mencapai kesetaraan gender, memberdayakan perempuan, dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.

Di Indonesia, isu kesetaraan gender juga tertuang dalam visi pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa adil berarti tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik individu, wilayah, maupun jenis kelamin. Penghapusan diskriminasi gender di semua bidang kemudian menjadi isu yang terus menerus dibahas sebagai target pembangunan.

Data terpilah menurut jenis kelamin dapat membuka wawasan tentang adanya kesenjangan gender. Pemilahan menurut jenis kelamin di berbagai bidang dapat menunjukkan status, peran, kondisi dan kebutuhan masyarakat perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, serta permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan. Pemilahan data menurut jenis kelamin merupakan prasyarat utama dilakukannya analisis gender yang bermanfaat dalam penyusunan analisis kebijakan dan penyusunan anggaran yang responsif gender. Untuk mengevaluasi sejauh mana kesetaraan dan pemberdayaan gender yang sudah tercapai dapat dilihat dari berbagai ukuran. Indikator-indikator yang menunjukkan capaian- capaian pembangunan berbasis gender akan memberikan gambaran yang nyata tentang pengarusutamaan gender di Kabupaten Pasaman Barat.

Terkait dengan hal diatas, maka disusunlah buku yang berjudul “Profil Gender dan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 ” sebagai gambaran tentang keadaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di Kabupaten Pasaman Barat.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan penyusunan Profil Gender dan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 ini adalah untuk menyajikan data terpilah yang dapat menginformasikan lebih jelas kondisi perempuan dibanding laki-laki terkait dalam masalah kependudukan, karakteristik rumah tangga, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, ketenagakerjaan, sektor publik, kekerasan terhadap perempuan, sosial ekonomi lainnya, dan kesulitan fungsional penyandang disabilitas, serta memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak Kabupaten Pasaman Barat yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, anak bekerja dan anak cacat.

## **1.3. Sasaran**

Penggalan data gender yang menyangkut semua isu dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, pertanian, politik, sosial budaya, hukum dan data anak meliputi tumbuh kembang, kelangsungan hidup, perlindungan data kelembagaan yang meliputi kelembagaan PUG, kelembagaan PUHA di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

## **1.4 Sumber**

Data-data yang disajikan dalam publikasi Profil Gender dan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 ini diperoleh dari berbagai sumber yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pasaman Barat, dan organisasi perangkat daerah serta instansi vertikal lainnya yang berkaitan dengan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pasaman Barat.



## **1.5 Input**

- a. Merupakan kelanjutan dari buku data terpilah gender dari tahun sebelumnya
- b. Ketersediaan data terpilah gender menjadi suatu kebutuhan semua pihak pemangku kepentingan

## **1.6 Output**

- a. Mengidentifikasi perbedaan kondisi perempuan dan laki - laki termasuk anak dalam dimensi tempat dan waktu
- b. Mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki - laki yang responsif terhadap masalah kebutuhan pengalaman perempuan dan laki - laki
- c. Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2025

## **1.7 Hasil Yang Diinginkan**

- a. Buku Profil Gender Dan Anak Tahun 2025
- b. Data gender dan anak untuk memberikan acuan bagi pemerintah dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak
- c. Adanya kerjasama dengan lembaga sektoral dalam penyelenggaraan data gender dan anak
- d. Base data gender dan anak, dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

# Bab II

## Kependudukan



## **BAB II**

### **KEPENDUDUKAN**

Penduduk atau masyarakat merupakan bagian penting atau titik sentral dalam pembangunan, karena peran penduduk sejatinya adalah sebagai subjek dan objek dari pembangunan itu sendiri. Jumlah penduduk bukan hanya merupakan modal, tetapi juga merupakan beban dalam pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang meningkat berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi tersebut akan melahirkan beragam masalah dalam kehidupan. Masalah utama yang dihadapi di bidang kependudukan di Indonesia adalah masih tingginya pertumbuhan penduduk dan kurang seimbangnya penyebaran dan struktur umur penduduk.

Untuk menyukseskan pembangunan di suatu daerah, diperlukan komponen penduduk yang berkualitas. Karena dari penduduk berkualitas itulah memungkinkan untuk bisa mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam dengan baik, tepat, efisien, dan maksimal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Oleh sebab itu, dalam menunjang keberhasilan pembangunan, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian penduduk tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya itu sendiri. Oleh karena itu, informasi tentang komponen-komponen kependudukan seperti jumlah, komposisi, sertadistribusi penduduk perjenis kelamin sangat diperlukan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan selanjutnya.

## 2.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

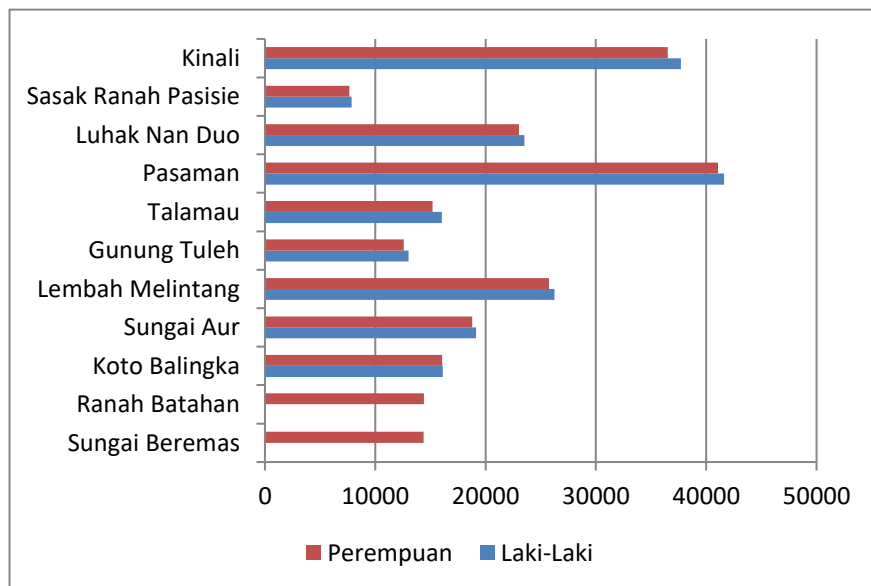
Kecamatan		Jenis Kelamin			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sungai Beremas	15,241	14.373	29.615	106
2	Ranah Batahan	14,542	14.399	28.941	101
3	Koto Balingka	16.125	16.075	32.200	100
4	Sungai Aur	19.133	18.785	37.918	102
5	Lembah Melintang	26.244	25.756	52.000	102
6	Gunung Tuleh	13.028	12.583	25.611	104
7	Talamau	16.022	15.196	31.198	105
8	Pasaman	41.633	41.055	82.688	101
9	Luhak Nan Duo	23.529	23.022	46.551	102
10	Sasak Ranah Pasisie	7.864	7.661	15.525	103
11	Kinali	37.698	36.523	74.221	103
Pasaman Barat		231.039	225.426	456.467	102

Sumber : Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025

Berdasarkan Tabel 2.1 mengenai jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, total penduduk di kabupaten ini mencapai 456.467 jiwa, yang terdiri dari 231.039 laki-laki dan 225.426 perempuan. Rasio jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat secara keseluruhan adalah 102, yang menunjukkan bahwa terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi adalah Kecamatan Pasaman, dengan total 82.688 jiwa (41.633 laki-laki dan 41.055 perempuan) dan rasio jenis kelamin 101. Sebaliknya, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie memiliki jumlah penduduk terendah, yaitu 15.525 jiwa (7.864 laki-laki dan 7.661 perempuan) dengan rasio jenis kelamin 103.

Distribusi populasi berdasarkan jenis kelamin di setiap kecamatan menunjukkan variasi kecil, dengan rasio jenis kelamin berkisar antara 100 hingga 106. Kecamatan Sungai Beremas memiliki rasio jenis kelamin tertinggi (106), yang berarti terdapat 106 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, sedangkan Koto Balingka memiliki rasio 100, menunjukkan keseimbangan antara jumlah laki-laki dan perempuan. Secara keseluruhan, sebagian besar kecamatan memiliki rasio jenis kelamin yang mendekati 100, yang mengindikasikan distribusi yang cukup seimbang antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan demikian, tabel ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Pasaman Barat memiliki distribusi penduduk yang relatif merata antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2024, dengan sedikit kecenderungan jumlah laki-laki yang lebih banyak di beberapa kecamatan.

**Gambar 2.1** Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin tahun 2024



*Sumber : Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025*

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	Sungai Beremas	15.241	14.373	29.614	106
2	Ranah Batahan	14.542	14.399	28.941	101
3	Koto Balingka	16.125	16.075	32.200	100
4	Sungai Aur	19.133	18.785	37.918	102
5	Lembah Melintang	26.244	25.756	52.000	102
6	Gunung Tuleh	13.028	12.583	25.611	104
7	Talamau	16.002	15.196	31.198	105
8	Pasaman	41.633	41.055	82.688	101
9	Luhak Nan Duo	23.529	23.022	46.551	102
10	Sasak Ranah Pasisie	7.864	7.661	15.525	103
11	Kinali	37.698	36.523	74.221	103
<b>Pasaman Barat</b>		<b>231.039</b>	<b>225.428</b>	<b>456.467</b>	<b>102</b>

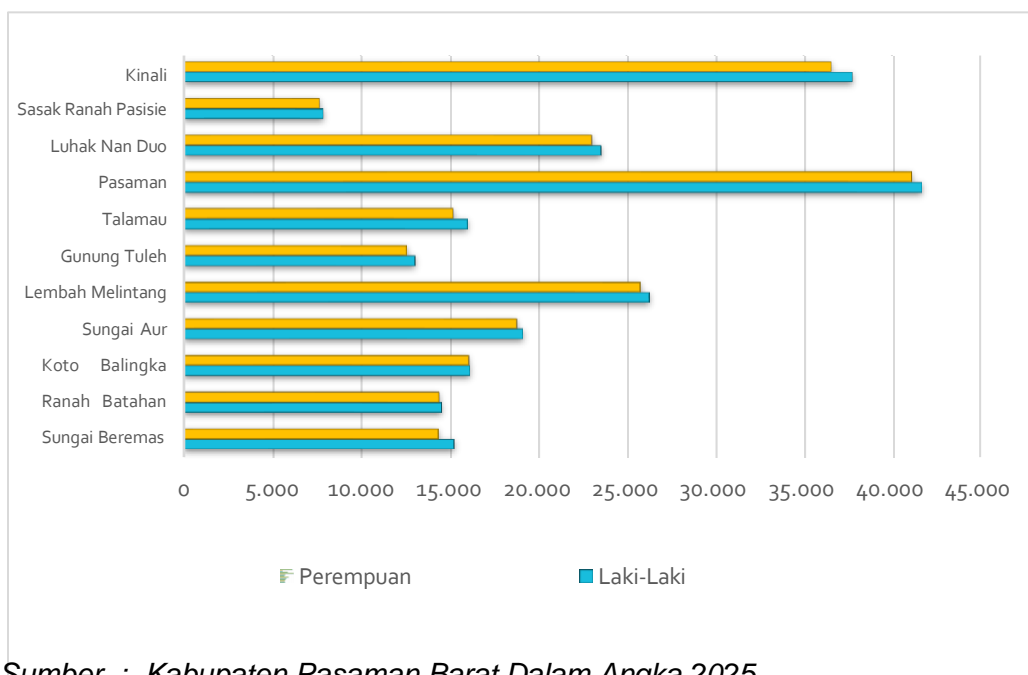
Sumber : Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025

Berdasarkan data dalam Tabel 2.2 mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, terlihat variasi populasi di setiap kecamatan berdasarkan jenis kelamin. Secara keseluruhan, jumlah total penduduk Kabupaten Pasaman Barat mencapai 456.467 jiwa, dengan komposisi 231.039 laki-laki dan 225.428 perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sedikit dominasi jumlah laki-laki, dengan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 102, yang berarti terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.

Secara lebih rinci, kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Lembah Melintang, dengan 52.000 jiwa, sedangkan kecamatan dengan populasi terendah adalah Sasak Ranah Pasisie dengan 15.525 jiwa. Beberapa kecamatan seperti Gunung Tuleh dan Talamau juga memiliki populasi relatif kecil, masing-masing 25.611 dan 31.195 jiwa.

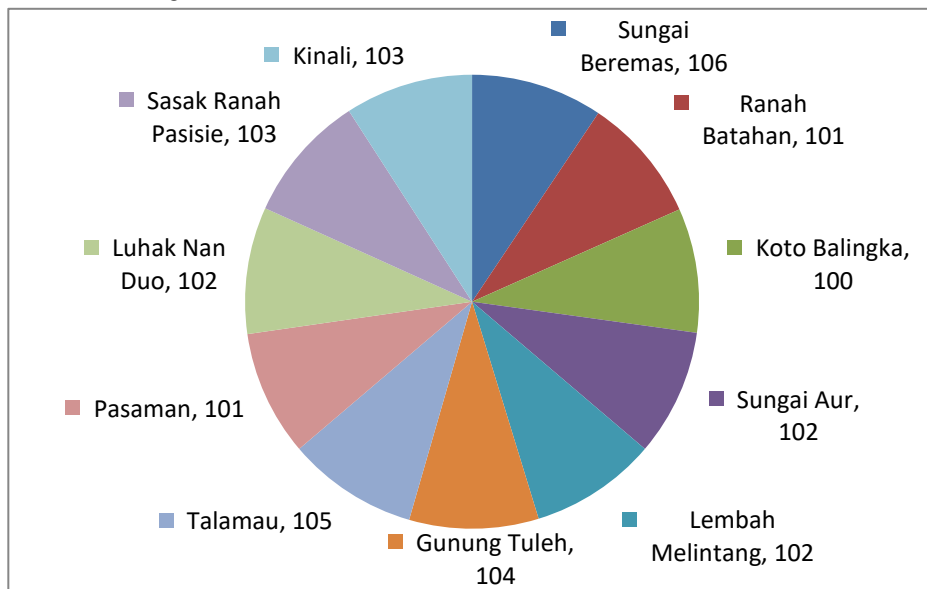
Berdasarkan rasio jenis kelamin, terlihat variasi yang menarik. Kecamatan Pasaman memiliki populasi terbesar di antara kecamatan lainnya (82.688 jiwa) dan rasio jenis kelamin sebesar 101, menunjukkan keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan. Rasio tertinggi ada di Sungai Beremas (106), mengindikasikan lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Sementara itu, beberapa kecamatan seperti Ranah Batahan (101) dan Lembah Melintang (102) juga menunjukkan perbandingan gender yang cukup merata.

**Gambar 2.2** Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025

Gambar 2.3 Sex Ratio Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025

Tabel 2.3 Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk per Km2
1	Sungai Beremas	440,48	67,23
2	Ranah Batahan	354,88	81,55
3	Koto Balingka	340,78	94,49
4	Sungai Aur	420,16	90,25
5	Lembah Melintang	263,77	197,14
6	Gunung Tuleh	453,97	56,42
7	Talamau	324,24	98,22
8	Pasaman	508,93	162,47
9	Luhak Nan Duo	174,21	267,21
10	Sasak Ranah Pasisie	123,71	125,50
11	Kinali	482,64	153,78
<b>Pasaman Barat</b>		<b>3.887,77</b>	<b>117,41</b>

Sumber : Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025



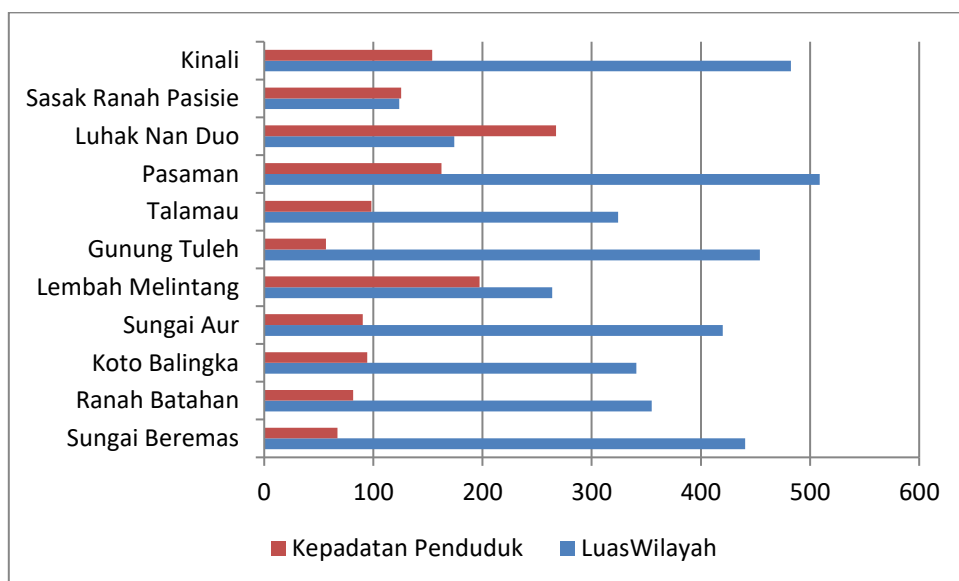
Berdasarkan Tabel 2.3 mengenai luas wilayah dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dapat disimpulkan beberapa hal penting terkait distribusi wilayah dan tingkat kepadatan penduduk di setiap kecamatan.

Secara keseluruhan, tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Pasaman Barat adalah 117,41 jiwa per km<sup>2</sup>. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Luhak Nan Duo dengan 267,21 jiwa per km<sup>2</sup>, diikuti oleh Lembah Melintang (197,14 jiwa per km<sup>2</sup>) dan Pasaman (162,47 jiwa per km<sup>2</sup>). Kepadatan yang tinggi di kecamatan-kecamatan ini menunjukkan adanya konsentrasi penduduk yang lebih besar, mungkin disebabkan oleh ketersediaan fasilitas ekonomi atau aksesibilitas yang baik.

Di sisi lain, kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Gunung Tuleh dengan hanya 56,42 jiwa per km<sup>2</sup> dan Ranah Batahan (67,23 jiwa per km<sup>2</sup>). Rendahnya kepadatan di kecamatan ini bisa disebabkan oleh faktor geografis atau terbatasnya akses ke pusat kegiatan ekonomi dan fasilitas umum.

Data ini sangat penting bagi perencanaan pembangunan daerah, terutama untuk menentukan prioritas pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Kecamatan dengan kepadatan tinggi mungkin membutuhkan lebih banyak fasilitas umum, sementara kecamatan dengan wilayah luas dan kepadatan rendah bisa difokuskan pada pengembangan aksesibilitas dan infrastruktur dasar untuk meningkatkan potensi ekonomi.

**Gambar 2.4 Perbandingan Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024**



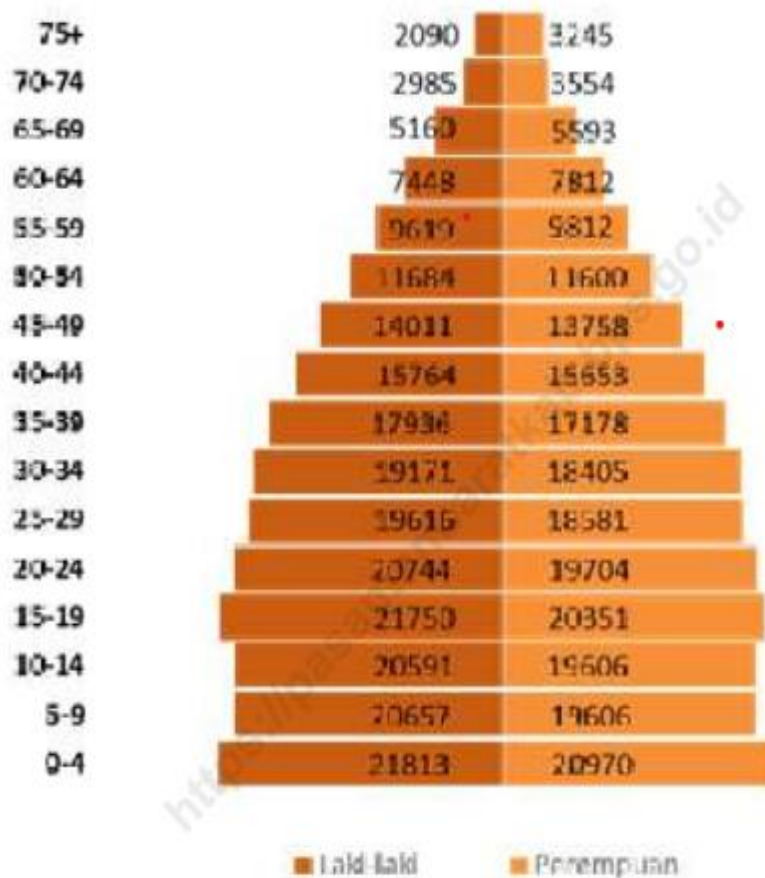
*Sumber : Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025*

## 2.2 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida penduduk menggambarkan perkembangan penduduk pada setiap kelompok umur yang berbeda. Piramida penduduk adalah dua buah diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan dalam kelompok interval usia penduduk lima tahunan.

Grafik dapat menunjukkan jumlah penduduk atau presentase jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk total. Perubahan pada bentuk piramida penduduk akan dipengaruhi oleh kelahiran, tingkat kelangsungan hidup setiap kelompok umur serta proses perpindahan penduduk.

Gambar 2.5 Piramida Penduduk Pasaman Barat Tahun 2024



Sumber : Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025

Kelompok usia muda mendominasi jumlah penduduk dengan populasi yang cukup besar. Usia 0-4 tahun tercatat sebanyak 21.813 laki-laki dan 20.970 perempuan, menunjukkan bahwa angka kelahiran masih relatif tinggi. Secara keseluruhan, kelompok usia muda (0-19 tahun) menandakan potensi pertumbuhan populasi di masa depan, sekaligus kebutuhan akan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ruang bermain.

Kelompok usia produktif (20-59 tahun) adalah yang paling besar dalam piramida ini, yang mencerminkan adanya peluang bonus demografi.

Usia 20-24 tahun memiliki 20.744 laki-laki dan 19.704 perempuan, dan angka ini cukup konsisten di rentang usia berikutnya seperti 25-29 tahun dan 30-34 tahun. Jumlah yang tinggi di rentang ini menunjukkan tenaga kerja yang cukup besar dan menjadi aset penting bagi perekonomian daerah. Namun, di sisi lain, hal ini juga membutuhkan perencanaan terkait lapangan pekerjaan, keterampilan, dan program pengembangan sumber daya manusia.

Pada kelompok usia lanjut (60+ tahun), jumlah penduduk mulai menurun. Usia 75 tahun ke atas hanya memiliki 2.090 laki-laki dan 3.245 perempuan, yang menunjukkan adanya kesenjangan gender di usia tua, di mana perempuan lebih banyak bertahan hidup dibandingkan laki-laki. Hal ini umum terjadi karena harapan hidup perempuan cenderung lebih tinggi.

Secara keseluruhan, rasio laki-laki dan perempuan tampak relatif seimbang di hampir semua rentang usia, terutama pada usia muda dan produktif. Namun, pada usia tua, jumlah perempuan lebih dominan, seperti terlihat pada rentang usia 75+ tahun.

Komposisi penduduk seperti ini memiliki beberapa implikasi penting. Dengan dominasi kelompok usia produktif, daerah ini berpotensi mengalami bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia kerja lebih tinggi dibanding usia tidak produktif. Untuk memanfaatkan potensi ini, pemerintah perlu fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, dengan jumlah penduduk usia muda yang tinggi, penting untuk memastikan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Di sisi lain, peningkatan jumlah lansia menuntut perhatian lebih terhadap layanan kesehatan khusus dan program kesejahteraan bagi para lanjut usia.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

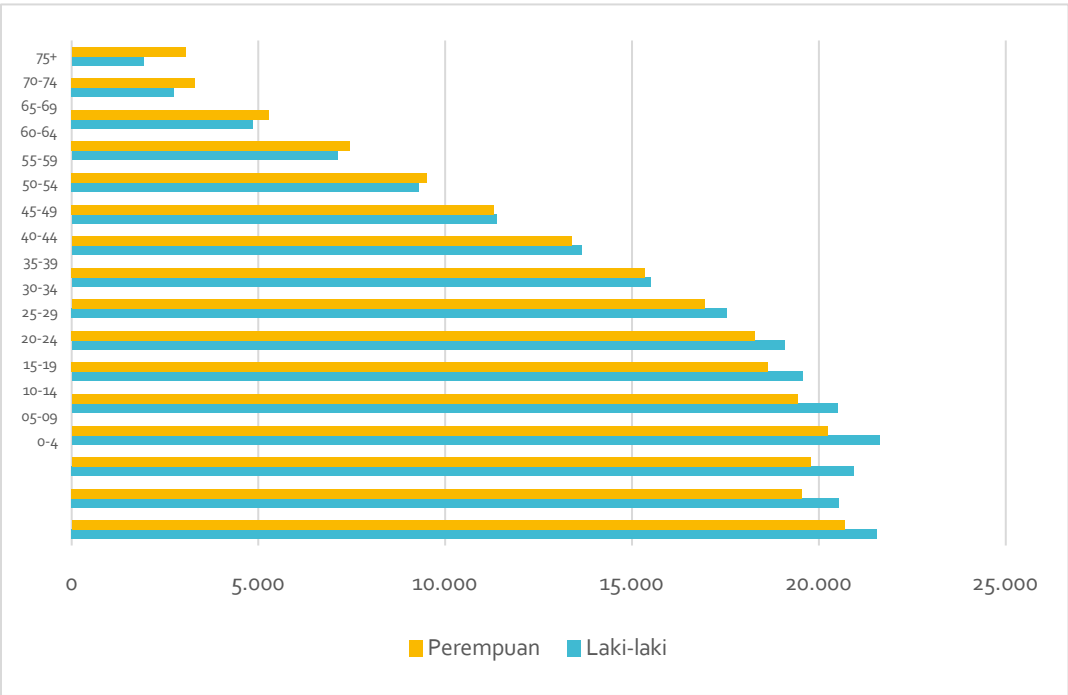
No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-4	21.81	20.97	42.78
2	5-9	20.66	19.61	40.27
3	10-14	20.59	19.61	40.20
4	15-19	21.75	20.35	42.10
5	20-24	20.74	19.70	40.44
6	25-29	19.62	18.58	38.20
7	30-34	19.17	18.41	37.58
8	35-39	17.94	17.18	35.12
9	40-44	15.76	15.65	31.41
10	45-49	14.01	13.76	27.77
11	50-54	11.68	11.60	23.28
12	55-59	9.62	9.81	19.43
13	60-64	7.45	7.81	15.26
14	65-69	5.16	5.59	10.75
15	70-74	2.99	3.55	6.54
16	75+	2.09	3.25	5.34
<b>Pasaman Barat</b>		<b>231.04</b>	<b>225.43</b>	<b>456.47</b>

*Sumber : Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025*

Berdasarkan Tabel 2.4, total penduduk Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 mencapai 456.470 jiwa, terdiri atas 231.040 laki-laki dan 225.430 perempuan, dengan dominasi kecil oleh laki-laki. Kelompok usia muda (0-19 tahun) mencakup 37% dari total populasi, menandakan kebutuhan akan layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. Sementara itu, kelompok usia produktif (20-59 tahun) yang berjumlah 253.230 jiwa atau 55% dari total populasi menunjukkan potensi bonus demografi yang signifikan, yang perlu diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keterampilan. Di sisi lain, populasi lansia (60 tahun ke atas) sebesar 37.890 jiwa (8,30%) mengindikasikan perlunya perhatian khusus terhadap layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

. Struktur populasi ini menggambarkan peluang dan tantangan bagi pembangunan daerah, dengan fokus pada pemanfaatan tenaga kerja produktif dan persiapan infrastruktur serta program untuk mendukung kesejahteraan seluruh kelompok usia.

Gambar 2.6    Komposisi Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Kelompok Umur Tahun 2024



Sumber : Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025

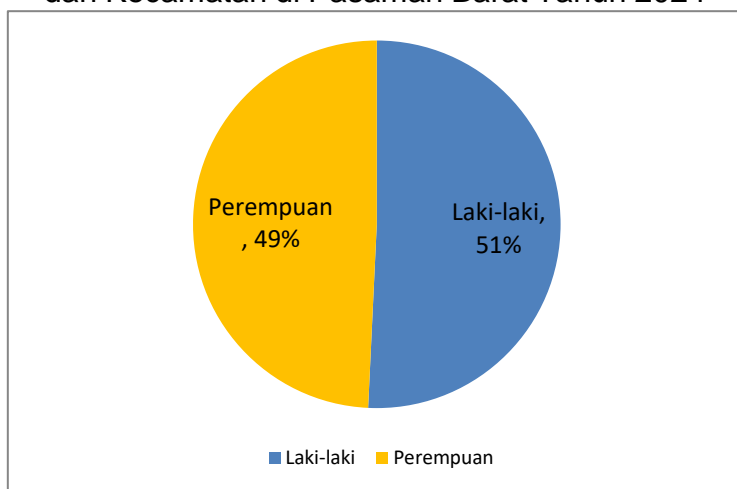
Tabel 2.5    Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2024

Kabupaten	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Pasaman Barat	91.318	88.618	179.936

Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat (Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024)

Berdasarkan Tabel 2.5, jumlah penduduk usia 0-18 tahun di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 mencapai 179.936 jiwa, terdiri dari 91.318 laki-laki dan 88.618 perempuan. Perbedaan jumlah antara laki-laki dan perempuan terlihat, di mana populasi laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan. Kelompok usia 0-18 tahun ini mencakup sebagian besar populasi muda yang akan menjadi bagian dari tenaga produktif di masa depan, menandakan potensi bonus demografi. Kondisi ini juga menekankan pentingnya investasi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan remaja untuk memastikan mereka dapat berkembang secara optimal. Selain itu, pemerintah perlu mempersiapkan infrastruktur dan layanan publik yang memadai untuk memenuhi kebutuhan generasi muda ini agar dapat mendukung perkembangan sosial dan ekonomi jangka panjang.

Gambar 2.7 Jumlah Penduduk Usia 0-18 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat

### **2.3 Angka Beban Ketergantungan**

Dependency ratio juga dapat disebut dengan angka ketergantungan atau beban ketergantungan (dependency ratio) adalah angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif) atau angka ketergantungan atau beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif.

Semakin tinggi angka Dependency Ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk produktif. Jadi semakin sedikit jumlah usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) akan mengurangi angka beban tanggungan, yang mengindikasikan bahwa akan semakin banyak kesempatan penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas diri.

Mereka yang digolongkan dalam kelompok umur bekerja adalah berumur 15 tahun ke atas sampai dengan umur 64 tahun. Sedangkan yang berumur 14 tahun ke bawah dan umur 65 tahun keatas digolongkan dalam usia beban ketergantungan. Komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu belum produktif (umur 0-14 tahun), produktif (umur 15-64 tahun), tidak produktif lagi (65+ tahun).



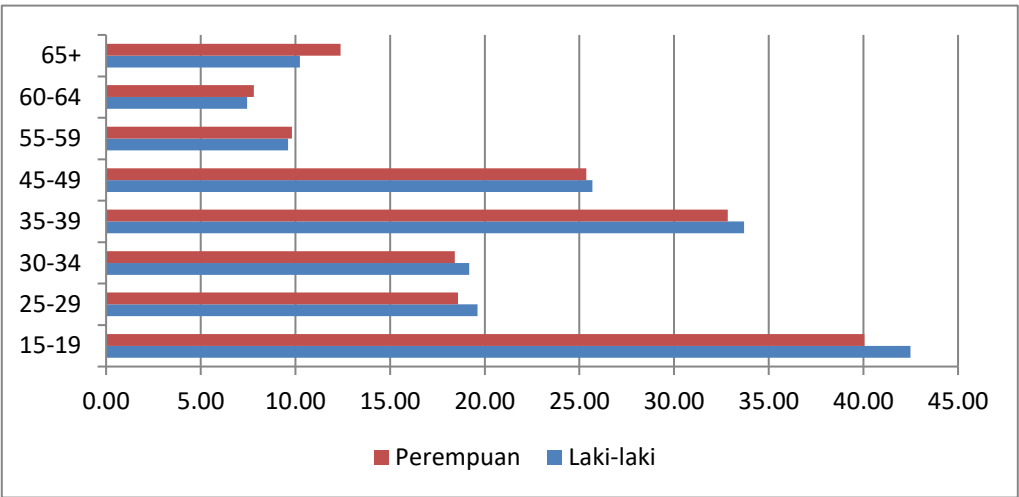
Tabel 2.6 Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Produktif dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Kelompok Umur Produktif	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
15-19	42,49	40,05	82,54
25-29	19,62	18,58	38,20
30-34	19,17	18,41	37,58
35-39	33,70	32,83	66,53
45-49	25,69	25,36	51,05
55-59	9,62	9,81	19,43
60-64	7,45	7,81	15,26
65+	10,24	12,39	22,63
<b>Jumlah</b>	<b>167,98</b>	<b>165,24</b>	<b>333,22</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat*

Berdasarkan Tabel 2.6 mengenai komposisi penduduk menurut kelompok umur produktif dan jenis kelamin tahun 2024, terlihat bahwa populasi usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Pasaman Barat mencapai 310.590 jiwa, dengan 157.740 laki-laki dan 152.850 perempuan. Perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan dalam rentang ini tidak signifikan, menunjukkan distribusi yang relatif seimbang antara kedua jenis kelamin.

Gambar 2.8 Komposisi Penduduk Menurut Umur Produktif dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 2.7 Rasio Ketergantungan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023

Kelompok Umur		Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	0-14	62.943	59.825
2	15-64	152.609	147.625
3	65+	8.644	10.833
Total		224.196	218.283

Sumber : BPS (Data Tahun 2023 dan 2024 bersumber dari Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021-2024 (Pertengahan Tahun/Juni))

Lanjutan Tabel 2.7

Kelompok Umur		Jenis Kelamin		Rasio
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Rasio Ketergantungan Muda (Penduduk 0-14 tahun)	40,59	39,87	40,24
2	Rasio Ketergantungan Tua (Penduduk 65+)	6,13	7,73	6,92
3	Rasio Ketergantungan (Penduduk Usia 0-14 dan 65+)	46,73	47,60	47,16

*Sumber : BPS (Data Tahun 2023 dan 2024 bersumber dari Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2021-2024 (Pertengahan Tahun/Juni))*

Berdasarkan tabel 2.7 diatas mengenai rasio ketergantungan di Kabupaten Pasaman Barat, terdapat beberapa indikator penting terkait beban ketergantungan pada penduduk produktif. Rasio ketergantungan muda tercatat sebesar 40,24. Ini berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung sekitar 40 anak berusia 0-14 tahun. Hal ini menunjukkan adanya beban ketergantungan yang cukup tinggi dari kelompok muda, sehingga pemerintah perlu fokus pada penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan anak, dan program kesejahteraan untuk menunjang perkembangan generasi muda.

Rasio ketergantungan tua tercatat 6,92, yang berarti setiap 100 orang usia produktif harus menopang hampir 7 orang lanjut usia. Angka ini masih relatif rendah dibanding ketergantungan muda, tetapi menunjukkan bahwa populasi lansia mulai memerlukan perhatian khusus, terutama terkait dengan program jaminan sosial dan layanan kesehatan bagi lansia.

Rasio ketergantungan total adalah 47,16, yang artinya setiap 100 penduduk produktif menanggung sekitar 47 orang dari kelompok usia tidak produktif (baik anak-anak maupun lansia). Rasio ini menunjukkan bahwa

hampir separuh dari populasi tidak berada dalam usia produktif, sehingga beban sosial dan ekonomi pada penduduk usia kerja cukup signifikan.

Dengan rasio ketergantungan muda yang lebih tinggi dibandingkan ketergantungan tua, Kabupaten Pasaman Barat berada pada fase di mana mayoritas beban ketergantungan berasal dari anak-anak. Ini memberikan peluang untuk memanfaatkan potensi bonus demografi dalam beberapa dekade mendatang, jika generasi muda yang besar ini berhasil dipersiapkan dengan baik melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Namun, pemerintah juga perlu mulai merencanakan program jangka panjang untuk menghadapi peningkatan jumlah lansia di masa depan, termasuk jaminan sosial dan layanan kesehatan yang berkelanjutan.

# **BAB III**

# **PENDIDIKAN**



### **BAB III**

## **PENDIDIKAN**

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal, informal dan non formal. Terdapat tiga pilar untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidik. Tolok ukur yang digunakan antara lain angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang, angka putus sekolah/ angka buta huruf, guru dan kepala sekolah. Pendidikan merupakan tolok ukur pembangunan sumberdaya manusia, disamping kesehatan dan pendapatan (faktor ekonomi). Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kualitas penduduk harus ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dalam dimensi Gender, perlu disajikan data terpilah berdasar jenis kelamin sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, kontrol, dampak dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta bias-bias Gender yang ditimbulkan.

Indikator pendidikan seperti Angka Melek Huruf (AMH), status pendidikan, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat menunjukkan tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya bagi perempuan dan anak. Semakin tinggi pendidikan dan rata-rata lama sekolah bagi perempuan akan berdampak kepada pola pikir dan tingkat kesejahteraannya. Perempuan yang berkualitas diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam mensukseskan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan bangsa.

Begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan, sehingga pemerintah menjadikan pendidikan sebagai hak dasar setiap manusia Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kesempatan memperoleh pendidikan diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi bagi sebagian masyarakat masih ada yang berpandangan bahwa pendidikan lebih diutamakan untuk kaum laki-laki dibanding perempuan, karena ada norma di masyarakat yang menganggap bahwa perempuan dibutuhkan untuk membantu mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki berkewajiban dalam mencari nafkah dan membantu menambah penghasilan rumah tangga sehingga menyebabkan pendidikan kaum perempuan masih tertinggal dibanding kaum laki-laki.

### **3.1 Angka Partisipasi Kasar**

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka Partisipasi Kasar digunakan dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD (penduduk usia 7-12 tahun), SMP (penduduk usia 13-15 tahun), dan SMA (penduduk usia 16-18 tahun). Semakin tinggi nilai APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai APK bisa lebih dari 100, karena ada anak yang berada diluar usia resmi sekolah sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
1 SD	106,42	111,94	109,04
2 SMP	93,16	92,39	92,81
3 SMA	86,53	86,91	86,70

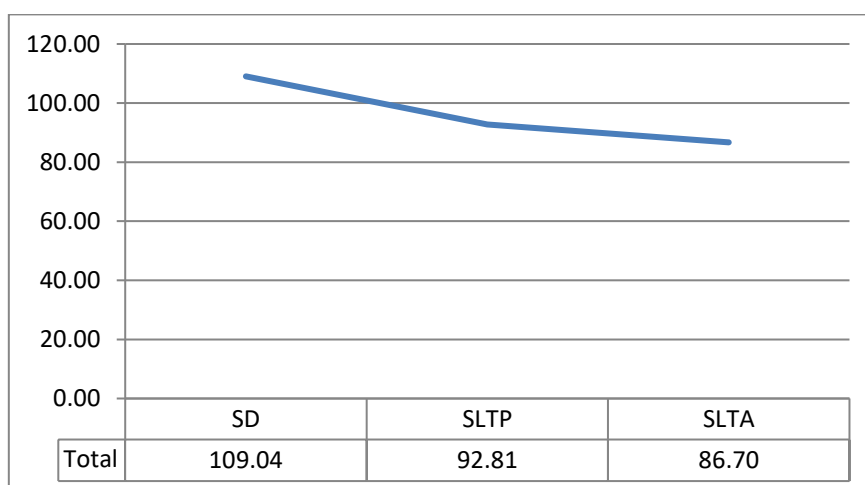
Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat

Tabel menunjukkan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan tahun 2024. APK di tingkat SD mencapai 109,04%, yang mengindikasikan adanya partisipasi siswa di luar rentang usia ideal, seperti siswa yang terlambat masuk sekolah atau siswa yang lebih cepat menyelesaikan jenjang pendidikan tersebut. Di tingkat SMP, APK turun menjadi 92,81%, menunjukkan bahwa tidak semua siswa usia SMP melanjutkan pendidikan mereka atau terdapat penurunan aksesibilitas.

Tren penurunan berlanjut pada tingkat SMA dengan APK sebesar 86,70%, yang menunjukkan semakin sedikit siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas. Tabel ini tidak memisahkan data berdasarkan jenis kelamin, sehingga analisis terkait perbedaan partisipasi antara laki-laki dan perempuan tidak dapat dilakukan. Secara umum, APK yang lebih tinggi di SD mengindikasikan tingginya akses dan partisipasi awal, namun terjadi penurunan partisipasi di jenjang pendidikan lebih tinggi.



Gambar 3.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : *BPS Kabupaten Pasaman Barat*

### 3.2 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota atau daerah perbatasan.

Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah. Keterbatasan APM

adalah kemungkinan adanya underestimate karena adanya siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Jenjang Pendidikan		Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	SD	99,34	98,88	99,12
2	SMP	89,02	77,10	83,54
3	SMA	73,37	73,28	73,33

*Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat*

Berdasarkan Tabel 3.2 mengenai Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, terdapat beberapa hal penting terkait partisipasi pendidikan menurut jenis kelamin pada berbagai jenjang pendidikan. Pada jenjang SD, partisipasi murni sangat tinggi, dengan 99,34% laki-laki dan 98,88% perempuan, serta total 99,12%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir semua anak usia SD telah berpartisipasi dalam pendidikan dasar, mencerminkan akses pendidikan dasar yang baik dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan di usia dini.

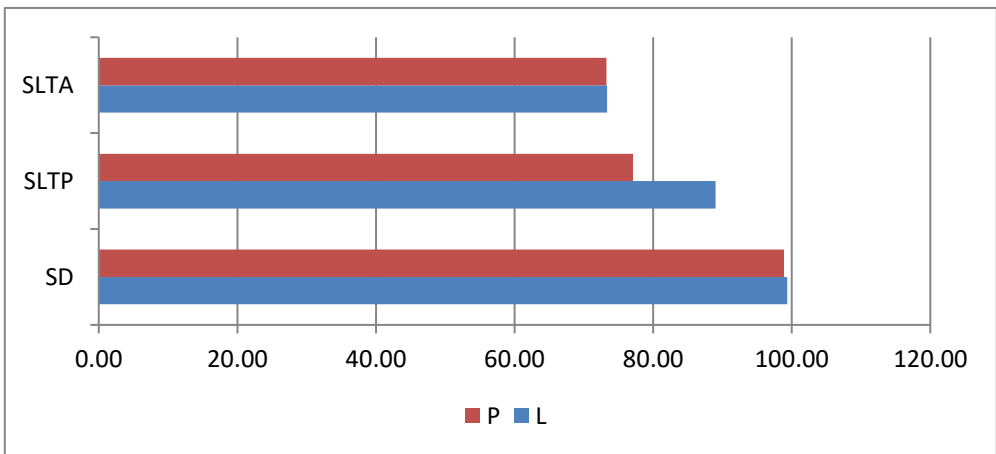
Angka Partisipasi Murni di jenjang SMP mengalami penurunan dibandingkan SD, yaitu 89.02% laki-laki dan 77,10% perempuan, dengan total 83,54%. Hal ini menandakan bahwa ada sebagian anak usia SMP yang belum bersekolah atau putus sekolah, sehingga perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan akses dan partisipasi di tingkat pendidikan menengah pertama.

Pada jenjang SMA, partisipasi lebih rendah lagi, yaitu 73,37% untuk laki-laki dan 73,28% untuk perempuan, dengan total 73,33%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi,

akses pendidikan, atau anak yang mulai bekerja di usia muda. Ini menunjukkan perlunya kebijakan khusus untuk mempertahankan siswa agar tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.

Secara umum, APM di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan tren menurun seiring dengan peningkatan jenjang pendidikan. Tingginya partisipasi di tingkat SD menunjukkan bahwa pendidikan dasar telah berjalan dengan baik, tetapi tantangan mulai muncul pada jenjang SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Pemerintah perlu fokus pada program peningkatan akses dan motivasi belajar untuk jenjang pendidikan menengah dan tinggi, serta memberikan dukungan ekonomi dan beasiswa bagi siswa agar dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Gambar 3.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat

### 3.3 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal APS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah.

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin 2024

Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
1 7-12	99,41	99,59	99,50
2 13-15	99,06	92,14	95,88
3 16-18	84,58	90,18	87,11

*Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat*

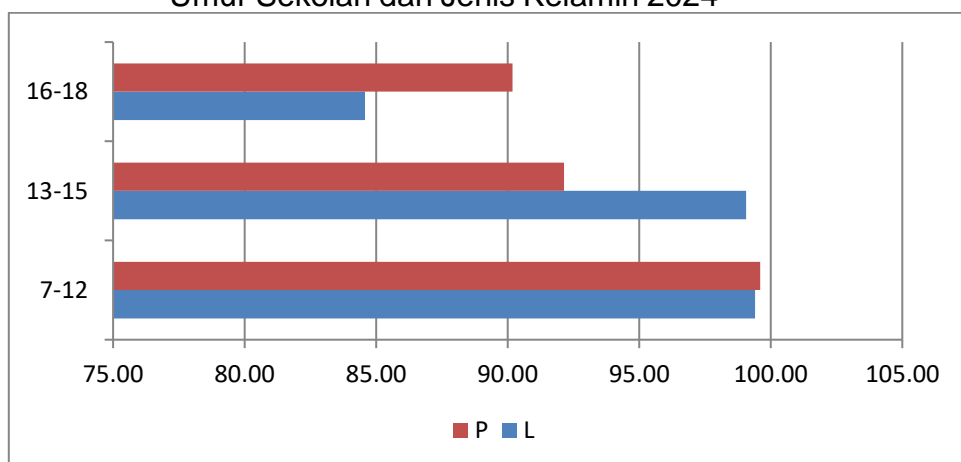
Berdasarkan Tabel 3.3 mengenai Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 menurut kelompok umur dan jenis kelamin, terdapat beberapa tren penting yang dapat dianalisis. Kelompok ini mencakup usia sekolah dasar, dan partisipasi sekolah sangat tinggi, mencapai 99,50% dengan 99,41% laki-laki dan 99,59% perempuan. Pada kelompok 13 – 15 tahun, yang mencakup usia SMP, partisipasi menurun

Menjadi 95,88%, dengan partisipasi laki-laki mencapai 99,06% dan perempuan 92,14%.

Pada rentang usia 16-18 tahun, yang mencakup pendidikan SMA, partisipasi mengalami penurunan lebih lanjut, yaitu 87,11%, dengan 84,58% laki-laki dan 90,18% perempuan.

Secara keseluruhan, Angka Partisipasi Sekolah di Pasaman Barat menunjukkan penurunan seiring bertambahnya usia. Partisipasi sangat tinggi di usia sekolah dasar dan menurun secara bertahap pada usia SMP, SMA, dan pendidikan tinggi. Faktor ekonomi, sosial, dan budaya kemungkinan berperan dalam penurunan partisipasi di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, terutama bagi laki-laki di pendidikan tinggi. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu memberikan dukungan, seperti program beasiswa dan kampanye motivasi belajar, untuk meningkatkan partisipasi di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, terutama bagi kelompok usia 19-23 tahun.

Gambar 3.3 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Sekolah dan Jenis Kelamin 2024



Sumber : Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat

### 3.4 Angka Melek Huruf

Kemampuan membaca dan menulis dicerminkan oleh indikator tingkat melek huruf. Angka Melek Huruf (AMH) merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Angka ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta huruf dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Selain itu juga digunakan untuk menunjukkan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi serta menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Angka Buta Huruf (ABH) adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat buta huruf yang rendah menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Di bawah ini adalah tabel angka melek huruf dan buta huruf menurut jenis kelamin di Pasaman Barat Tahun 2024. .

Tabel 3.4    Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Jenis Kelamin	AMH (%)	ABH (%)
Laki-laki	99,70	0,30
Perempuan	99,01	0,99
<b>Pasaman Barat</b>	<b>99,35</b>	<b>0,65</b>

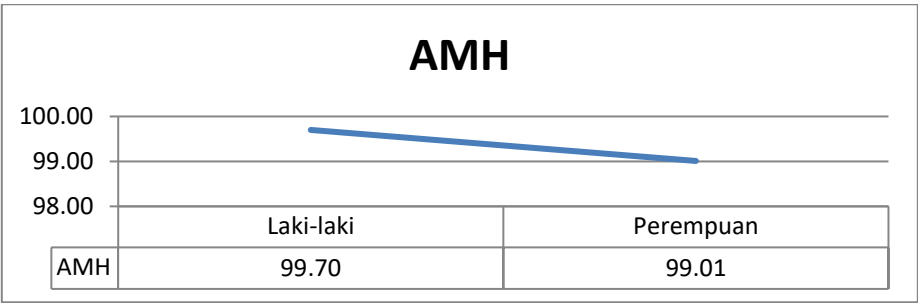
*Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat*

Berdasarkan Tabel 3.4 mengenai Angka Melek Huruf (AMH) dan Angka Buta Huruf (ABH) di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, terlihat bahwa tingkat literasi di daerah ini sangat tinggi. Secara keseluruhan, 99,35% penduduk telah melek huruf, dengan angka buta huruf hanya 0,30%. Laki-laki memiliki tingkat melek huruf sebesar 99,70%, sedikit lebih tinggi dibandingkan 99,01% pada perempuan. Ini menunjukkan bahwa perbedaan gender dalam kemampuan baca tulis sangat kecil, yang mencerminkan keberhasilan dalam pemerataan akses pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Pada ABH (Angka Buta Huruf) meskipun angkanya sangat rendah, laki-laki memiliki 0,30% buta huruf, sedangkan perempuan sedikit lebih tinggi dengan 0,99%. Perbedaan ini kecil tetapi tetap menunjukkan bahwa perlu perhatian lebih bagi kelompok perempuan untuk mencapai 100% literasi.

Secara keseluruhan, Kabupaten Pasaman Barat memiliki tingkat literasi yang sangat baik, dengan 99,35% penduduk yang sudah melek huruf. Perbedaan kecil antara laki-laki dan perempuan dalam hal melek huruf menunjukkan bahwa upaya pemerataan pendidikan telah berjalan dengan baik. Namun, perhatian khusus masih diperlukan untuk mengurangi angka buta huruf di kalangan perempuan agar tingkat literasi dapat terus meningkat dan mencapai angka sempurna di masa depan. Pemerintah dapat terus menggalakkan program literasi dan pendidikan untuk mendukung masyarakat, terutama di kelompok yang rentan.

Gambar 3.4 Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kemampuan Baca Tulis dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat

3.5 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Indikator pendidikan yang menunjukkan dampak dari pembangunan bidang pendidikan adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan atau ijazah tertinggi yang dimiliki dan rata-rata lama sekolah. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah persentase penduduk yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan tertinggi. Semakin besar persentase penduduk yang menamatkan jenjang pendidikan tertinggi menunjukkan semakin baik sistem pendidikan yang dijalankan.

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk dapat melakukan migrasi vertikal yaitu berpindah dari suatu keadaan kesejahteraan ke keadaan kesejahteraan yang lebih baik, misalkan dari keadaan miskin menjadi tidak miskin. Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan akan mengakibatkan semakin mudah mencari pekerjaan yang lebih baik. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi hanya bisa didapatkan apabila manusia tersebut memiliki jenjang pendidikan yang tinggi pula.



Tabel 3.5 Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Tahun 2024

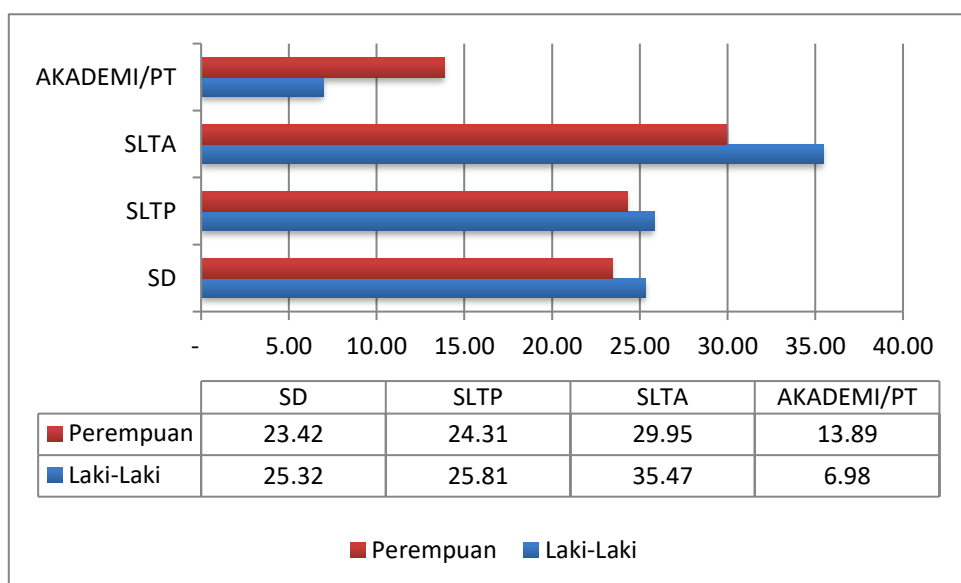
Jenjang Pendidikan	Laki-laki (Persen)	Perempuan (Persen)	Total (Persen)
SD	25,32	23,42	24,37
SLTP	25,81	24,31	25,05
SLTA	35,47	29,95	32,71
Akademi/Perguruan Tinggi	6,98	13,89	10,44

*Sumber : BPS Kab.Pasaman Barat (Statistik Kesejahteraan Rakyat Pasaman Barat 2024)*

Berdasarkan Tabel 3.5, mayoritas penduduk Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 memiliki tingkat pendidikan tertinggi di jenjang SLTA dengan persentase 32,71% (35,47% laki-laki dan 29,95% perempuan). Jenjang ini merupakan proporsi terbesar, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah menyelesaikan pendidikan menengah atas. Pada jenjang SLTP, tercatat 25,05% penduduk (25,81% laki-laki dan 24,31% perempuan), sedangkan 24,37% penduduk menyelesaikan SD (25,32% laki-laki dan 23,42% perempuan). Dan pada jenjang pendidikan Akademi/Perguruan sebanyak 10,44% dengan persentase perempuan (13,89%) lebih tinggi dari pada laki-laki (6,98%).

Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar penduduk memiliki pendidikan menengah, masih terdapat tantangan dalam mendorong peningkatan pendidikan tinggi dan mengurangi jumlah masyarakat tanpa ijazah, terutama pada perempuan. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan akses pendidikan berkelanjutan dan program pemberdayaan agar kualitas pendidikan di daerah dapat terus berkembang.

Gambar 3.5 Pendidikan Tertinggi yang Dimiliki menurut Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat

### 3.6 Rata-rata Lama Sekolah

Secara umum, tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat dari rata-rata lama bersekolah. Indikator ini dapat menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa penduduk di suatu wilayah dapat menikmati pendidikan. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani.

Tabel 3.6 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2024

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Total
MYS	9,14	8,91	8,99

Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat

Rata-rata lama sekolah penduduk di Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sekitar 8,99 tahun. Ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk baru dapat menjalani pendidikannya sampai kelas VIII atau kelas 2 SMP atau putus sekolah di kelas 2 SMP. Angka ini masih rendah bila dibandingkan dengan program pendidikan wajib belajar (wajib) 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.

### **3.7 Sertifikasi Guru**

Sertifikasi Guru atau Sergur merupakan sebuah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang sudah memenuhi standar profesional atau kelayakan seorang guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di sekolah. Seorang guru yang sudah bersertifikat, akan memiliki nilai lebih yang dapat digunakan sebagai nilai tambah ketika seorang guru akan berpindah ke sekolah lain yang mungkin lebih menjanjikan. Sertifikasi Guru ini diberikan kepada tenaga pendidik yang sudah memenuhi syarat.

Program sertifikasi guru merupakan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dilatarbelakangi oleh kualitas pendidikan. Mutu masih menjadi paradigma dalam dunia pendidikan. Banyak faktor mengapa kualitas pendidikan masih perlu pembenahan lebih lanjut. Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas di dunia pendidikan adalah guru.

Guru merupakan ujung tombak dalam peningkatan kualitas pendidikan. Masalah pendidikan yang sering muncul adalah berkaitan dengan profesionalisme dan kesejahteraan. Untuk menjawab itu pemerintah telah mengeluarkan program sertifikasi guru melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015.

Tabel 3.7 Jumlah Guru Negeri yang telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang Pendidikan SD dan SLTP Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	SD			SMP		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Sungai Beremas	21	47	68	21	47	68
2	Ranah Batahan	35	80	115	35	80	115
3	Koto Balingka	30	69	99	30	69	99
4	Sungai Aur	55	81	136	35	81	116
5	Lembah Melintang	59	136	195	59	136	195
6	Gunung Tuleh	32	73	105	32	73	105
7	Talamau	35	81	116	35	81	116
8	Pasaman	74	173	247	74	173	247
9	Luhak Nan Duo	33	75	108	33	75	108
10	Sasak Ranah Pasisie	10	21	31	10	21	31
11	Kinali	47	107	154	47	107	154
<b>Pasaman Barat</b>		<b>431</b>	<b>943</b>	<b>1374</b>	<b>411</b>	<b>943</b>	<b>1354</b>

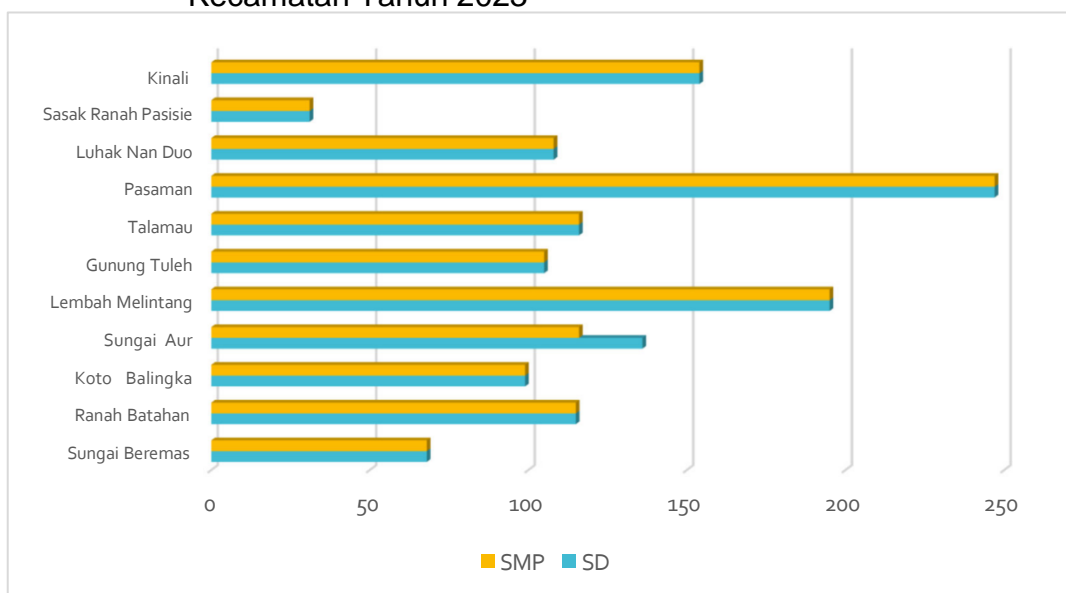
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

\*\* Data SMA tidak tersedia (Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat)

Berdasarkan Tabel 3.8, jumlah guru negeri bersertifikasi di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2023 sebanyak 1.354 orang, dengan rincian 1.312 guru SD dan 412 guru SMP. Dari total guru SD, terdapat 431 laki-laki dan 943 perempuan, sementara di jenjang SMP terdapat 141 laki-laki dan 271 perempuan. Kecamatan dengan jumlah guru bersertifikasi terbanyak adalah Lembah Melintang dengan 195 guru SD dan 136 guru SMP, menunjukkan konsentrasi tenaga pendidik yang tinggi di daerah tersebut. Sebaliknya, Sasak Ranah Pasisie memiliki jumlah guru bersertifikasi paling sedikit dengan hanya 31 guru SD dan 20 guru SMP, mengindikasikan adanya kebutuhan peningkatan distribusi guru di daerah ini.

Secara umum, jumlah guru perempuan bersertifikasi lebih banyak dibanding laki-laki di semua kecamatan dan jenjang pendidikan, mencerminkan partisipasi perempuan yang signifikan dalam sektor pendidikan. Data ini menunjukkan pentingnya pemerataan distribusi guru bersertifikasi agar kualitas pendidikan di seluruh kecamatan Pasaman Barat dapat merata dan optimal.

**Gambar 3.6** Jumlah Guru Negeri yang telah Memperoleh Sertifikasi Jenjang Pendidikan SD dan SLTP Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023



*Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat*

### 3.8 Jumlah Lulusan Paket A, B, dan C

Program Paket A, B dan C cocok bagi orang yang sudah berusia di atas usia sekolah, namun ingin memiliki ijazah dan pengetahuan setara dengan sekolah formal. Ijazah yang diperoleh dari program ini bisa digunakan untuk melamar pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Untuk mengikuti program ini, peserta harus mendaftar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdaftar di Departemen Pendidikan Nasional.

Setelah mendaftar, peserta akan mengikuti Ujian Kejar Paket dan mendapatkan ijazah yang diakui negara. Lama waktu untuk menyelesaikan program ini adalah Paket A setara SD selama 6 tahun, Paket B setara SMP selama 3 tahun dan Paket C setara SMA selama 3 tahun.

Kejar Paket A yaitu Ujian kesetaraan yang dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SD sederajat untuk mendapatkan bukti lulus atau Ijazah Kesetaraan tingkat SD. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki ijazah SD sederajat maka dia diperkenankan untuk mengikuti kejar paket A. Usia Peserta tidak dibatasi (bebas usia namun tidak masa usia belajar).

Kejar Paket B yaitu Ujian kesetaraan yang dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SMP/Mts sederajat untuk mendapatkan bukti lulus atau Ijazah Kesetaraan tingkat SMP/Mts. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki ijazah SMP/Mts sederajat maka dia diperkenankan untuk mengikuti kejar paket B.

Kejar Paket C yaitu Ujian kesetaraan yang dilaksanakan untuk jenjang pendidikan SMA IPA SMA IPS/ Sederajat untuk mendapatkan bukti lulus atau Ijazah Kesetaraan tingkat SMA IPA SMA IPS/ Sederajat. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki ijazah SMA IPA SMA IPS/ Sederajat maka dia diperkenankan untuk mengikuti kejar paket C.

Tabel 3.8 Jumlah Lulusan Paket A, B, dan C Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Tahun 2023

No	Nama Satuan Pendidikan	Paket A			Paket B			Paket C		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1.	SKB Pasaman Barat	0	0	0	27	11	38	21	10	31
2.	PKBM Al-Fatih Kecamatan Pasaman	6	3	9	54	26	80	4	4	8
3.	PKBM Ibunda Kecamatan Ranah Batahan	2	2	4	3	8	11	11	6	17
4.	PKBM Az-Zahra Kecamatan Sungai Aur	12	5	17	25	11	36	31	9	40
5.	PKBM Baitur Rafki Kecamatan Talamau	9	5	14	5	3	8	12	0	12
6.	PKBM Biba Course Kecamatan Lembah Melintang	2	0	2	37	20	57	74	20	94
7.	PKBM Twin Course Kecamatan Koto Balingka	8	4	12	27	7	34	37	11	48
8.	PKBM Perwira Negara Kecamatan Lembah Melintang	3	1	4	42	8	50	36	7	43
9.	PKBM Syukur Hariesta Matondang Kec Gunung Tuleh	4	0	4	18	4	22	52	10	62
10.	PKBM Nurul Falah Kecamatan Pasaman	13	4	17	26	9	35	30	14	44
11.	PKBM Zahratul Syithah Kecamatan Pasaman	21	9	30	41	14	55	52	17	69
<b>Jumlah</b>		<b>80</b>	<b>33</b>	<b>113</b>	<b>305</b>	<b>121</b>	<b>426</b>	<b>360</b>	<b>108</b>	<b>468</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat

Tabel menunjukkan angka kelulusan Paket A, B, dan C berdasarkan jenis kelamin di beberapa satuan pendidikan di kecamatan pada tahun 2023. Secara umum, jumlah lulusan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan di semua paket. Paket A memiliki total 113 lulusan (80 laki-laki

dan 33 perempuan), sedangkan Paket B dan C masing-masing mencatat 426 dan 468 lulusan dengan dominasi laki-laki (305 dan 360 orang). Beberapa lembaga seperti PKBM Biba Course dan Twin Course menonjol dengan jumlah lulusan tinggi, khususnya di Paket C dan B. Sebaliknya, SKB Pasaman Barat tidak memiliki lulusan untuk Paket A. Secara keseluruhan, terjadi ketimpangan gender, dengan lebih banyak laki-laki lulus di setiap paket, terutama di Paket B dan C.



# **BAB IV KESEHATAN**



## **BAB IV**

### **KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA**

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah yang berdampak pada peningkatan produktivitas penduduk. Oleh karena itu, investasi sumber daya manusia bidang kesehatan perlu terus mendapat perhatian besar baik dari pemerintah dan masyarakat, dan usaha yang dilakukan harus berkesinambungan.

Salah satu upaya pemerintah dalam memperhatikan kesejahteraan perempuan salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB). Kesehatan perempuan dapat diukur berdasarkan kualitas fisik perempuan melalui indikator kematian ibu melahirkan, penolong persalinan, Kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke sarana pelayanan kesehatan, Imunisasi TT pada ibu hamil, Ibu hamil yang mendapat tablet Zat Besi (Fe). Program Keluarga Berencana (KB) merupakan upaya pemerintah dalam mendukung kesejahteraan perempuan dan menekan laju pertumbuhan penduduk. Indikator yang digunakan meliputi status pemakaian alat/cara KB, jenis-jenis alat KB yang digunakan dan anak lahir hidup.

#### **4.1 Kematian Ibu Melahirkan**

Dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak mendapat perhatian khusus. Hal tersebut dikarenakan Angka Kematian Ibu

merupakan salah satu indikator yang bisa menggambarkan kesejahteraan masyarakat disuatu daerah.

Menurut WHO, Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu sebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau insidensif) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Tanpa memperhitungkan lama kehamilan per-100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula dalam jangka waktu 6 minggu sehingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan.

Pemerintah bersama masyarakat bertanggung jawab dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu melahirkan dengan menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pascapersalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi serta akses terhadap keluarga berencana.

Tabel 4.1 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu
1	Sungai Beremas	3
2	Ranah Batahan	1
3	Koto Balingka	2
4	Sungai Aur	1
5	Lembah Melintang	0
6	Gunung Tuleh	1
7	Talamau	0
8	Pasaman	1
9	Luhak Nan Duo	1
10	Sasak Ranah Pasisie	1
11	Kinali	1
<b>Kabupaten Pasaman Barat</b>		<b>12</b>

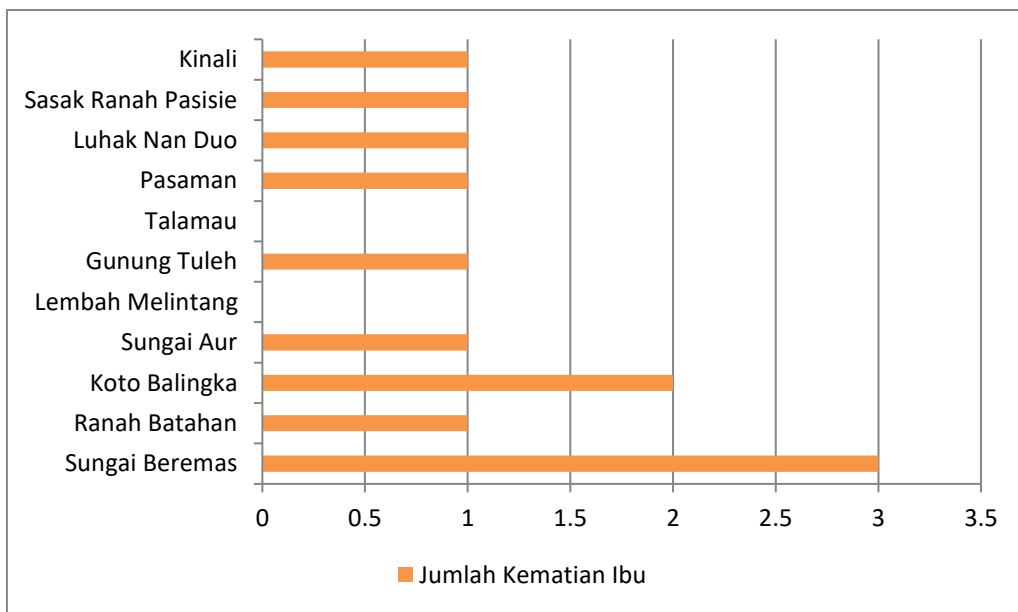
*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat*

Tabel 4.1 ini menunjukkan jumlah kematian ibu melahirkan di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 dengan total 12 kasus yang tersebar di berbagai kecamatan. Kecamatan dengan angka tertinggi adalah Sungai Beremas dengan 3 kasus, diikuti oleh Koto Balingka 2 kasus, dan Ranah Batahan, Sungai Aur, Gunung Tuleh, Pasaman, Luhak Nan Duo, Sasak Ranah Pasisie serta Kinali masing-masing 1 kasus. Beberapa kecamatan, seperti Lembah Melintang dan Talamau melaporkan tidak ada kematian ibu.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan distribusi yang tidak merata, dengan beberapa kecamatan memiliki tingkat kematian ibu yang lebih tinggi, khususnya Sungai Beremas sebagai penyumbang terbesar. Hal ini dapat menandakan adanya perbedaan dalam akses layanan kesehatan ibu, kualitas fasilitas kesehatan, atau penanganan komplikasi melahirkan di antara kecamatan. Intervensi perlu difokuskan pada kecamatan dengan angka kematian tinggi untuk meningkatkan layanan

kesehatan ibu dan menurunkan risiko kematian di masa mendatang.

Gambar 4.1 Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Pasaman Barat, Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

## 4.2 Penyebab Kematian Ibu Melahirkan

Salah satu indikator yang menunjukkan kesejahteraan masyarakat di suatu negara adalah angka kematian ibu atau AKI. Semakin tinggi AKI maka semakin rendah kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya semakin rendah AKI maka kesejahteraan masyarakat suatu negara meningkat. Masih menjadi pekerjaan yang menantang bagi Indonesia untuk menurunkan angka kematian ibu yang tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs).

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penentu angka kematian. Tingginya angka kematian ibu di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari fase sebelum hamil, yaitu kondisi wanita subur yang mengalami anemia, kurang kalori, obesitas, dan mempunyai penyakit penyerta. Selain itu juga disebabkan oleh beberapa faktor yang lazim muncul, yakni hipertensi, pendarahan, keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi dan infeksi.

Tabel 4.2 Penyebab Kematian Ibu karena hamil, melahirkan dan nifas di Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Penyebab kematian Ibu karena hamil, melahirkan dan nifas (%)					
		Eklam- psia	Infek- -si	Abortus	Kompl. Masa puepureum	Pendar- ahan	Lain- lain
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	8,3	16,6
2	Ranah Batahan	-	-	-	-		8,3
3	Koto Balingka	-	-	-	-	8,3	8,3
4	Sungai Aur	8,3	-	-	-	-	-
5	Lembah Melintang		-	-	-	-	-
6	Gunung Tuleh	8,3	-	-	-	-	-
7	Talamau	-	-	-	-	-	-
8	Pasaman	-	8,3	-	-	-	-
9	Luhak Nan Duo	8,3	-	-	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	-	-	8,3
11	Kinali	-	-	-	-	-	8,3
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>25</b>	<b>8,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16,6</b>	<b>50</b>

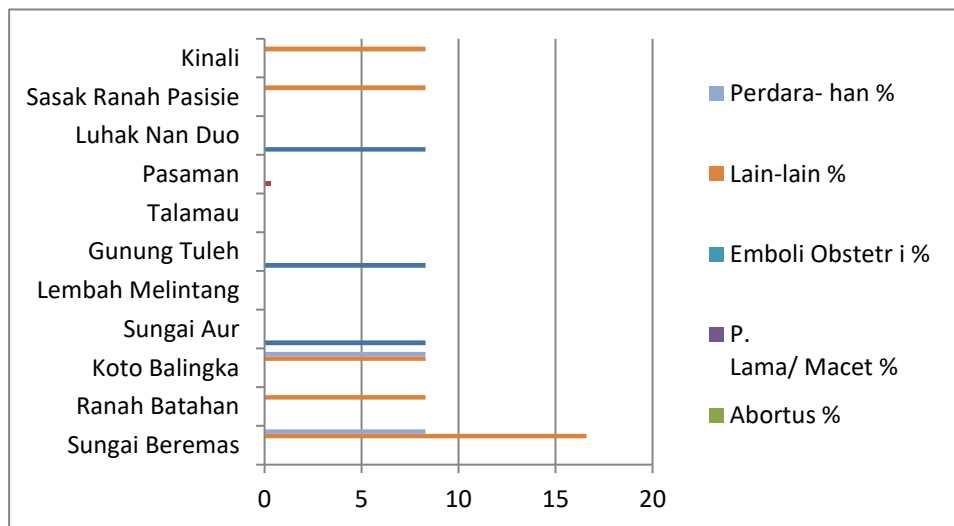
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 4.2 ini menampilkan penyebab kematian ibu terkait kehamilan, melahirkan, dan masa nifas di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024. Penyebab utama kematian ibu adalah eklampsia dan kategori lain-lain, masing-masing menyumbang 75 % dari total kasus. Pendarahan merupakan penyebab kedua terbanyak, yaitu 16,6%, diikuti dengan infeksi sebanyak 8,3%. Tidak ada laporan kematian akibat aborsi.

Secara geografis, kematian Kecamatan Sungai Beremas dan Koto Balingka mengalami kasus dengan penyebab perdarahan.. Kecamatan seperti Sungai Aur, Gunung Tuleh, dan Luhak Nan Duo mencatat adanya kematian terkait eklampsia. Sementara itu, Pasaman mengalami kasus dengan penyebab infeksi. Sementara Lembah Melintang dan Talamau tidak mencatat adanya kematian ibu.

Dari data ini, terlihat bahwa eklampsia dan pendarahan menjadi perhatian utama dalam pencegahan kematian ibu di daerah tersebut. Penting bagi dinas kesehatan setempat untuk meningkatkan pemantauan kehamilan, pelayanan medis darurat, serta edukasi terkait tanda-tanda komplikasi selama dan setelah melahirkan untuk menurunkan angka kematian ibu di masa mendatang. Penyebab kematian ibu hamil lainnya adalah infeksi, Emboli Obstetri pendaharan, Leukimia, Gagal Jantung dan Hipertensi.

Gambar 4.2 Penyebab Kematian Ibu karena Hamil, Melahirkan dan Nifas di Pasaman Barat Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

### 4.3 Penolong Persalinan

Tenaga penolong persalinan adalah orang yang biasa memeriksa kehamilan atau memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas meliputi dokter spesialis kebidanan, dokter umum, bidan dan perawat yang dilatih kebidanan (Permenkes RI No. 97 Tahun 2014). Rendahnya cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan merupakan salah satu penyebab tingginya AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi) di Indonesia.

Salah satu cara untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal. Proses persalinan ini diyakini akan berpengaruh terhadap pengurangan kematian bayi dan kematian ibu yang



sedang melahirkan, dimana pemerintah mengupayakan agar para ibu hamil dapat melahirkan dengan selamat, demikian pula bayi yang dilahirkan dapat terlahir dengan sehat. Untuk itu pemerintah terus berupaya agar tenaga kesehatan tersebar sampai ke seluruh pelosok daerah.

**Tabel 4.3 Jumlah Kelahiran Menurut Penolong Persalinan dan Kecamatan Tahun 2024**

No	Kecamatan	Penolong Persalinan				
		Dokter	Bidan	Dukun	Lainnya	Total
1.	Sungai Beremas	184	309	0	-	493
2.	Ranah Batahan	128	280	0	-	408
3.	Koto Balingka	226	291	5	-	522
4.	Sungai Aur	303	301	3	-	607
5.	Lembah Melintang	280	533	2	-	815
6.	Gunung Tuleh	238	114	0	-	352
7.	Talamau	2.269	131	0	-	2.400
8.	Pasaman	853	349	0	-	1.202
9.	Luhak Nan Duo	462	177	1	-	640
10.	Sasak Ranah Pasisie	192	54	0	-	246
11.	Kinali	724	562	3	-	1.289
<b>Pasaman Barat</b>		<b>5.859</b>	<b>3.101</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>8.974</b>

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat*

*Keterangan : Penolong persalinan oleh dokter pada Puskesmas*

Tabel menunjukkan jumlah kelahiran menurut penolong persalinan dan kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dengan total 8.974 kelahiran. Penolong persalinan paling dominan adalah dokter, yang membantu 5.859 kelahiran (65,29% dari total), diikuti oleh bidan dengan 3.101 kelahiran (34,55%). Peran dukun sangat kecil, hanya menangani 14 kelahiran, sementara kategori lainnya tidak mencatat adanya kelahiran.

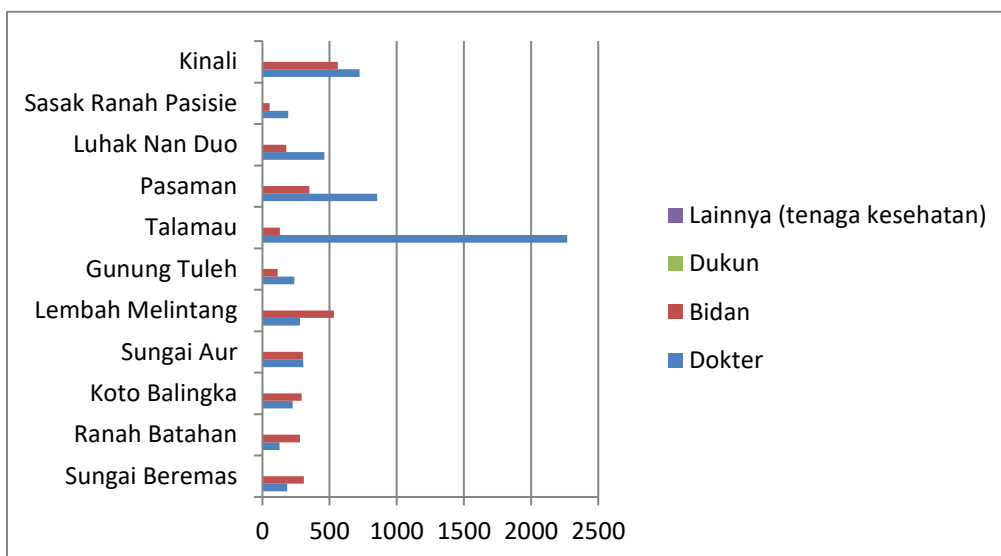
Secara geografis, Kecamatan Talamau mencatat jumlah kelahiran tertinggi dengan 2.400 kelahiran, diikuti oleh Kinali (1.289 kelahiran) dan Pasaman (1.202 kelahiran). Bidan dan dokter mendominasi peran dalam membantu persalinan di semua kecamatan. Beberapa kecamatan, seperti Sungai Beremas, Ranah Batahan, Gunung Tuleh,, Talamau, Pasaman, dan Kinali, tidak mencatat adanya bantuan dukun dalam persalinan, sementara kecamatan seperti Koto Balingka, Sungai Aur, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, Luhak Nan Duo, dan Kinali masih memiliki keterlibatan dukun meskipun jumlahnya kecil.

Dari data ini, terlihat bahwa bidan dan dokter memainkan peran penting dalam layanan persalinan di wilayah ini, menunjukkan akses yang relatif baik terhadap tenaga medis profesional. Namun, keberadaan dukun meskipun kecil, terutama di beberapa kecamatan, masih menunjukkan bahwa beberapa masyarakat mungkin masih mengandalkan cara tradisional. Salah satu faktor yang mempengaruhi ibu-ibu dalam memilih dukun bayi sebagai penolong persalinan yang pertama ialah faktor kepercayaan. Mereka percaya karena dukun bayi dianggap memiliki kemampuan yang lebih, antara lain kemampuan membacakan doa-doa yang memberikan efek rasa nyaman dan perasaan tenang kepada klien. Selain itu yang menambah kepercayaan masyarakat terhadap dukun bayi ialah mereka telah lulus mengikuti kursus kebidanan. Faktor lainnya yang relatif besar pengaruhnya adalah biaya yang relatif terjangkau.

Diharapkan program pemerintah tidak hanya menambah tenaga medis, akan tetapi juga tetap diperlukan peningkatan keterampilan dan pengetahuan kesehatan bagi dukun bayi karena mengingat eksistensi mereka tersebut. Pemerintah diminta membuat peraturan yang menyatakan penanganan ibu melahirkan wajib dilakukan oleh tenaga medis. Aturan tersebut diharapkan dapat menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka

kematian bayi (AKB).

Gambar 4.3 Jumlah Kelahiran Menurut Penolong Persalinan dan Kecamatan Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 4.4 Jumlah Kelahiran Bayi dengan Penolongan Persalinan oleh Dokter pada Rumah Sakit Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah Persalinan	Keterangan
1.	RSUD Pasaman Barat	277	-
2.	RSI Ibnu Sina	2.073	-
3.	RSIA Al Ihsan	2.022	-
4.	RSUD Pratama Ujunggading	27	-
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>4.399</b>	<b>-</b>

Sumber : Rumah Sakit se- Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 4.4 ini menunjukkan jumlah kelahiran bayi dengan penolong persalinan oleh dokter di rumah sakit di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dengan total 4.399 kelahiran. RSI Ibnu Sina mencatat jumlah

persalinan tertinggi, yaitu 2.073 kelahiran (sekitar 47% dari total), diikuti oleh RSIA Al Ihsan dengan 2.022 kelahiran (46%). RSUD Pasaman Barat berkontribusi dengan 277 kelahiran, sementara RSUD Pratama Ujung Gading menangani 27 kelahiran.

Data ini menunjukkan bahwa mayoritas persalinan yang dibantu dokter terjadi di fasilitas kesehatan swasta, khususnya di RSI Ibnu Sina. RSUD Pasaman Barat dan RSIA Al Ihsan memiliki jumlah persalinan yang jauh lebih rendah dibandingkan kedua rumah sakit tersebut, dan RSUD Pratama Ujung Gading mencatat persalinan paling sedikit. Ini mungkin menunjukkan preferensi masyarakat untuk melahirkan di rumah sakit swasta yang memiliki layanan spesialis atau fasilitas yang lebih lengkap. Selain itu, persebaran fasilitas kesehatan dan kapasitas rumah sakit dapat memengaruhi jumlah persalinan di setiap rumah sakit. Optimalisasi fasilitas kesehatan di rumah sakit umum, terutama RSUD Pratama Ujung Gading, dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah ini.

Tabel 4.5 Jumlah Kelahiran Bayi (Bayi Lahir Hidup) Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Nama Rumah Sakit	Jumlah Kelahiran Bayi	Bayi Lahir Hidup	Persentase
1.	RSUD Pasaman Barat	277	277	100%
2.	RSI Ibnu Sina Simpang Empat	2.073	2.053	99%
3.	RSIA Al Ihsan Simpang Empat	2.022	2.022	100%
4.	RSUD Pratama Ujung Gading	27	27	100%
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>4.399</b>	<b>4.379</b>	

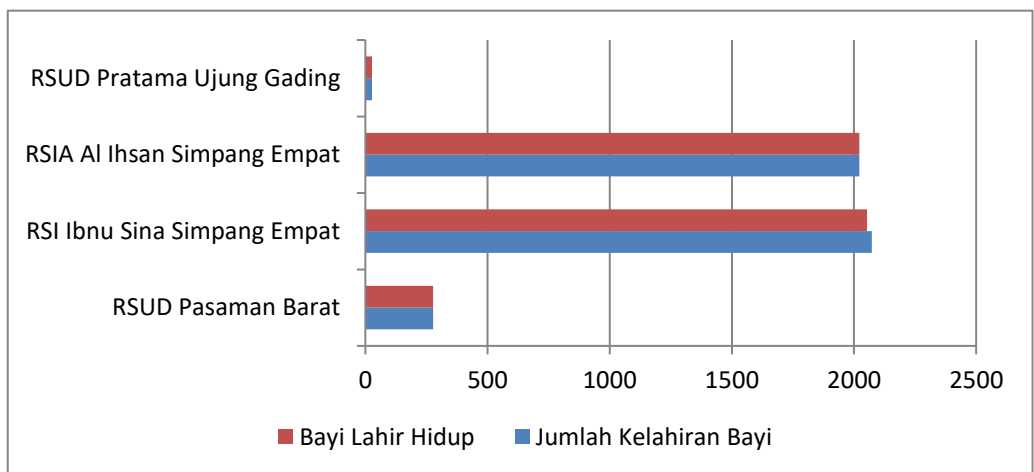
Sumber : Rumah Sakit se- Kabupaten Pasaman Barat

Tabel ini menunjukkan jumlah kelahiran bayi dan bayi lahir hidup di berbagai rumah sakit di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 dengan total 4.399 kelahiran dan 4.379 bayi lahir hidup, menghasilkan persentase kelahiran hidup sebesar 99,54%. Dari data ini, terlihat bahwa sebagian besar bayi lahir dalam kondisi hidup di semua rumah sakit.

RSI Ibnu Sina Simpang Empat mencatat jumlah kelahiran tertinggi, yaitu 2.073 kelahiran, dengan 98,63% bayi lahir hidup. memiliki 2.053 kelahiran, dengan 99% bayi lahir hidup. RSIA Al Ihsan Simpang Empat mencatat 2.022 kelahiran, dengan 100% bayi lahir hidup. RSUD Pasaman Barat melaporkan 277 kelahiran, dengan 100% bayi lahir hidup, menunjukkan angka kelahiran hidup terendah di antara rumah sakit lain. RSUD Pratama Ujung Gading mencatat hanya 27 kelahiran, dan semua bayi lahir hidup, sehingga mencapai 100% persentase kelahiran hidup.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran hidup di Kabupaten Pasaman Barat cukup tinggi, dengan rata-rata di atas 99%. Namun, RSUD Pasaman Barat mencatat persentase bayi lahir hidup yang lebih rendah dibandingkan rumah sakit lain, yang bisa menunjukkan adanya tantangan dalam penanganan persalinan atau kondisi bayi di rumah sakit tersebut. Perhatian lebih lanjut dapat diberikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Pasaman Barat, sehingga angka kelahiran hidup dapat semakin optimal di seluruh fasilitas kesehatan di wilayah ini.

Gambar 4.4 Jumlah Kelahiran Bayi (Bayi Lahir Hidup) Pada Rumah Sakit Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



Sumber : Rumah Sakit se- Kabupaten Pasaman Barat

#### 4.4 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4)

K1 adalah cakupan ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal oleh tenaga kesehatan professional (Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan, Dokter Umum, Bidan dan Perawat) di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator akses ini digunakan untuk mengetahui jangkauan pelayanan antenatal serta kemampuan program dalam menggerakkan masyarakat.

K1 adalah kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk mendapatkan pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama ini harus dilakukan sedini mungkin pada trisemester pertama sebaiknya minggu ke 8 dan pada saat kunjungan ini ibu juga diberikan buku KIA sebagai pedoman para ibu dimulai dari kehamilan sampai setelah melahirkan.

K4 adalah kontak ibu hamil sebanyak 4 kali atau lebih dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi, untuk mendapatkan

pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak empat kali ini dilakukan dengan rincian satu kali pada trisemester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trisemester kedua (>12 – 24 minggu), kemudian minimal 2 kali kontak pada trisemester ketiga dilakukan setelah minggu ke 24 sampai umur 36. Kunjungan antenatal ini bisa lebih dari 4 kali sesuai dengan kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan.

Tabel 4.6 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kunjungan	
		K1	K4
1.	Sungai Beremas	505	426
2.	Ranah Batahan	458	362
3.	Koto Balingka	573	448
4.	Sungai Aur	697	486
5.	Lembah Melintang	324	712
6.	Gunung Tuleh	324	183
7.	Talamau	475	236
8.	Pasaman	1.334	1.059
9.	Luhak Nan Duo	680	510
10.	Sasak Ranah Pasisie	265	195
11.	Kinali	1.380	1.096
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>7.015</b>	<b>5.713</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

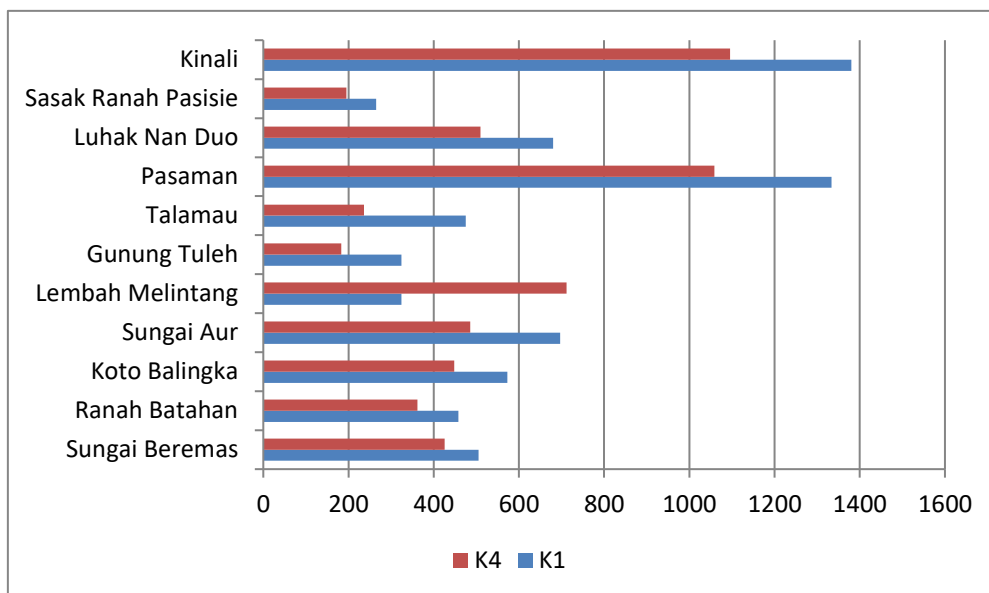
Tabel ini menampilkan jumlah kunjungan ibu hamil (K1 dan K4) ke sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024. K1 adalah kunjungan pertama ibu hamil ke fasilitas kesehatan, sedangkan K4 adalah kunjungan keempat atau lebih, yang mencerminkan pemantauan kehamilan berkelanjutan.

Total kunjungan K1 di seluruh kecamatan adalah 8.265 kunjungan, sementara total kunjungan K4 mencapai 5.713 kunjungan. Kecamatan Kinali mencatat jumlah kunjungan tertinggi untuk K1 dan K4, masing-masing 1.096 dan 1.380 kunjungan, menunjukkan akses layanan kesehatan yang baik dan pemantauan kehamilan yang konsisten. Kecamatan Pasaman juga memiliki angka kunjungan yang signifikan, dengan 1.059 kunjungan K1 dan 1.334 kunjungan K4. Sebaliknya, Sasak Ranah Pasisie mencatat jumlah kunjungan terendah, dengan 195 kunjungan K1 dan 265 kunjungan K4, yang mungkin menunjukkan keterbatasan akses atau partisipasi ibu hamil di wilayah ini.

Ada penurunan antara kunjungan K1 dan K4 di semua kecamatan, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesadaran ibu hamil, akses ke fasilitas, atau kendala logistik. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya upaya pemantauan kehamilan yang cukup baik di beberapa kecamatan, terutama di Kinali dan Pasaman. Namun, terdapat kesenjangan antara kunjungan pertama (K1) dan kunjungan lanjutan (K4) di seluruh kecamatan. Peningkatan edukasi dan akses terhadap fasilitas kesehatan dapat membantu mendorong ibu hamil untuk melakukan kunjungan lebih rutin hingga tahap K4, sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan janin.



Gambar 4.5 Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Pada kunjungan K4 terjadi penurunan jumlah kunjungan ibu hamil menjadi 5.713 orang (81,43 persen). Hal ini dikarenakan banyaknya ibu hamil yang memeriksakan kehamilan K1 pada usia lebih dari 12 minggu. K1 idealnya dilakukan pada usia kehamilan kurang dari 12 minggu.

Jika K1 dilakukan pada usia lebih dari 12 minggu, maka secara otomatis K4 nya tidak tercapai karena seorang ibu hamil dikatakan mendapatkan kunjungan K4 selama kehamilan apabila mendapatkan pemeriksaan kehamilan minimal empat kali selama hamil dengan pola 1 kali di trimester I, 1 kali di trimester II, dan 2 kali di trimester III. Jika kontak pertama diberikan pada ibu hamil dengan usia kehamilan lebih dari 12 minggu, maka secara otomatis K4 nya tidak akan tercapai atau *lost*.

Dengan sering memeriksakan diri ke sarana pelayanan kesehatan selama kehamilan, dapat mendeteksi secara cepat jika ada permasalahan,

ataupun gangguan dengan kehamilan sehingga kesehatan ibu dan calon bayi tetap terjaga.

#### **4.5 Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil**

Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) penting diberikan pada ibu hamil. Manfaatnya adalah untuk mencegah tetanus bagi ibu dan bayinya. Tetanus adalah penyakit yang mengancam jiwa yang disebabkan oleh toksin dari bakteri yang disebut *Clostridium Tetani*. Bakteri ini masuk kedalam tubuh melalui luka terbuka. Bisa berupa luka akibat tusukan kecil atau goresan pada kulit.

Pemberian imunisasi TT pada ibu hamil memiliki tujuan mencegah tetanus pada proses persalinan, dimana terdapat luka baik pada rahim maupun pada tali pusat bayi. Hal ini terutama mencegah tetanus pada persalinan beresiko tinggi yaitu apabila persalinan dilakukan dengan alat-alat yang tidak steril. Antibodi akan terbentuk dalam tubuh setelah vaksinasi atau imunisasi TT diberikan, antibodi ini akan diteruskan kepada bayi dan melindunginya selama beberapa bulan setelah lahir. Sebelum adanya imunisasi TT banyak ditemui kasus tetanus neonatorum yaitu tetanus yang terjadi pada bayi baru lahir sebelum berusia 1 bulan.

Berikut ini adalah informasi durasi proteksi imunisasi TT pada ibu hamil menurut WHO (*World Health Organization*) ;

1. TT1 diberikan pada kontak pertama
2. TT2 diberikan pada 4 minggu setelah TT1 dengan tingkat proteksi 8 persen dan durasi proteksi 3 tahun
3. TT3 diberikan minimum 6 bulan setelah TT2 dengan tingkat proteksi 95 persen dan durasi proteksi 5 tahun
4. TT4 diberikan minimum 1 tahun setelah TT3 dengan tingkat proteksi 99 persen dan durasi proteksi 10 tahun

5. TT5 diberikan minimum 1 tahun setelah TT4 dengan tingkat proteksi 99 persen dan durasi proteksi 30 tahun

**Tabel 4.7** Jumlah Imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) Pada Ibu Hamil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) Pada Ibu Hamil
1.	Sungai Beremas	307
2.	Ranah Batahan	203
3.	Koto Balingka	322
4.	Sungai Aur	251
5.	Lembah Melintang	500
6.	Gunung Tuleh	274
7.	Talamau	538
8.	Pasaman	1.026
9.	Luhak Nan Duo	364
10.	Sasak Ranah Pasisie	124
11.	Kinali	1.879
<b>Pasaman Barat</b>		<b>4.788</b>

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat*

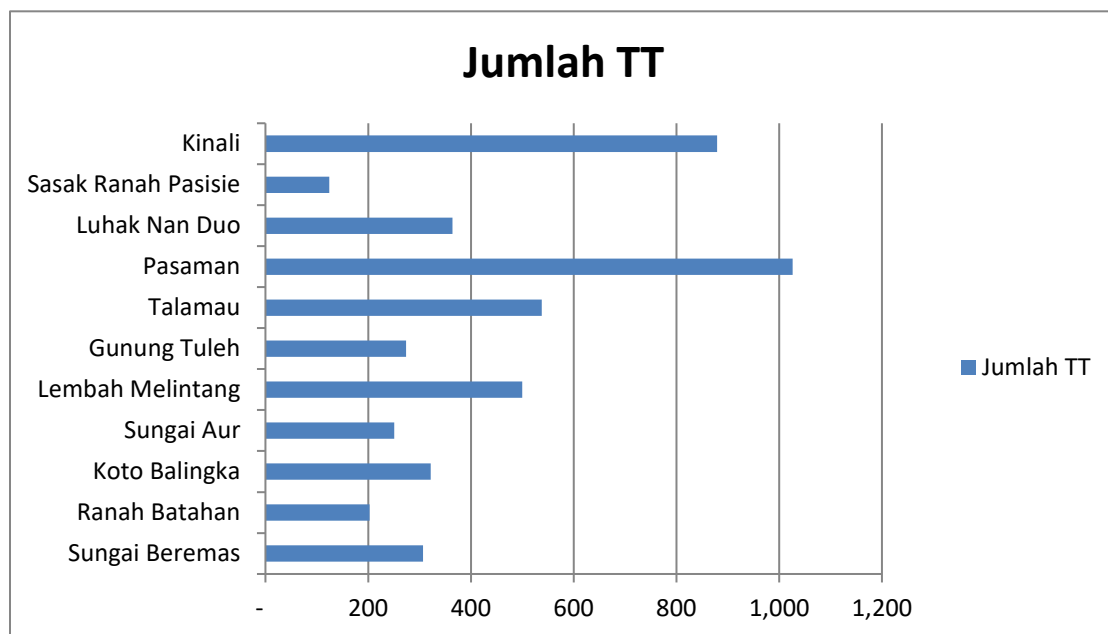
Tabel ini menampilkan jumlah imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dengan total 4.788 pemberian imunisasi di seluruh kecamatan. Imunisasi TT penting untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi yang baru lahir.

Kecamatan Pasaman mencatat angka imunisasi tertinggi, yaitu 1.026 kali, menunjukkan cakupan layanan kesehatan yang baik di wilayah ini. Kecamatan Kinali juga memiliki angka yang signifikan dengan 879 kali imunisasi. Sebaliknya, Sasak Ranah Pasisie mencatat angka terendah, yaitu 124 kali, yang mungkin menandakan keterbatasan akses atau

partisipasi ibu hamil dalam program imunisasi di wilayah ini. Kecamatan lainnya, seperti Koto Balingka (322), Lembah Melintang (500), dan Luhak Nan Duo (364), memiliki cakupan imunisasi yang cukup baik.

Secara umum, data ini menunjukkan adanya variasi cakupan imunisasi TT antar kecamatan, dengan beberapa kecamatan memiliki cakupan tinggi sementara lainnya masih rendah. Kesenjangan ini mungkin dipengaruhi oleh faktor akses ke layanan kesehatan, kesadaran ibu hamil tentang pentingnya imunisasi, dan program kesehatan di masing-masing kecamatan. Upaya peningkatan edukasi dan akses layanan kesehatan, khususnya di kecamatan dengan cakupan rendah seperti Sasak Ranah Pasisie, dapat membantu meningkatkan jumlah imunisasi dan mencegah risiko tetanus bagi ibu dan bayi baru lahir.

Gambar 4.6 Jumlah Imunisasi Tetanus Toxoid Pada Ibu Hamil Kab. Pasaman Barat Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

#### **4.6 Pemberian Tablet Zat Besi (Fe) pada Ibu Hamil**

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator keberhasilan layanan kesehatan suatu daerah. Kematian ibu dapat terjadi karena beberapa sebab, diantaranya karena anemia. Tablet Zat Besi (Fe) adalah suatu tablet vitamin dan mineral yang sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kecacatan pada perkembangan bayi baru lahir dan kematian ibu yang disebabkan oleh anemia berat. Tablet ini sangat diperlukan oleh ibu hamil.

Manfaat Tablet Fe pada ibu hamil, diantaranya yaitu mencegah terjadinya anemi defisiensi besi, mencegah terjadinya pendarahan pada saat persalinan, dapat meningkatkan asupan nutrisi bagi janin, serta anemi dan pendarahan dapat dicegah sehingga kematian ibu pun dapat diturunkan.

Tablet Fe diberikan kepada ibu hamil sebanyak satu tablet setiap hari berturut-turut minimal selama 90 hari selama masa kehamilan. Sudah selayaknya seorang ibu hamil akan mendapatkan minimal 60 sampai 90 tablet Fe selama kehamilannya dan diberikan secara gratis. Tablet Fe mengandung 200 mg ferro sulfat setara dengan 60 miligram besi elemental dan 0,25 mg asam folat.

Tabel 4.8 Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) Menurut Kecamatan Tahun 2024

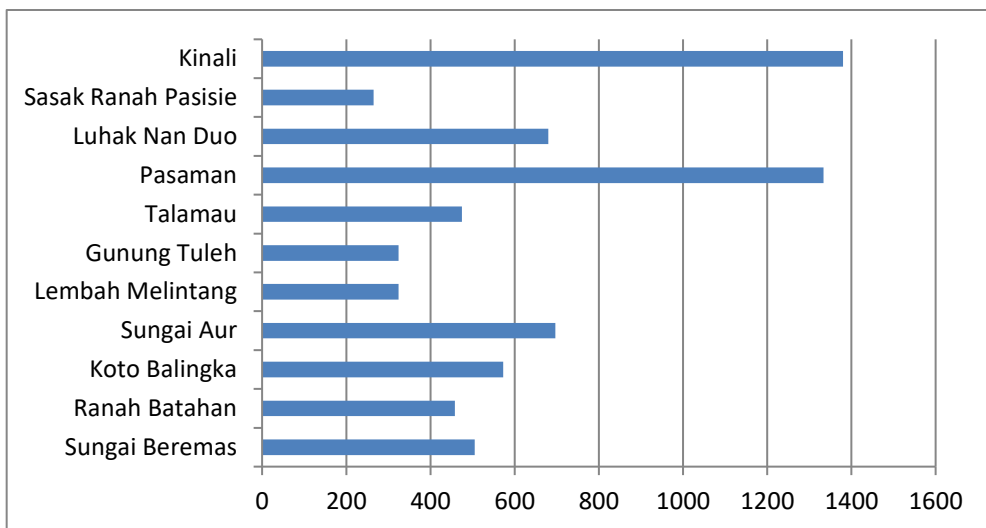
No	Kecamatan	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
1	Sungai Beremas	505
2	Ranah Batahan	458
3	Koto Balingka	573
4	Sungai Aur	697
5	Lembah Melintang	324
6	Gunung Tuleh	324
7	Talamau	475
8	Pasaman	1.334
9	Luhak Nan Duo	680
10	Sasak Ranah Pasisie	265
11	Kinali	1,380
	Jumlah	7.015

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat*

Tabel ini menunjukkan jumlah ibu hamil yang menerima tablet zat besi (Fe) di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dengan total 7.015 penerima. Kecamatan Kinali mencatat jumlah tertinggi dengan 1.380 penerima, diikuti oleh Pasaman sebanyak 1.334 penerima dan Sungai Aur dengan 697 penerima, mencerminkan akses yang baik terhadap suplemen penting ini di wilayah tersebut. Di sisi lain, Lembah Melintang, Gunung Tuleh dan Sasak Ranah Pasisie mencatat jumlah penerima yang lebih rendah, masing-masing 324 orang, 315 orang dan 186 orang, menunjukkan perlunya peningkatan distribusi atau partisipasi di wilayah ini.

Suplemen zat besi sangat penting untuk mencegah anemia selama kehamilan, sehingga distribusi yang merata perlu ditingkatkan di kecamatan dengan angka rendah untuk memastikan kesehatan ibu dan janin tetap optimal.

Gambar 4.7 Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) Menurut Kecamatan Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

#### 4.7 Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB)

Keluarga Berencana (KB) merupakan sektor pembangunan nasional yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ibu, anak dan keluarga pada umumnya serta menurunkan laju pertumbuhan penduduk melalui pembatasan kelahiran. Usia antara 15-49 tahun merupakan usai pasangan subur bagi perempuan karena pada usia ini kemungkinan untuk melahirkan anak sangat besar. Perempuan yang usianya berada pada usia ini disebut Wanita Usia Subur (WUS) dan Pasangan Usia Subur (PUS) bagi yang berstatus kawin.

Semakin banyak jumlah PUS, maka semakin banyak pula jumlah anak yang dilahirkan. Semakin banyak jumlah anak maka semakin besar tanggungan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumah tangga. Dengan demikian, pembatasan jumlah anak sangat perlu diperhatikan demi tercapainya keluarga sejahtera.

Penggunaan alat kontrasepsi adalah salah satu cara untuk menekan angka kelahiran. Pada masyarakat awam, alat kontrasepsi dikenal hanya sebagai alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan, namun sebenarnya banyak sekali manfaat dari alat kontrasepsi. Contohnya sebagai kebutuhan fisik, kontrasepsi memiliki peranan dalam setiap fase reproduksi, yaitu untuk menunda kehamilan dan menjarangkan kehamilan.

Tabel 4.9 Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	Peserta KB Perempuan						Peserta KB laki-laki			Total
		MOW	IUD	Implant	Suntik	Pil	Jml	MOP	Kondom	Jml	
1	Sungai Beremas	32	44	279	1.604	511	2.470	0	329	329	2.799
2	Ranah Batahan	30	9	538	1.588	245	2.410	6	101	107	2.517
3	Koto Balingka	33	29	145	2.419	268	2.894	4	96	100	2.994
4	Sungai Aur	32	44	279	1.604	511	2.470	0	329	329	2.799
5	Lembah Melintang	109	182	198	2.028	231	2.748	7	106	113	2.861
6	Gunung Tuleh	122	129	291	1.274	194	2.010	2	105	107	2.117
7	Talamau	105	22	472	1.772	373	2.744	8	135	143	2.887
8	Pasaman	224	120	1.040	4.066	500	5.950	8	210	218	6.168
9	Luhak Nan Duo	184	181	875	1.971	425	3.636	13	135	148	3.784
10	Sasak Ranah Pasisie	122	50	476	2.415	216	3.279	1	201	202	3.481
11	Kinali	161	168	1.179	4.153	697	6.358	7	128	135	6.493
<b>Jumlah</b>		<b>1.154</b>	<b>978</b>	<b>5.772</b>	<b>2.4894</b>	<b>4.171</b>	<b>36.969</b>	<b>56</b>	<b>1.875</b>	<b>1 931</b>	<b>38.900</b>

Sumber : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat (Bidang KBKR)

Ket : MOW : Metode Operasi Wanita,  
MOP : Metode Operasi Pria



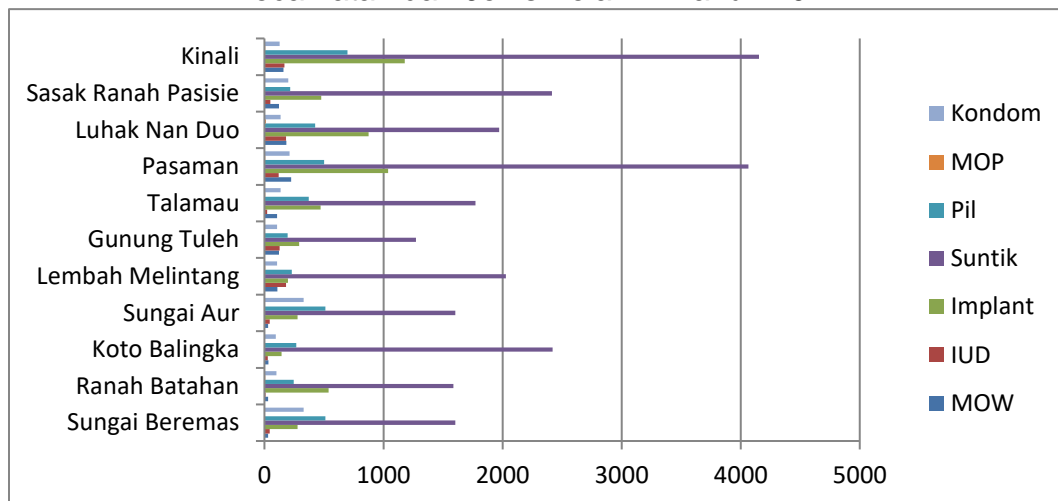
Tabel ini menunjukkan jumlah peserta/akseptor Keluarga Berencana (KB) menurut kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dengan total 38.900 peserta KB. Dari jumlah tersebut, 36.969 peserta adalah perempuan, dan 1.931 peserta adalah laki-laki. Metode KB yang paling banyak digunakan oleh perempuan adalah suntik dengan 24.894 peserta, diikuti oleh implan sebanyak 5.772 peserta. Untuk laki-laki, metode yang digunakan yang terbanyak adalah kondom sebanyak 1.875, dan MOP sebanyak 56 dari 1.931 peserta.

Kecamatan Kinali mencatat jumlah peserta KB tertinggi dengan 6.493 peserta, diikuti oleh Pasaman sebanyak 6.168 peserta, dan Luhak Nan Duo dengan 3.784 peserta. Sebaliknya, Gunung Tuleh memiliki jumlah peserta terendah dengan 2.117 peserta.

Partisipasi laki-laki dalam program KB masih jauh lebih rendah dibandingkan perempuan, dengan seluruh partisipasi laki-laki menggunakan metode kondom, dan tidak ada yang tercatat menggunakan metode operasi pria (MOP). Ini menunjukkan bahwa KB masih didominasi oleh perempuan, terutama melalui metode suntik dan pil, yang menjadi pilihan utama.

Secara keseluruhan, meskipun partisipasi KB cukup tinggi, ada kesenjangan gender yang signifikan dalam penggunaan metode KB, dengan sangat sedikit keterlibatan laki-laki. Untuk meningkatkan efektivitas program KB, diperlukan edukasi dan promosi lebih lanjut tentang pentingnya partisipasi laki-laki, serta perluasan akses ke metode MOP dan alternatif lain yang dapat melibatkan kedua belah pihak.

Gambar 4.8 Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (KB) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat

#### 4.8 Pemberian Imunisasi pada Balita

Imunisasi adalah program pencegahan penyakit menular yang diterapkan dengan memberikan vaksin sehingga orang tersebut imun atau resisten terhadap penyakit tersebut. Program imunisasi dimulai sejak usia bayi hingga masuk usia sekolah. Melalui program ini, anak akan diberikan vaksin yang berisi jenis bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dinonaktifkan guna merangsang sistem imun dan membentuk antibodi di dalam tubuh mereka. Antibodi yang terbentuk setelah imunisasi bermanfaat untuk melindungi tubuh dari serangan bakteri dan virus tersebut di masa yang akan datang.

Metode pemberian vaksin dalam imunisasi beragam, ada yang dengan cara disuntikkan, dimasukkan (ditetesi) ke dalam mulut, atau bahkan disemprotkan ke dalam mulut atau hidung. Sejumlah vaksin ada yang hanya diberikan sekali seumur hidup dan ada juga yang perlu diberikan secara berkala agar kekebalan tubuh terbentuk

dengan sempurna. Jenis-jenis vaksin yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dalam program imunisasi, di antaranya; Hepatitis B, Polio, BCG, DTP, Campak, Hib, PCV, Rotavirus, Influenza, MMR, Tifoid, Hepatitis A, Varisela, HPV. Di Indonesia vaksin hepatitis B, polio, BCG, DTP dan campak merupakan imunisasi wajib. Sedangkan sisanya merupakan vaksinasi yang direkomendasikan.

Berikut adalah urutan imunisasi dasar lengkap dari Kemenkes dan IDAI yang dapat diikuti oleh masyarakat Indonesia.

### 1. Usia 0–6 Bulan

Jadwal imunisasi dasar lengkap pada anak usia 0–6 bulan adalah sebagai berikut:

- **Hepatitis B:** Diberikan empat kali, yaitu 24 jam setelah bayi lahir, kemudian di usia 2, 3, dan 4 bulan. Vaksin *booster* akan diberikan ketika bayi berusia 18 bulan.
- **DPT:** Diberikan sebanyak tiga kali, yaitu di usia 2, 3, dan 4 bulan. Vaksin *booster* akan diberikan dua kali pada usia 18 bulan dan 5–7 tahun.
- **BCG:** Hanya diberikan satu kali pada usia 0–1 bulan.
- **Hib:** Diberikan sebanyak tiga kali pada usia 2, 3, dan 4 bulan. Vaksin *booster* akan diberikan satu kali saat usia 18 bulan.
- **Polio: Vaksin polio** oral diberikan ketika bayi lahir sampai berusia 1 bulan. Sementara itu, vaksin polio suntik setidaknya perlu diberikan 2 kali sebelum anak berusia 1 tahun. Kemudian, pemberian vaksin polio oral maupun suntikan juga akan dilakukan secara berulang setiap bulan, yaitu usia 2, 3, dan 4 bulan.
- **PCV (pneumokokus):** Pemberian vaksin PCV dilakukan sebanyak tiga kali pada usia 2, 4, dan 6 bulan. Vaksin *booster* akan diberikan saat usia 12–15 bulan.

- **Rotavirus:** Rotavirus jenis monovalen akan diberikan sebanyak dua kali. Dosis pertama pada usia 6 minggu dan dosis kedua diberikan 4 minggu setelahnya, atau maksimal usia bayi 24 minggu. Sementara itu, Rotavirus jenis pentavalen akan diberikan sebanyak tiga kali, yaitu pada usia 6–12 minggu, kemudian dosis kedua dan ketiganya diberikan 4–10 minggu setelahnya. Imunisasi ini harus selesai saat anak berusia 32 minggu.

## 2. Usia 6–12 Bulan

Kemudian, ketika anak sudah mencapai usia 6–12 bulan, beberapa imunisasi yang wajib diberikan adalah:

- **Influenza:** Imunisasi ini akan diberikan kepada anak saat berusia 6 bulan, dilanjutkan dengan pemberian setahun sekali ketika memasuki usia 18 bulan hingga 18 tahun.
- **Japanese Encephalitis (JE):** JE diberikan satu kali ketika anak berusia 9 bulan, dilanjutkan dengan *booster* saat anak berusia 2–3 tahun.
- **MMR:** Vaksinasi ini diberikan ketika anak memasuki usia 9 bulan, lalu dilanjutkan *booster* saat usia 18 bulan atau ketika memasuki usia 5–7 tahun.

## 3. Usia 12–24 Bulan

Ketika memasuki usia satu tahun, sejumlah imunisasi yang tak kalah penting dan perlu diberikan kepada anak di antaranya:

- **Hepatitis A:** Diberikan sebanyak dua kali dimulai pada usia 12 bulan dan dilanjutkan dengan interval 6–12 bulan setelah dosis pertama.
- **Varisela:** Pemberian varisela dilakukan dua kali ketika anak berusia 12–18 bulan dengan jarak untuk dosis keduanya adalah 6 minggu sampai 3 bulan.

#### 4. Usia 2–18 Tahun

Sementara itu, jadwal imunisasi untuk anak usia 2–18 tahun adalah sebagai berikut:

- **Tifoid:** Diberikan sekali pada usia 2 tahun, lalu diberikan ulang setiap 3 tahun sekali sejak usia 5–18 tahun.
- **Dengue:** Diberikan sebanyak tiga kali dalam rentang usia 9–16 tahun, dengan masing-masing dosisnya berjarak 6 bulan.
- **HPV:** Diberikan kepada anak perempuan dua kali dalam rentang usia 9–14 tahun dengan arak 6–15 bulan setiap dosisnya.

Tabel 4.10 Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Bayi	Jenis Imunisasi (Jumlah Bayi/ Persentase)				
			BCG	dpt1 +hb1	dpt3 +hb3	Polio	Campak
1	Sungai Beremas	545	406	278	166	210	272
2	Ranah Batahan	573	409	351	338	369	392
3.	Koto Balingka	637	488	436	457	495	439
4.	Sungai Aur	762	487	337	274	313	321
5.	Lembah Melintang	1.024	563	465	368	404	381
6.	Gunung Tuleh	557	343	278	232	265	245
7.	Talamau	627	357	313	285	341	341
8.	Pasaman	1.546	1.000	828	755	832	797
9.	Luhak Nan Duo	911	519	424	354	329	440
10.	Sasak Ranah Pasisie	323	190	120	54	60	77
11.	Kinali	1.531	922	721	452	565	602
<b>Jumlah</b>		<b>9.036</b>	<b>5.684</b>	<b>4.551</b>	<b>3.735</b>	<b>4.183</b>	<b>4.307</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

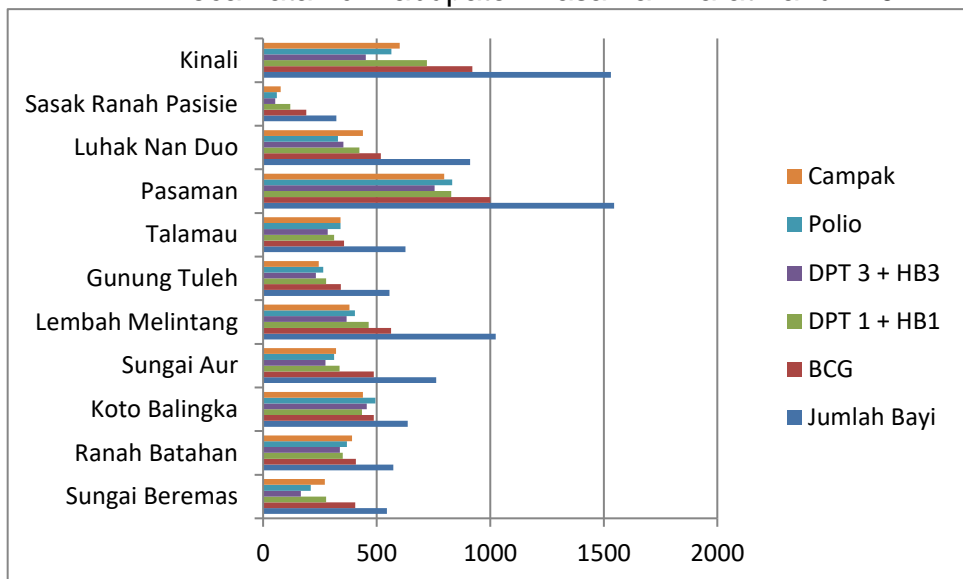
Tabel ini menunjukkan jumlah balita yang pernah mendapatkan imunisasi berdasarkan jenis imunisasi dan kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024. Total terdapat 9.036 balita yang tercatat, dengan cakupan imunisasi yang bervariasi menurut jenis dan kecamatan.

Imunisasi BCG diberikan kepada 5.684 balita, menjadikannya salah satu imunisasi dengan cakupan tertinggi. Imunisasi DPT1+HB1 diberikan kepada 4.551 balita, sedangkan DPT3+HB3 mencakup 3.735 balita, yang menjadi imunisasi dengan cakupan terendah dibandingkan jenis lainnya. menunjukkan adanya sedikit penurunan pada dosis lanjutan. Imunisasi Polio mencakup 4.183 balita,. Campak telah diberikan kepada 4.307 balita.

Kecamatan Pasaman mencatat jumlah balita tertinggi dengan 1.546 anak, diikuti oleh Kinali dengan 1.531 balita, dan Sembah Melintang dengan 1.024 balita. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah balita paling sedikit adalah Sasak Ranah Pasisie dengan 323 balita.

Secara umum, meskipun cakupan imunisasi cukup tinggi, terlihat adanya penurunan pada dosis lanjutan (misalnya antara DPT1+HB1 dan DPT3+HB3), yang bisa mengindikasikan tantangan dalam memastikan balita mendapatkan semua dosis imunisasi secara lengkap. Imunisasi campak memiliki cakupan paling rendah, sehingga perlu perhatian lebih dalam meningkatkan distribusi dan partisipasi pada jenis imunisasi ini. Pemerataan layanan imunisasi juga perlu diperkuat, terutama di kecamatan dengan jumlah balita rendah seperti Sasak Ranah Pasisie.

**Gambar 4.9** Jumlah Balita Yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat*

#### 4.9 Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrien, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk. Karena itulah penting untuk menjalankan diet gizi seimbang untuk menjaga kadar nutrien yang cukup di dalam tubuh.

Berikut ini adalah beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab balita gizi buruk:

1. Kurang makan: Kurangnya asupan makanan bisa memicu kekurangan nutrien yang penting hingga berujung pada gizi buruk.
2. Makan tidak teratur: Makan secara tidak teratur bisa memicu masalah

pencernaan dan malnutrisi.

3. Gangguan pencernaan: Beberapa anak mungkin mengalami gangguan pencernaan, seperti penyakit Crohn's, yang membatasi kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi meski mengonsumsi makanan sehat.
4. Kurang ASI: Air susu ibu bagi anak yang baru lahir sangat penting karena mengandung nutrisi penting. Kurangnya ASI berisiko menyebabkan bayi gizi buruk.
5. Kurang aktivitas: Pencernaan tidak akan berjalan lancar jika anak kurang beraktivitas hingga memicu malnutrisi.
6. Fasilitas layanan dasar buruk: Sejumlah layanan dasar, misalnya sanitasi, yang buruk juga bisa memicu masalah gizi.

Balita gizi kurang adalah kekurangan energi dan protein tingkat berat akibat kurang mengonsumsi makanan yang bergizi dan menderita sakit yang begitu lama. Keadaan ini dengan status gizi sangat kurus (BB/TB) dan atau hasil pemeriksaan klinis menunjukkan gejala marasmus, kwashiorkor atau marasmik kwashiorkor. Data dari WHO menunjukkan bahwa dari 7.6 juta kematian balita setiap tahunnya, 35% disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan nutrisi. Malnutrisi ditemukan berhubungan kuat dengan angka kematian bayi dan balita akibat diare dan infeksi saluran pernapasan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan balita gizi kurang, diantaranya ; Penyakit infeksi seperti demam dan diare, pola asuh dimana yang mengasuh bukan ibu kandung, pemberian makan pada anak yang kurang tepat seperti MPASI yang terlalu cepat atau terlalu lambat, sanitasi lingkungan yang buruk, serta ekonomi keluarga yang belum memadai. Untuk mencegah masalah gizi ini, para orang tua diharapkan menerapkan pola makan diet seimbang pada anak dan memastikan layanan dasar mereka tercukupi.



Tabel 4.11 Jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang	
		Balita Gizi Buruk	Balita Gizi Kurang
1.	Sungai Beremas	5	104
2.	Ranah Batahan	16	98
3.	Koto Balingka	6	70
4.	Sungai Aur	39	164
5.	Lembah Melintang	5	58
6.	Gunung Tuleh	8	55
7.	Talamau	25	128
8.	Pasaman	154	366
9.	Luhak Nan Duo	42	192
10.	Sasak Ranah Pasisie	22	112
11.	Kinali	40	240
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>72</b>	<b>1.587</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

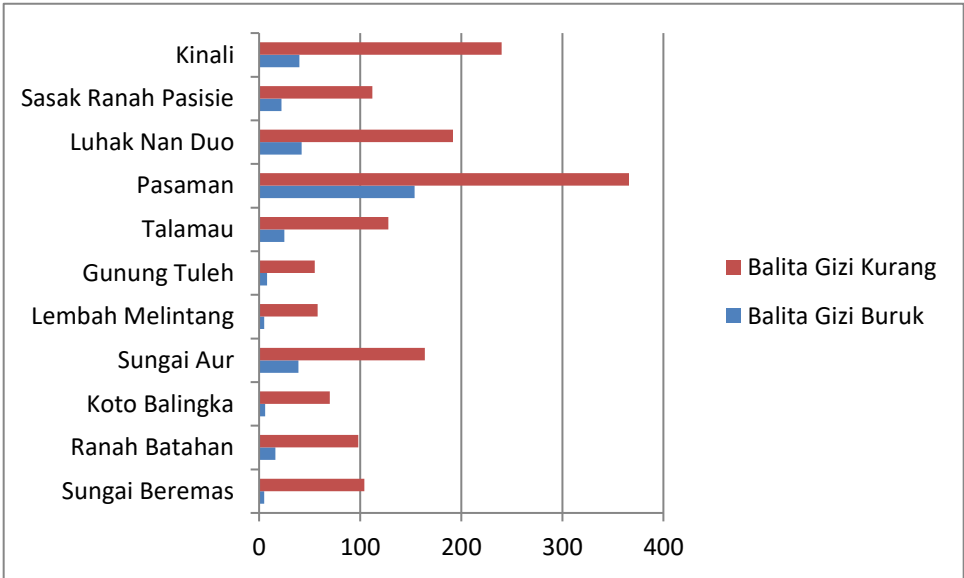
Tabel ini menunjukkan jumlah balita dengan status gizi buruk dan gizi kurang di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dengan total 72 balita mengalami gizi buruk dan 1.587 balita mengalami gizi kurang.

Kecamatan Pasaman mencatat jumlah balita dengan gizi buruk tertinggi (154 balita), diikuti Luhak Nan Duo dengan 42 balita dan Kinali dengan 40 balita. Untuk kategori gizi kurang, Kecamatan Pasaman mencatat angka tertinggi dengan 366 balita, jauh melebihi kecamatan lainnya. Kinali menempati urutan kedua dengan 240 balita, dan Luhak Nan Duo posisi ketiga dengan 192 balita.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa masalah gizi kurang lebih banyak terjadi dibandingkan dengan gizi buruk, namun kedua

masalah ini tetap menjadi perhatian serius bagi kesehatan balita di wilayah ini. Kecamatan seperti Kinali, Pasaman, dan Gunung Tuleh memerlukan perhatian khusus karena mencatat angka yang cukup tinggi untuk kedua kategori. Intervensi gizi, seperti distribusi makanan bergizi, edukasi kepada orang tua, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan, sangat penting untuk menekan angka gizi buruk dan gizi kurang. Selain itu, pemantauan lebih lanjut di wilayah dengan angka tinggi diperlukan agar masalah gizi dapat ditangani secara efektif.

**Gambar 4.10** Jumlah Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat*

#### **4.10 Kematian Pada Bayi**

Kematian pada bayi disebut juga dengan kematian neonatal. Kematian neonatal merupakan kematian pada periode saat bayi lahir hidup hingga bayi berumur 28 hari (WHO, 2006). Kematian neonatal tersebut dibagi ke dalam dua fase, yakni kematian early neonatal dan kematian late neonatal. Kematian neonatal tersebut, banyak terjadi pada bayi dengan berat lahir rendah (BBLR). Semakin rendah berat lahir bayi, semakin besar probabilitas kematian neonatalnya. Seiring dengan hal tersebut, risiko kematiannya juga lebih tinggi.

Selain berat lahir, kematian neonatal juga dipengaruhi oleh faktor bayi seperti jenis kelamin. Beberapa studi menyatakan bahwa laki-laki memiliki risiko lebih tinggi untuk meninggal pada masa neonatal dibandingkan dengan bayi perempuan. Dari segi maternal, BBLR yang memiliki ibu dengan paritas dua atau lebih mempunyai risiko besar untuk mengalami kematian neonatal. Kematian BBLR saat neonatal juga dipengaruhi oleh faktor pelayanan kesehatan. Sebuah penelitian menyatakan kelahiran di luar rumah sakit memiliki risiko untuk mengalami kematian neonatal.

Angka Kematian Neonatal (AKN) adalah jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal dalam periode 28 hari pertama kehidupan dan dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 4.12 Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	0-28 hari	29 hari- 1 tahun
1.	Sungai Beremas	3	0
2.	Ranah Batahan	6	0
3.	Koto Balingka	8	1
4.	Sungai Aur	7	2
5.	Lembah Melintang	3	2
6.	Gunung Tuleh	5	0
7.	Talamau	11	1
8.	Pasaman	11	2
9.	Luhak Nan Duo	6	2
10.	Sasak Ranah Pasisie	2	0
11.	Kinali	16	1
<b>Pasaman Barat</b>		<b>78</b>	<b>11</b>

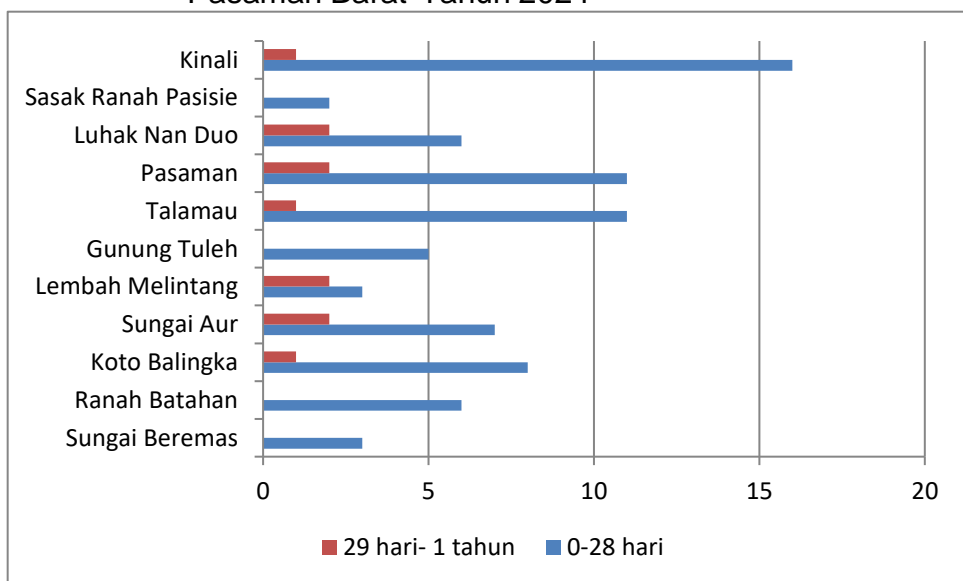
*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat*

Tabel ini menunjukkan jumlah kematian bayi berdasarkan usia (0-28 hari dan 29 hari-1 tahun) di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dengan total 78 kematian bayi pada usia 0-28 hari dan 11 kematian bayi pada usia 29 hari-1 tahun.

Kecamatan Kinali mencatat jumlah kematian bayi tertinggi pada kategori usia 0-28 hari dengan 16 kasus, diikuti oleh Kecamatan Talamau dan Pasaman dengan masing-masing 11 kasus. Pada kategori usia 29 hari-1 tahun, Kecamatan, Koto Sungai Aur, Lembah Melintang, Pasaman, dan Luhak Nan Duo memiliki angka tertinggi dengan masing-masing 2 kematian. Beberapa kecamatan, seperti Sungai Beremas, Ranah Batahan, Gunung Tuleh, dan Sasak Ranah Pasisie, tidak mencatat kematian bayi dalam kategori 29 hari-1 tahun.

Dari data ini, terlihat bahwa mayoritas kematian bayi terjadi pada usia 0-28 hari, yang biasanya disebabkan oleh faktor seperti komplikasi saat lahir, masalah pernapasan, atau infeksi neonatal. Intervensi kesehatan, seperti peningkatan akses ke layanan kesehatan ibu dan bayi, serta perawatan intensif neonatal, sangat penting untuk menekan angka kematian bayi pada usia kritis ini. Wilayah seperti Kinali dan Pasaman memerlukan perhatian lebih, mengingat tingginya angka kematian bayi, terutama pada periode neonatal (0-28 hari).

Gambar 4.11 Jumlah Kematian Bayi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

#### 4.11 Kematian Pada Balita (AKBa)

Kematian Pada Balita (AKBa) adalah Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) pada tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun yang sama (termasuk kematian bayi). Nilai normatif AKBa adalah sebagai berikut:  $\geq 140$  = sangat tinggi.

Indikator ini terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. AKBa kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Tabel 4.13 Jumlah Kematian Balita (AKBa Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Balita
1.	Sungai Beremas	0
2.	Ranah Batahan	0
3.	Koto Balingka	2
4.	Sungai Aur	0
5.	Lembah Melintang	0
6.	Gunung Tuleh	2
7.	Talamau	0
8.	Pasaman	2
9.	Luhak Nan Duo	3
10.	Sasak Ranah Pasisie	0
11.	Kinali	1
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>10</b>

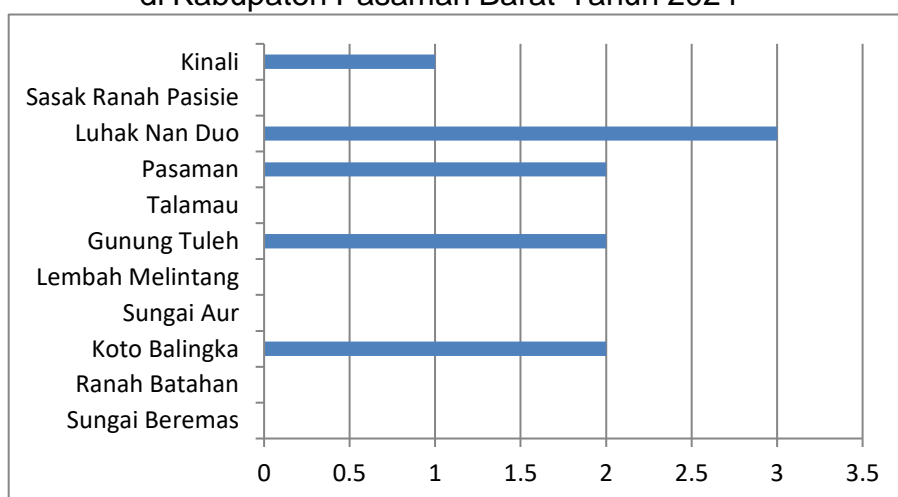
*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat*

Tabel ini menunjukkan jumlah kematian balita (AKBa) di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dengan total 10 kasus. Kecamatan Luhak Nan Duo mencatat angka kematian balita tertinggi dengan 5 kasus, diikuti

oleh Koto Balingka, Gunung Tuleh, dan Pasaman, masing-masing 2 kasus. Beberapa kecamatan seperti Sungai Beremas, Ranah Batahan, Sungai Aur, Lembah Melintang, Talamau, dan Sasak Ranah Pasisie tidak mencatat kematian balita sama sekali, menunjukkan potensi penanganan kesehatan anak yang lebih baik atau jumlah kelahiran yang lebih rendah di wilayah-wilayah tersebut. Kecamatan Kinali dan Koto Balingka masing-masing mencatat 1 kasus, sementara Lembah Melintang melaporkan 3 kasus.

Secara keseluruhan, meskipun angka kematian balita di Pasaman Barat tidak terlalu tinggi, perhatian khusus perlu diberikan kepada Kecamatan Pasaman, yang mencatat jumlah tertinggi. Hal ini mungkin mengindikasikan perlunya peningkatan layanan kesehatan, akses nutrisi, dan pemantauan kesehatan anak di wilayah tersebut. Meskipun beberapa kecamatan tidak mencatat kasus kematian, tetap diperlukan pemantauan dan upaya pencegahan berkelanjutan di seluruh wilayah untuk menjaga angka kematian balita tetap rendah.

**Gambar 4.12** Jumlah Kematian Balita (AKABa) Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat*

#### 4.12 Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Berat badan lahir rendah adalah kondisi bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gram atau 2,5 kg. Kondisi ini kerap dialami oleh bayi kembar atau bayi yang lahir secara prematur (sebelum usia kehamilan 37 minggu). Salah satu penyebab utama BBLR adalah kelahiran prematur. Jika dibandingkan dengan bayi yang cukup bulan, bayi prematur memiliki waktu lebih singkat untuk tumbuh dan berkembang di rahim ibu.

Selain kelahiran prematur, kondisi BBLR juga bisa disebabkan oleh kondisi ibu ketika hamil, di antaranya sebagai berikut.

- Menderita infeksi selama kehamilan.
- Pernah melahirkan bayi dengan kondisi serupa pada kehamilan sebelumnya.
- Mengandung bayi kembar sehingga ruang di dalam rahim tidak optimal untuk tumbuh kembang bayi.
- Mengalami komplikasi kehamilan, terlebih yang berpengaruh terhadap plasenta.
- Mengalami malnutrisi.
- Mengonsumsi NAPZA atau minuman beralkohol.
- Menderita masalah kesehatan mental, seperti gangguan cemas atau depresi.
- Merokok ketika hamil atau berada di lingkungan yang banyak asap rokok.

Selain itu, berat badan lahir rendah juga sering kali terjadi akibat *intrauterine growth restriction* (IUGR), yaitu kondisi ketika bayi tidak tumbuh dengan baik saat berada di dalam kandungan. Masalah ini dapat dipicu oleh gangguan pada plasenta, kondisi kesehatan ibu, atau kondisi kesehatan bayi.



Tabel 4.14 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Bayi lahir	BBLR 2024		Persentase (BBLR)
			Jumlah	Dirujuk	
1.	Sungai Beremas	488	16	1	3,28
2.	Ranah Batahan	418	16	7	3,83
3.	Koto Balingka	522	22	2	4,21
4.	Sungai Aur	552	29	9	5,25
5.	Lembah Melintang	794	21	7	2,64
6.	Gunung Tuleh	350	34	1	6,71
7.	Talamau	431	40	10	9,28
8.	Pasaman	1.224	66	31	5,39
9.	Luhak Nan Duo	672	49	3	7,29
10.	Sasak Ranah Pasisie	235	22	0	0,36
11.	Kinali	1.280	63	8	4,92
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>6.966</b>	<b>378</b>	<b>79</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

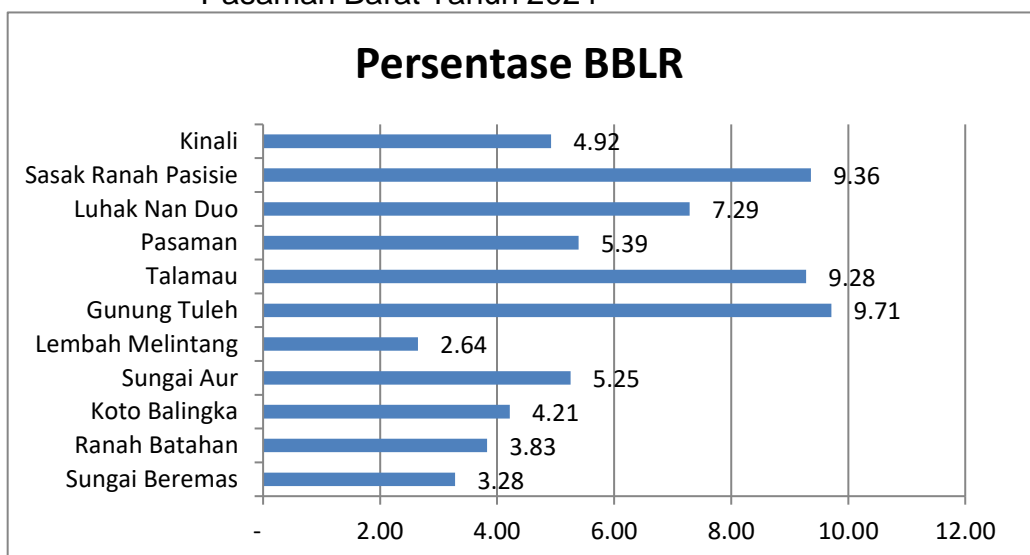
Tabel ini menunjukkan jumlah bayi lahir, bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), BBLR yang dirujuk, dan persentase gizi buruk di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024. Total terdapat 6.966 bayi lahir, dengan 378 kasus BBLR dan 79 di antaranya dirujuk untuk penanganan lebih lanjut. Secara keseluruhan, 5,42% dari bayi yang lahir mengalami BBLR.

Kecamatan Klnali mencatat jumlah bayi lahir tertinggi dengan 1.280 bayi dan dengan 63 bayi dirujuk (12,69%). Kecamatan Pasaman melaporkan 66 kasus BBLR, dengan 31 di antaranya dirujuk (46,7%). Kecamatan Gunung Tuleh memiliki persentase BBLR tertinggi, yaitu 9,71%, dengan 34 bayi BBLR dan 1 diantaranya dirujuk.

Sasak Ranah Pasisie mencatat angka BBLR sebesar 9,36%, meskipun total bayi lahirnya relatif kecil (235 bayi). Kecamatan seperti Lembah Melintang memiliki kasus BBLR dengan persentase sekitar 2,6%.

Dari data ini, terlihat bahwa beberapa kecamatan memiliki angka BBLR dan rujukan yang signifikan, terutama di Pasaman, Kinali, dan Sungai Aur, menandakan perlunya pemantauan ketat terhadap kesehatan ibu dan bayi. Intervensi dini seperti pemantauan gizi ibu hamil, peningkatan layanan kesehatan neonatal, dan rujukan cepat bagi bayi BBLR dapat membantu menurunkan angka gizi buruk dan memastikan bayi mendapatkan perawatan yang tepat. Persentase BBLR yang tinggi di beberapa wilayah, seperti Sasak Ranah Pasisie, menunjukkan perlunya peningkatan layanan kesehatan di wilayah tersebut.

Gambar 4.13 Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

#### **4.13 ASI Eksklusif**

Sesuai dengan rekomendasi dari badan kesehatan dunia (WHO, World Health Organization), bayi yang belum genap berusia 6 bulan selayaknya HANYA mendapatkan ASI secara eksklusif, tanpa tambahan makanan atau minuman apapun. Namun, pada penerapannya, seringkali ibu memang mengalami berbagai kendala. Termasuk yang asalnya justru dari keluarga sendiri, misalnya orang tua.

Berdasarkan penelitian Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), angka ibu yang pernah menyusui anak di Indonesia sudah tinggi, yaitu 90%, namun yang memberikan secara eksklusif selama 6 bulan masih rendah sebesar 20%. Pemberian ASI direkomendasikan sampai dua tahun atau lebih. Alasan ASI tetap diberikan setelah bayi berusia 6 bulan, karena 65% kebutuhan energi seorang bayi pada umur 6-8 bulan masih terpenuhi dari ASI. Pada umur 9-12 bulan sekitar 50% kebutuhannya dari ASI dan umur 1-2 tahun hanya sekitar 20% dari ASI.

ASI eksklusif didefinisikan sebagai pemberian ASI tanpa suplementasi makanan maupun minuman lain kecuali obat. Setelah 6 bulan ASI tidak dapat mencukupi kebutuhan mineral seperti zat besi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut harus diberikan MP ASI (makanan pendamping ASI ) yang kaya zat besi. Bayi prematur, bayi dengan berat lahir rendah, dan bayi yang memiliki kelainan hematologi tidak memiliki cadangan besi adekuat pada saat lahir umumnya membutuhkan suplementasi besi sebelum usia 6 bulan, yang dapat diberikan bersama dengan ASI eksklusif.

Tabel 4.15 Jumlah Bayi yang mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Bayi Yang Mendapat ASI Eksklusif (Usia s/d 6 bulan)
1.	Sungai Beremas	419
2.	Ranah Batahan	359
3.	Koto Balingka	412
4.	Sungai Aur	250
5.	Lembah Melintang	340
6.	Gunung Tuleh	292
7.	Talamau	144
8.	Pasaman	1.294
9.	Luhak Nan Duo	83
10.	Sasak Ranah Pasisie	217
11.	Kinali	310
<b>Pasaman Barat</b>		<b>4.120</b>

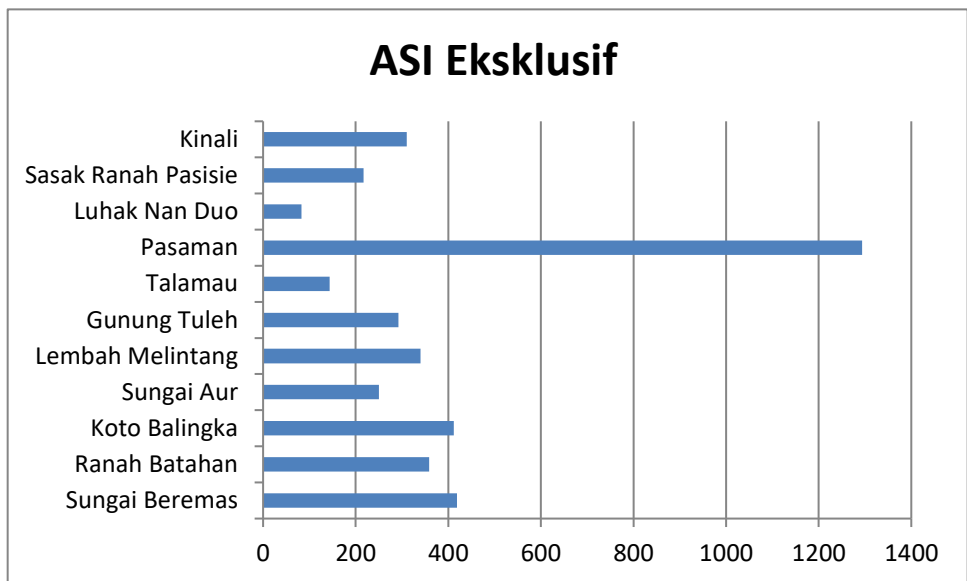
*Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat*

Tabel ini menunjukkan jumlah bayi yang menerima ASI eksklusif hingga usia 6 bulan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dengan total 4.120 bayi. Kecamatan Pasaman mencatat angka tertinggi dengan 1.294 bayi, diikuti oleh Sungai Beremas sebanyak 419 bayi dan Koto Balingka dengan 412 bayi. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penerima ASI eksklusif paling sedikit adalah Luhak Nan Duo dengan 83 bayi dan Talamau dengan 144 bayi.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar bayi di berbagai kecamatan mendapatkan ASI eksklusif, terdapat variasi yang signifikan antar kecamatan. Promosi dan edukasi terkait pentingnya ASI eksklusif perlu terus ditingkatkan, terutama di wilayah dengan cakupan rendah seperti Talamau dan Gunung Tuleh, guna memastikan tumbuh

kembang bayi yang optimal dan mencegah masalah kesehatan di kemudian hari.

Gambar 4.14 Jumlah Bayi yang mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pasaman Barat

#### 4.14 Usia Perkawinan Pertama

Umur perkawinan pertama wanita erat hubungannya dengan fertilitas. Bila umur perkawinan pertama seorang perempuan semakin muda semakin mendekati umur haid pertama kali, maka semakin lama masa reproduksinya. Hal ini berarti semakin panjang masa bagi seorang wanita untuk hamil dan melahirkan. Usia yang dianjurkan bagi perempuan untuk melaksanakan perkawinan pertama adalah pada usia 21 tahun. Sebagian besar perempuan 10 tahun keatas yang berstatus pernah kawin di Kabupaten Pasaman melakukan perkawinan pertama pada usia 21

tahun ke atas. Meskipun demikian masih terdapat perempuan yang melangsungkan perkawinan pertama pada usia dibawah 21 tahun.

Ada beberapa alasan mengapa perempuan lebih dirugikan dalam kasus ini. Pertama, perempuan yang menikah dini berkorelasi dengan angka kehamilan di bawah umur. Hal tersebut meningkatkan risiko penyakit, seperti kanker serviks, eklampsia, puerperal endometritis, dan systemic infections. Lebih lanjut, perempuan yang melahirkan sebelum usia 15 tahun berisiko meninggal lima kali lebih besar dibandingkan usia 20 tahun ke atas. Tak berhenti sampai situ, bayi yang dilahirkannya memiliki risiko mengalami mortalitas dan morbiditas 50 persen lebih tinggi serta cenderung prematur dengan berat badan lahir yang rendah.

Selain itu, perempuan yang menikah dini juga berpeluang lebih tinggi mengalami putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, dan melanggengkan jerat kemiskinan. Hal ini akan berdampak secara psikologis yang bisa menimbulkan kecemasan, stress, dan depresi. Hal tersebut diakibatkan kematangan psikologis yang belum maksimal dan stabil. Fenomena ini juga berpotensi merenggut hak anak atau yang kerap disebut *the best interest of the child* atau dengan kata lain, para korban dipaksa menjadi dewasa dan cenderung kehilangan jati dirinya.

Tabel 4.16 Persentase Penduduk yang Pernah Kawin menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

NO	Usia Perkawinan Pertama	Persentase
1.	≤ 16	5,15
2.	16-24	62,88
3.	25 +	31,97
<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

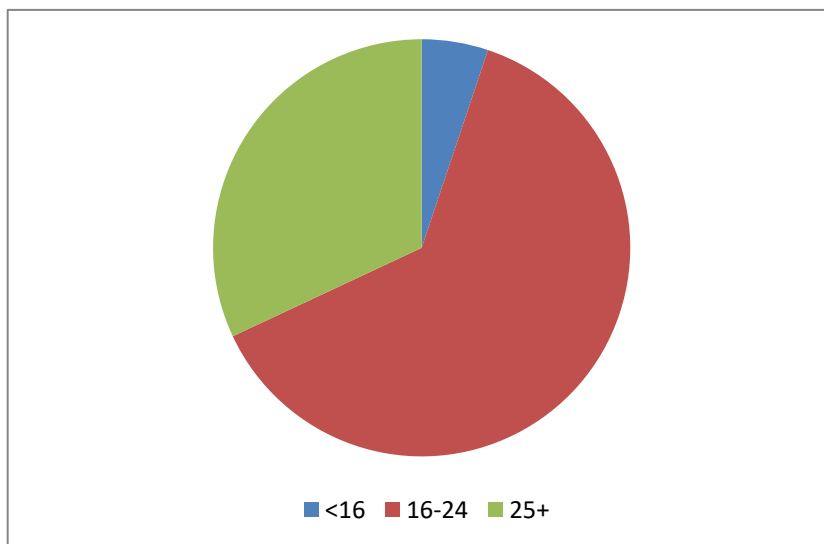
*Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat (Susenas 2024)*

Tabel ini menunjukkan persentase penduduk yang pernah kawin berdasarkan kelompok usia perkawinan pertama di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 Mayoritas penduduk, sebesar 62,88%, menikah untuk pertama kalinya pada rentang usia 16-24 tahun, menunjukkan bahwa usia tersebut merupakan usia paling umum untuk pernikahan. Sebanyak 31,97% penduduk menikah pertama kali pada usia 25 tahun ke atas, sedangkan hanya 5,15% yang menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda, mencerminkan angka pernikahan dini yang relatif rendah.

Data ini menunjukkan adanya tren menikah muda, dengan lebih dari dua pertiga penduduk menikah sebelum usia 25 tahun. Sementara itu, kelompok usia 25 tahun ke atas yang mencapai hampir sepertiga populasi menunjukkan bahwa sebagian orang memilih untuk menunda pernikahan hingga usia lebih matang. Meskipun angka pernikahan dini relatif rendah, perhatian khusus tetap perlu diberikan pada kelompok usia ≤16 tahun karena pernikahan di usia ini dapat membawa dampak sosial dan kesehatan yang serius. Upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang pendewasaan usia pernikahan, terutama di kalangan masyarakat muda,

tetap diperlukan guna mendorong pernikahan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Gambar 4.15 Persentase Penduduk yang Pernah Kawin menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat (Susenas 2024)

#### 4.15 Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA)

Korban Penyalahgunaan NAPZA, adalah seseorang yang menderita ketergantungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adaptif lainnya termasuk minuman Keras) baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, atau lebih sering disingkat Napza, mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaanya. Napza dikenal juga dengan istilah narkoba.



Menurut pakar kesehatan, napza sebenarnya adalah senyawa-senyawa yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997).

Zat adiktif adalah zat-zat yang bisa membuat ketagihan jika dikonsumsi secara rutin. Bahan adiktif berbahaya termasuk bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat, seperti Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap, Nikotin, Kafein dan Zat Desainer.

Tabel 4.17 Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2024

No	Kecamatan	Korban Penyalahgunaan NAPZA		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sungai Beremas	-	-	-
2.	Ranah Batahan	-	-	-
3.	Koto Balingka	-	-	-
4.	Sungai Aur	-	-	-
5.	Lembah Melintang	-	-	-
6.	Gunung Tuleh	2	-	2
7.	Talamau	-	-	-
8.	Pasaman	5	3	8
9.	Luhak Nan Duo	3	-	3
10.	Sasak Ranah Pasisie	4	-	4
11.	Kinali	2	-	2
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>16</b>	<b>3</b>	<b>19</b>

Sumberm: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat

Tabel ini menunjukkan jumlah korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dengan total 19 korban, yang terdiri dari 16 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

Kecamatan Pasaman mencatat jumlah korban tertinggi, yaitu 8 orang, diikuti oleh Sasak Ranah Pasisie dengan 4 korban dengan 3 orang korban. Beberapa kecamatan, seperti Gunung Tuleh dan Klnali, masing-masing melaporkan 2 korban, sedangkan Sungai Beremas, Ranah Batahan, Koto Balingka, Sungai Aur, Lembah Melintang, dan Talamau tidak melaporkan adanya kasus penyalahgunaan NAPZA.

Data ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan NAPZA di Pasaman Barat didominasi oleh laki-laki (16 orang), dan beberapa korban perempuan (3 orang). Hal ini mencerminkan adanya kerentanan lebih tinggi di kalangan laki-laki terhadap penyalahgunaan zat adiktif. Kecamatan dengan jumlah korban tinggi, seperti Pasaman dan Sasak Ranah Pasisie, memerlukan perhatian khusus melalui peningkatan edukasi, layanan rehabilitasi, dan penegakan hukum untuk mencegah penyebaran kasus lebih lanjut. Selain itu, upaya pencegahan yang komprehensif dan berbasis komunitas dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan NAPZA, terutama di wilayah yang terdampak parah.

#### **4.16 Penderita HIV / AIDS**

HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. HIV belum bisa disembuhkan, tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit.

Pengobatan ini juga akan membuat penderitanya hidup lebih lama, sehingga bisa menjalani hidup dengan normal. Dengan diagnosis HIV dini dan penanganan yang efektif, pengidap HIV tidak akan berubah menjadi AIDS. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya.

Tabel 4.18 Penderita HIV / AIDS di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

Kabupaten	1-4 Tahun		5-14 Tahun		15-19 Tahun		20-29 Tahun		30-39 Tahun		40-49 Tahun		50-59 Tahun		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
Pasaman Barat	1	-	2	-	1	-	22	1	22	5	5	4	-	2	65

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat

Tabel ini menunjukkan jumlah penderita HIV/AIDS di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin, dengan total 65 kasus. Mayoritas kasus terjadi pada kelompok usia 30-39 tahun dengan 27 penderita ( 22 laki-laki dan 5 perempuan}, dan kelompok usia 20-29 tahun dengan 23 penderita (22 laki-laki dan 1 perempuan). Terdapat juga kasus di usia 40-49 tahun dengan 9 penderita ( 5 laki-laki dan 4 perempuan), serta di kelompok usia 50-59 dengan 2 penderita perempuan, Adapun di usia 5-14 tahun dengan 2 kasus (semuanya laki-laki). Sedangkan pada anak usia 1-4 tahun dan 15-19 tahun masing-masing 1 kasus dengan penderita laki-laki.

Data ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak terdampak HIV/AIDS dibandingkan perempuan, dengan dominasi kasus pada kelompok usia produktif (30-39 tahun). Ini mengindikasikan adanya kerentanan tinggi pada kelompok usia muda dan dewasa terhadap risiko tertular HIV/AIDS, yang mungkin terkait dengan perilaku berisiko seperti penggunaan narkoba suntik atau aktivitas seksual tanpa perlindungan.

Intervensi kesehatan masyarakat yang lebih kuat diperlukan, terutama berupa edukasi tentang pencegahan HIV/AIDS, promosi penggunaan kondom, dan layanan tes serta konseling. Selain itu, upaya penjangkauan dan dukungan terhadap kelompok usia produktif perlu

ditingkatkan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dan memberikan perawatan bagi mereka yang terinfeksi.

# BAB V

## EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN



## **BAB V**

### **EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN**

Indikator ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. baik dibidang sosial maupun dibidang ekonomi. Indikator ini dapat memberikan gambaran tentang daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktifitas tenaga kerja. Apabila perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja maka peningkatan pengangguran tidak dapat dihindari sehigga pada akhirnya banyak pengangguran yang nantinya akan mengakibatkan banyak terjadi masalah sosial.Selain itu. informasi dan kondisi ketenagakerjaan suatu daerah menjadi semakin penting mengingat salah satu tujuan pembangunan adalah menciptakan lapangan pekerjaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya penduduk yang bekerja menggambarkan tingkat kesejahteraan yang baik. sebaliknya banyaknya penduduk yang menganggur menjadi indikator buruknya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu. semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan terserap di dunia kerja menjadi satu tanda bahwa tingkat kesejahteraan akan semakin baik.

## 5.1 Rumah Tangga Miskin

Kemiskinan adalah kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan aset ekonomi, ataupun akses informasi. Pengukuran ini bersifat materi atau pendekatan moneter. Pengukuran dengan pendekatan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan rumah tangga. Kemudian data pengeluaran ini diperbandingkan dengan suatu batas nilai tukar rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Batas ini sering disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pengeluarannya lebih kecil daripada garis kemiskinan ini disebut penduduk miskin. Pemerintah menggunakan garis kemiskinan berdasarkan ukuran dari BPS yang dihitung berdasarkan data Survei Sosial-Ekonomi Nasional (Susenas).

Secara umum kemiskinan dijelaskan oleh indikator sebagai berikut (i) kekurangan kebutuhan dasar: ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan dan gizi, pakaian, pendidikan dan kesehatan; (ii) ketidakproduktifan: ketidakmampuan melakukan upaya-upaya produktif; (iii) tertutup akses terhadap sumberdaya sosial dan ekonomi; (iv) keterpurukan: ketidakmampuan menentukan nasibnya sendiri, diperlakukan secara tidak adil, didera ketakutan dan keraguan, dan berlaku apatis serta pesimistik; dan (v) ketergantungan: tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan mentalitas kultural serta rendah dalam apresiasi diri. Ada beberapa ukuran kemiskinan yang telah diterapkan di Indonesia dewasa ini, diantaranya adalah ukuran dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan United Nations Development Program (UNDP).



BPS mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non-makanan. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakara Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu kebutuhan gizi 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non-makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. Model ini pada intinya membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan suatu garis kemiskinan (GK), yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan. Sedangkan data yang digunakan adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas).

Selain melakukan perhitungan jumlah penduduk miskin dalam analisis tentang penduduk miskin, BPS juga menyertakan hasil analisis tentang karakteristik rumah tangga miskin. Di dalamnya tergambar kondisi rumah tangga miskin berdasarkan karakteristik sosial demografi, pendidikan, kesehatan, sumber penghasilan, rasio ketergantungan, ketenagakerjaan, kondisi perumahan dan lainlainnya. Karakteristik rumah tangga yang dianggap BPS memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan diantaranya adalah jumlah anggota rumah tangga, mereka yang kepala rumah tangganya berstatus sebagai janda, pendidikan kepala rumah tangga rendah atau kepala rumah tangga buta huruf, perbedaan geografis antara kota dan desa, lapangan usaha dan status pekerjaan, penguasaan luas lantai per kapita, rumah tangga tanpa akses terhadap air bersih, fasilitas buang air besar, pemanfaatan listrik dan sebagainya.

Dari segi faktor penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan menjadi kemiskinan kultural, kemiskinan sumber daya ekonomi, dan kemiskinan struktural. Menurut Surbakti (Usman, 2006: p136), kemiskinan kultural bukanlah bawaan melainkan akibat dari tidak kemampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan.

Kemiskinan bukanlah sebab melainkan akibat. Sikap-sikap seperti ini diabadikan melalui proses sosialisasi dari generasi ke generasi. Kemiskinan sumber daya ekonomi melihat fenomena kemiskinan dari sisi ketiadaan atau kelangkaan sumber daya ekonomi baik faktor-faktor produksi yang berupa modal, tanah, sumber daya manusia dalam hal ini tingkat dan kualitas pendidikan maupun kondisi geografis yang terkait dengan tempat tinggal suatu masyarakat Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor struktur ekonomi dan politik yang melingkupi si miskin.

Struktur ekonomi dan politik yang kurang berpihak pada sekelompok masyarakat tertentu sehingga menimbulkan hambatan-hambatan dalam akses sumber daya ekonomi, lapangan pekerjaan dan partisipasi dalam pembangunan ..

Tabel 5.1 Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sungai Beremas	3.079	302	3.381
2.	Ranah Batahan	1.696	187	1.883
3.	Koto Balingka	2.133	250	2.383
4.	Sungai Aur	2.259	185	2.444
5.	Lembah Melintang	4.357	469	4.826
6.	Gunung Tuleh	1.821	212	2.033
7.	Talamau	3.589	263	3.852
8.	Pasaman	6.124	431	6.555
9.	Luhak Nan Duo	2.509	95	2.604
10.	Sasak Ranah Pasisie	849	31	880
11.	Kinali	3.342	253	3.595
<b>Kab. Pasaman Barat</b>		<b>31.758</b>	<b>2.678</b>	<b>34.436</b>

Sumber Data : Kementerian Koordinator Pembanguna dan Kebudayaan, 2023

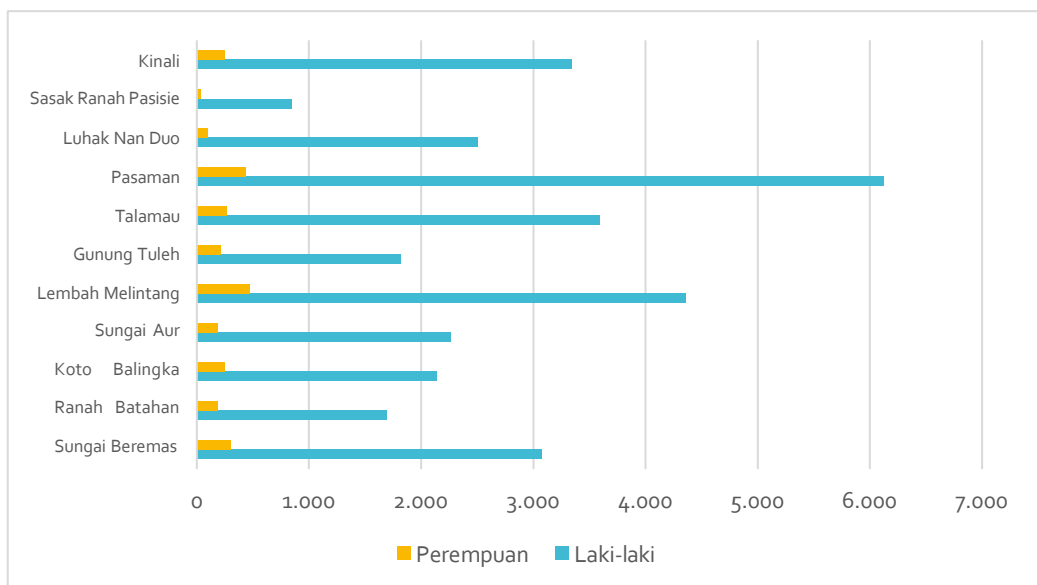
Tabel ini menunjukkan jumlah kepala rumah tangga miskin di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin dan kecamatan, dengan total 34.436 kepala rumah tangga miskin. Mayoritas kepala rumah tangga miskin adalah laki-laki, yaitu sebanyak 31.758 orang (92,22%), sedangkan perempuan hanya 2.678 orang (7,78%).

Kecamatan Pasaman memiliki jumlah kepala rumah tangga miskin tertinggi, yaitu 6.555 orang, diikuti oleh Talamau dengan 3.852 orang, dan Sungai Beremas sebanyak 3.381 orang. Kecamatan dengan jumlah kepala rumah tangga miskin terendah adalah Sasak Ranah Pasisie dengan 931 orang. Dari sisi gender, laki-laki mendominasi sebagai kepala rumah tangga miskin di semua kecamatan. Perempuan sebagai kepala rumah tangga miskin paling banyak ditemukan di Lembah Melintang (469

orang) dan Pasaman (431 orang).

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Pasaman Barat lebih banyak menimpa rumah tangga dengan kepala keluarga laki-laki. Hal ini mungkin terkait dengan struktur sosial dan ekonomi setempat, di mana sebagian besar rumah tangga dipimpin oleh laki-laki. Namun, meskipun jumlah kepala rumah tangga perempuan yang miskin relatif kecil, mereka mungkin menghadapi tantangan yang lebih kompleks, seperti keterbatasan akses pekerjaan dan pendidikan. Intervensi kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga, terutama untuk rumah tangga yang dipimpin perempuan, akan sangat penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah ini.

**Gambar 5.1** Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023



**Sumber : Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2023**

## 5.2 Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) merupakan kegiatan Ekonomi Rakyat yang terbukti tangguh menghadapi goncangan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sejak awal 1998 yang lalu (Mardikanto. 2010). Jika dicermati, usaha mikro dan kecil sebagian besar merupakan kegiatan agrobisnis (onfarm dan off-farm) dan kegiatan-kegiatan non-farm yang dilakukan oleh keluarga petani/nelayan kecil.

Tabel 5.2 Pelaku Usaha Mikro Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Usaha	Usaha Mikro		Total
			L	P	
1.	Sungai Beremas	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	740	658	1.398
2.	Ranah Batahan	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	718	811	1.529
3.	Koto Balingka	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	777	760	1.537
4.	Sungai Aur	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	890	1.005	1.895
5.	Lembah Melintang	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	977	1.002	1.979
6.	Gunung Tuleh	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	788	998	1.786
7.	Talamau	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	752	1.030	1.782
8.	Pasaman	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	2.992	2.146	4.138
9.	Luhak Nan Duo	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	1.010	1.147	2.157
10.	Sasak Ranah Pasisie	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	787	875	1.642
11.	Kinali	Home Industri. Perdagangan dan Jasa	1.795	2.193	3.988
<b>Pasaman Barat</b>			<b>12.226</b>	<b>12.625</b>	<b>23.831</b>

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.

Pasaman Barat

Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Pasaman Barat didominasi oleh kaum perempuan, dimana dari total 23.831 orang pelaku Usaha Mikro, sebanyak 12.625 orang atau 52,97 persen adalah perempuan. Kecamatan yang memiliki pelaku usaha mikro terbanyak adalah Kecamatan Pasaman dengan jumlah 4.138 pelaku usaha atau 17,37 persen dengan jenis usaha yang beragam.

Berikut ini rincian beberapa contoh *Home Industri* pada masing-masing Kecamatan ;

1. Kecamatan Sungai Beremas, jenis usahanya antara lain sulaman benang emas, kue, ikan kering, gula merah, industri tahu, air minum isi ulang, dan lainnya
2. Kecamatan Ranah Batahan, jenis usahanya antara lain tahu-tempe, gula merah, furniture dan lainnya
3. Kecamatan Koto Balingka, jenis usahanya antara lain sapu ijuk, gula merah, air minum isi ulang, tahu, anyaman bambu, kerupuk, kue dan lainnya
4. Kecamatan Lembah melintang, jenis usahanya antara lain industri tahu, gula merah, kerupuk, sirup, kue, papan/balok, teralis/pagar, kerajinan kayu/furniture, kopi bubuk dan lainnya
5. Kecamatan Sungai Aur, jenis usahanya antara lain Industri tahu, gula merah, sapu ijuk dan lainnya
6. Kecamatan Gunung Tuleh, jenis usahanya antara lain Industri gula merah, batako, minyak nilam, sapu ijuk dan lainnya
7. Kecamatan Talamau, jenis usahanya antara lain sapu ijuk, minyak nilam, anyaman rotan untuk peralatan dapur, rending kacang, gula merah, furniture, kopi bubuk, tahu, dan lainnya
8. Kecamatan Pasaman, jenis usahanya antara lain tanaman hias, lele asap, air minum isi ulang, furniture, tahu tempe, penjahit pakaian dan

lainnya

9. Kecamatan Luhak Nan Duo, jenis usahanya antara lain industri tahu tempe, anyaman rotan dan bambu, gula merah, kopi bubuk dan lainnya
10. Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, jenis usahanya antara lain ikan kering, lele asap, kue kering, cinderamata khas dari batok kelapa, air minum isi ulang dan lainnya
11. Kecamatan Kinali, jenis usahanya antara lain air minum isi ulang, industri tahu tempe, lele asap, ikan kering, furniture, minyak nilam, industri kapal/ perahu dan lainnya

### **5.3 Keanggotaan Koperasi**

Pemerintah melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pasaman Barat menganggap bahwa dalam konteks pasar bebas Asean Economic Community (AEC) di tahun 2015 menjadi tantangan untuk meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM. Hal ini merupakan peluang bisnis sekaligus ancaman bagi Koperasi dan UMKM, baik dari sisi produk yang dihasilkan maupun Pemasaran produknya.

Pemerintah juga meyakini bahwa SME (Small Medium Enterprise) dan Koperasi merupakan tulang punggung bagi kegiatan perekonomian yang positif. Ketika perekonomian dan industri negara maju mengalami kontraksi, justru negara-negara yang menyupport perekonomian mikro dan koperasi mampu bertahan dari goncangan global dengan baik.

Tabel 5.3 Keanggotaan Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	Keanggotaan Koperasi		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sungai Beremas	5.842	1.298	7.140
2.	Ranah Batahan	1.031	421	1.452
3.	Koto Balingka	622	426	1.048
4.	Sungai Aur	4.468	4.126	8.594
5.	Lembah Melintang	357	290	647
6.	Gunung Tuleh	2.779	2.651	5.430
7.	Talamau	1.360	1.032	2.322
8.	Pasaman	5.472	3.683	8.936
9.	Luhak Nan Duo	3.760	2.875	6.629
10.	Sasak Ranah Pasisie	1.341	1.091	2.412
11.	Kinali	2.321	1.523	3.782
<b>Kab. Pasaman Barat</b>		<b>29.354</b>	<b>19.416</b>	<b>48.770</b>

*Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kab. Pasaman Barat*

Tabel ini menunjukkan keanggotaan koperasi berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, dengan total 48.770 anggota koperasi. Dari jumlah tersebut, 29.354 anggota adalah laki-laki (60,20%) dan 19.416 anggota adalah perempuan (39,80%).

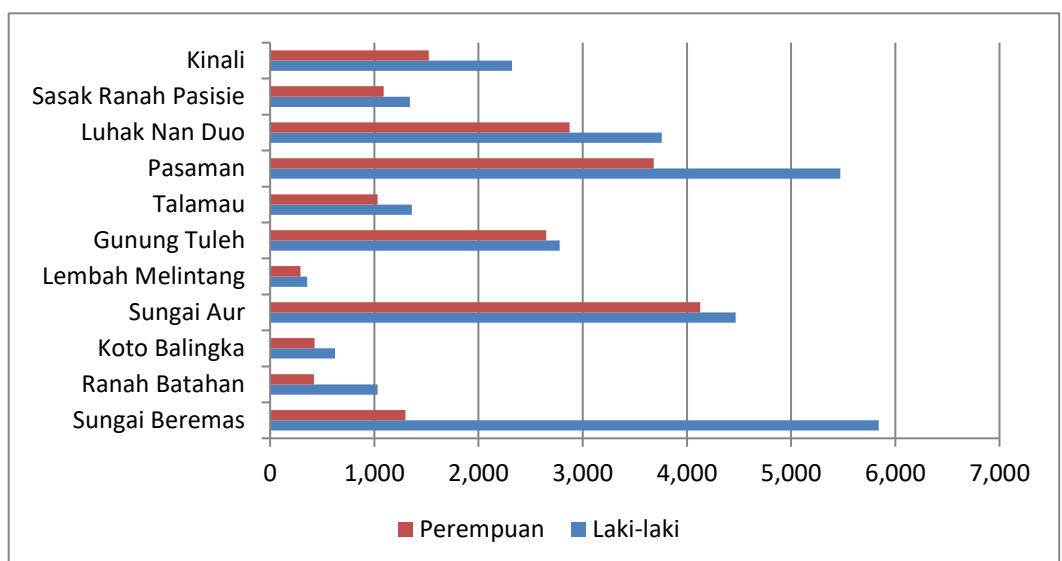
Kecamatan dengan jumlah anggota koperasi tertinggi adalah Pasaman dengan 8.936 anggota (5.472 laki-laki dan 3.683 perempuan). Sungai Aur menempati posisi kedua dengan 8.594 anggota, didominasi oleh laki-laki (4.468 anggota). Kecamatan dengan jumlah anggota koperasi terendah adalah Lembah Melintang dengan 647 anggota, diikuti oleh Koto Balingka dengan 1.048 anggota.



Laki-laki mendominasi keanggotaan koperasi di sebagian besar kecamatan, namun beberapa kecamatan seperti Gunung Tuleh (2.779 laki-laki dan 2.651 perempuan) dan Luhak Nan Duo (3.760 laki-laki dan 2.875 perempuan) menunjukkan distribusi anggota yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun laki-laki lebih banyak terlibat dalam koperasi, partisipasi perempuan juga cukup signifikan di beberapa kecamatan, seperti Sungai Aur dan Gunung Tuleh. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan, program pemberdayaan dan pelatihan khusus bagi anggota koperasi perempuan dapat ditingkatkan, terutama di kecamatan dengan partisipasi perempuan yang masih rendah seperti Sungai Beremas dan Talamau.

Gambar 5.2 Keanggotaan Koperasi Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasaman Barat

### 5.4 Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja (pengangguran). Kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk yang memasuki usia kerja tetapi tidak aktif dalam kegiatan ekonomi seperti Ibu Rumah Tangga, Pelajar, Mahasiswa dan melakukan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tabel 5.4 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2024

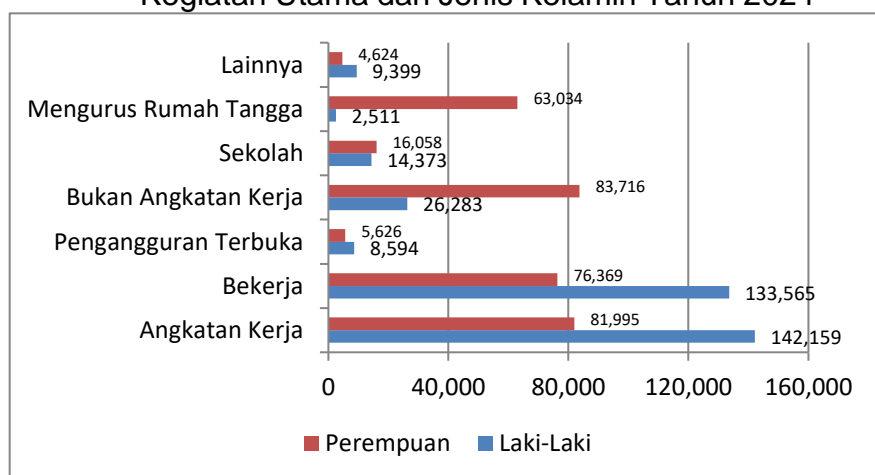
No.	Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
<b>1</b>	<b>Angkatan Kerja</b>	<b>142.159</b>	<b>81.995</b>	<b>224.154</b>
	Bekerja	133.565	76.369	209.934
	Pengangguran Terbuka	8.594	5.626	14.220
<b>2</b>	<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>26.283</b>	<b>83.716</b>	<b>109.999</b>
	Sekolah	14.373	16.058	30.431
	Mengurus Rumah Tangga	2.511	63.034	65.545
	Lainnya	9.399	4.624	14.023
	<b>Jumlah</b>	<b>168.442</b>	<b>165.711</b>	<b>334.153</b>
<i>Sumber : Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025</i>				

Tabel ini menunjukkan penduduk usia kerja di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin dan kegiatan, dengan total 334.153 orang. Dari jumlah tersebut, 224.154 orang termasuk dalam

angkatan kerja, terdiri dari 142.159 laki-laki dan 81.995 perempuan. Mayoritas angkatan kerja bekerja (209.934 orang), namun terdapat 14.220 orang yang menganggur. Laki-laki mendominasi angkatan kerja, baik yang bekerja maupun yang masih menganggur, dengan tingkat pengangguran laki-laki (8.594 orang) lebih rendah dibandingkan perempuan (5.626 orang).

Sementara itu, 109.999 orang tergolong bukan angkatan kerja, dengan proporsi 83.716 perempuan dan 26.283 laki-laki. Kegiatan mengurus rumah tangga menjadi aktivitas dominan bagi perempuan di luar angkatan kerja, dengan 63.034 perempuan dibandingkan 2.511 laki-laki. Selain itu, 30.431 orang sedang bersekolah, dengan distribusi gender yang relatif seimbang. Data ini mencerminkan adanya peran gender tradisional, di mana laki-laki lebih terlibat dalam pekerjaan formal dan perempuan lebih banyak berperan di sektor domestik. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, dukungan kebijakan kesetaraan akses kerja dan layanan seperti pelatihan keterampilan serta fasilitas penitipan anak sangat diperlukan.

**Gambar 5.3** Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025

Tabel 5.5 Penduduk Usia 15+ Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin Dan Status Dalam Pekerjaan Utama di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024

No	Status Dalam Pekerjaan Utama	Jumlah Tenaga Kerja		
		L	P	Total
1	Berusaha sendiri	32.746	18.440	51.186
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak	18.785	11.003	29.788
3	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	10.495	3.547	14.042
4	Buruh/karyawan/pegawai	42.185	24.816	67.001
5	Pekerja bebas di pertanian & non Pertanian	15.900	4.758	20.658
6	Pekerja keluarga/tidak dibayar	7.201	896	8.097
<b>Pasaman Barat</b>		<b>127.312</b>	<b>63.460</b>	<b>190.772</b>

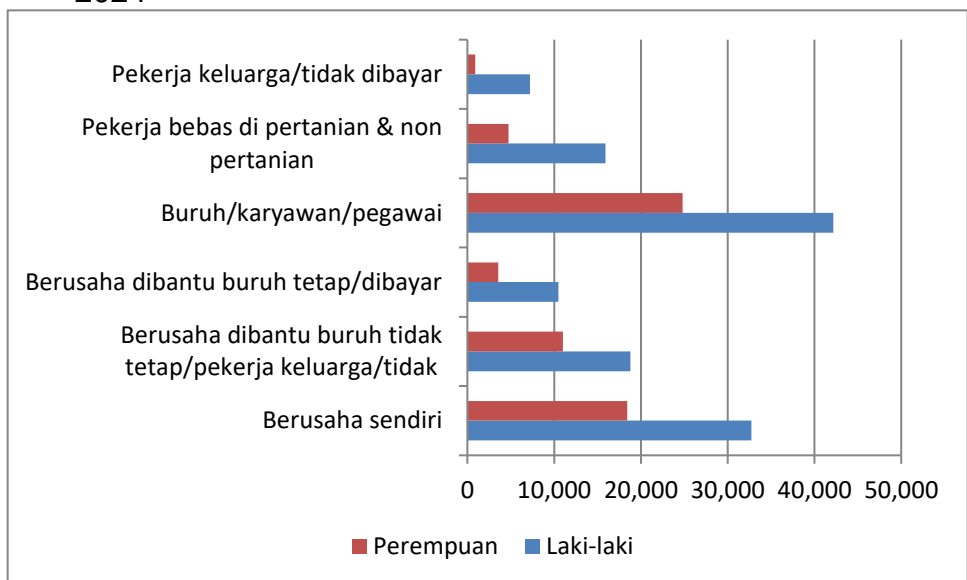
Sumber : Kabupaten Pasaan Barat Dalam Angka 2025

Tabel ini menunjukkan penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 berdasarkan jenis kelamin dan status dalam pekerjaan utama, dengan total 190.772 tenaga kerja. Dari jumlah tersebut, 127.312 orang adalah laki-laki dan 63.460 orang adalah perempuan.

Buruh/karyawan/pegawai menjadi status pekerjaan utama terbesar kategori terbesar, dengan 67.001 pekerja, mayoritas di antaranya adalah laki-laki (32.786 orang). Berusaha sendiri menjadi kategori terbesar kedua, dengan total 51.186 orang (32.746 laki-laki dan 18.440 perempuan).. Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau pekerja keluarga tercatat sebanyak 29.788 orang, sedangkan yang dibantu buruh tetap berjumlah 14.042 orang. Pekerja bebas di sektor pertanian dan non-pertanian mencatat 20.658 orang, dengan 15.900 pekerja laki-laki dan 4.758 perempuan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar juga cukup signifikan, dengan 8.097 pekerja di mana laki-laki mendominasi (7.201 orang) dibanding perempuan (896 orang).

Data ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak terlibat di hampir semua kategori pekerjaan, terutama sebagai buruh dan pekerja bebas. Sebaliknya, perempuan lebih banyak bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar, yang menunjukkan masih kuatnya peran tradisional perempuan dalam kegiatan domestik dan pekerjaan keluarga. Kategori berusaha sendiri juga menarik karena memiliki partisipasi tinggi dari kedua jenis kelamin, menandakan adanya semangat wirausaha di kalangan masyarakat.

**Gambar 5.4 Penduduk Usia 15+ Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Status Dalam Pekerjaan Utama di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024**



*Sumber : Kabupaten Pasaman Barat Dalam Angka 2025*

Tabel 5.6 Penduduk 15+ Berdasarkan Angkatan Kerja Menurut Pendidikan, dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

Jenjang Pendidikan	Laki-laki			Perempuan		
	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja	Bekerja	Pengangguran	Angkatan Kerja
<= SD	42.980	2.223	45.203	27.820	516	28.336
SMP	26.346	1.260	27.606	13.598	646	14.244
SMA Umum	36.068	4.344	40.412	14.520	1.210	15.730
SMA Kejuruan	9.805	996	10.801	3.960	201	4.161
Diploma I/II/III	1.101	-	1.101	2.883		2.883
Universitas	10.685	497	11.182	14.934	1.204	16.138
<b>Total</b>	<b>26.985</b>	<b>9.320</b>	<b>136.305</b>	<b>77.715</b>	<b>3.777</b>	<b>81.492</b>

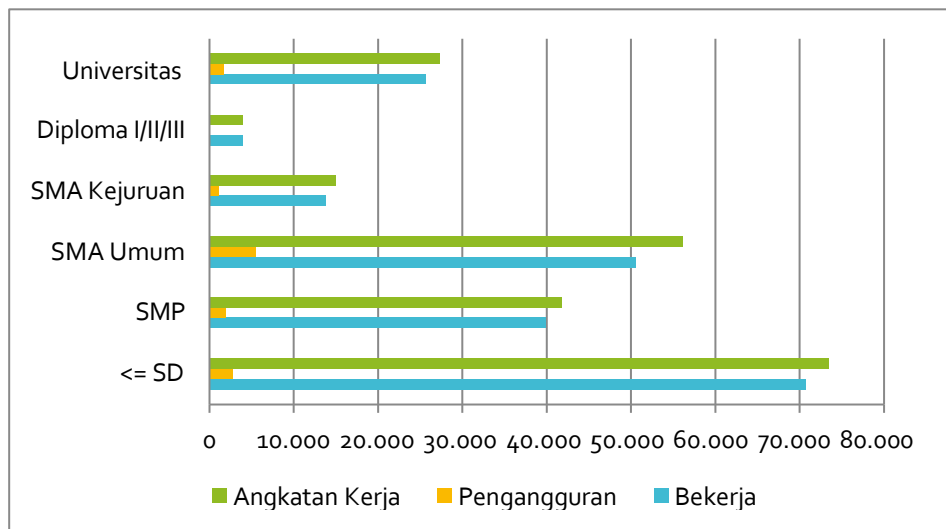
Sumber : BPS – Hasil Sakernas Agustus 2023

Tabel ini menunjukkan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 berdasarkan pendidikan terakhir dan jenis kegiatan dalam angkatan kerja, dengan total 136.305 laki-laki dan 81.492 perempuan dalam angkatan kerja. Mayoritas tenaga kerja berasal dari kelompok dengan pendidikan  $\leq$  SD, yaitu 73.539 orang (45.203 laki-laki dan 28.336 perempuan), menandakan bahwa banyak penduduk bekerja meskipun dengan pendidikan rendah.

Pekerja dengan pendidikan SMA umum merupakan kelompok terbesar kedua dalam angkatan kerja, mencapai 55.142 orang (40.412 laki-laki dan 15.730 perempuan). Sementara itu, lulusan universitas hanya berjumlah 16.138 orang, menunjukkan rendahnya partisipasi tenaga kerja dengan pendidikan tinggi. Tingkat pengangguran relatif lebih tinggi pada kelompok lulusan SMA umum dan SMA kejuruan, dengan total 5.540 penganggur dari kedua jenjang pendidikan ini.

Data ini menyoroti bahwa mayoritas tenaga kerja di Pasaman Barat memiliki tingkat pendidikan yang rendah hingga menengah, dan hanya sebagian kecil yang memiliki pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan akses dan kualitas pendidikan, terutama pendidikan kejuruan dan tinggi, untuk meningkatkan keterampilan dan peluang kerja. Program pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja yang relevan juga diperlukan untuk mengurangi pengangguran, terutama di kalangan lulusan SMA dan SMA kejuruan.

Gambar 5.5 Penduduk 15+ Berdasarkan Angkatan Kerja Menurut Pendidikan, dan Jenis Kegiatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023



Sumber : BPS – Hasil Sakernas Agustus 2023

## 5.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) atau tingkat kegiatan ekonomi/ EAR adalah rasio antara angkatan kerja dan ukuran keseluruhan kelompok mereka (penduduk nasional rentang usia yang sama). Istilah umumnya tidak termasuk pengusaha atau manajemen dan dapat menyiratkan mereka yang terlibat dalam kerja manual. Ini juga berarti semua orang yang tersedia untuk bekerja. Akan tetapi, apabila angka TPAK kecil maka dapat diduga bahwa penduduk usia kerja banyak yang tergolong bukan angkatan kerja, baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya.

Dengan demikian angka TPAK dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang masih bersekolah dan penduduk yang mengurus rumah tangga (Mantara, 2000).

Adapun dalam mengetahui TPAK dapat di hitung menggunakan rumus berikut ini:

$$TPAK = \frac{AngkatanKerja}{PendudukUsiaKerja} \times 100$$

Tabel 5.7 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2024

Kategori	Jenis kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
Penduduk Usia kerja	168.442	165.711	334.153
Angkatan Kerja	142.159	81.995	224.154
<b>TPAK</b>	<b>84,08</b>	<b>49,48</b>	<b>67,08</b>

Sumber : Kadaan Angkatan Kerja Kabupaten Pasaman Barat 2024,BPS

*TPAK= Proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja*

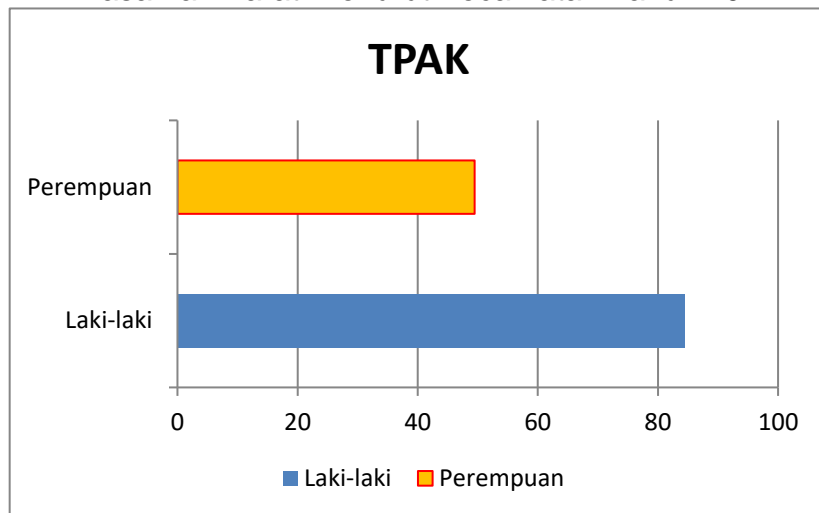


Tabel ini menampilkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 , dengan total TPAK sebesar 67,08%. TPAK laki-laki tercatat jauh lebih tinggi, yaitu 84,08%, dibandingkan dengan TPAK perempuan sebesar 49,48%. Dari total 334.153 penduduk usia kerja, sebanyak 217.797 orang termasuk dalam angkatan kerja (168.442 laki-laki dan 165.711 perempuan).

Data ini menunjukkan bahwa partisipasi laki-laki dalam angkatan kerja jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan, mengindikasikan masih adanya perbedaan gender dalam keterlibatan di pasar kerja. Meskipun jumlah penduduk usia kerja hampir seimbang antara laki-laki (168.442 orang) dan perempuan (165.711 orang), terdapat kesenjangan signifikan dalam partisipasi angkatan kerja. Ini bisa disebabkan oleh faktor sosial dan budaya yang menempatkan perempuan lebih banyak dalam peran domestik dan kegiatan di luar sektor formal.

Untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih tinggi, diperlukan program yang dapat meningkatkan akses perempuan ke pekerjaan formal, seperti pelatihan keterampilan dan fasilitas dukungan, termasuk penitipan anak dan kebijakan cuti kerja yang inklusif. Peningkatan kesetaraan gender dalam pasar kerja dapat memperbaiki TPAK keseluruhan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Gambar 5.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan Tahun 2024



Sumber : Kadaan Angkatan Kerja Kabupaten Pasaman Barat 2024  
 TPAK= Proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja

## 5.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator yang digunakan untuk mengukur angka pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang merupakan persentase pengangguran terhadap angkatan kerja. Dalam bahasan ini yang termasuk penganggur adalah mereka yang tergolong dalam usia kerja (15 tahun ke atas) yang pada saat pencacahan tidak bekerja dan bersedia menerima pekerjaan. tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. tidak bekerja dan sedang mempersiapkan usaha. tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (discouraged workers). serta tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (future starts). Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengangguran yang terjadi. dapat dilakukan dengan menghitung tingkat pengangguran terbuka.

Tabel 5.8 Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Pasaman Barat Tahun 2024

No.	Tingkat Pengangguran	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
	Jumlah Angkatan Kerja	142.159	81.995	224.154
	<b>TPT</b>	<b>6,05</b>	<b>6,86</b>	<b>6,34</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Pasaman Barat*

Tabel ini menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dengan TPT total sebesar 6,34%.

TPT penduduk perempuan tercatat lebih tinggi, yaitu 6,86%, dibandingkan dengan laki-laki yang memiliki TPT sebesar 6,05%. Tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi, menandakan adanya tantangan dalam mendapatkan pekerjaan bagi laki-laki.

Data ini mengindikasikan kesenjangan gender dalam pengangguran, di mana laki-laki lebih rentan mengalami pengangguran dibandingkan perempuan. Untuk menekan angka pengangguran, diperlukan kebijakan penciptaan lapangan kerja yang menyasar kedua kelompok, khususnya bagi laki-laki. Selain itu, program pelatihan keterampilan dan peningkatan akses pekerjaan bagi kelompok rentan dapat membantu mengurangi TPT secara keseluruhan di Kabupaten Pasaman Barat.

## 5.7 Distribusi Sektoral Penyerapan Tenaga Kerja

Distribusi sektoral penyerapan tenaga kerja menggambarkan komposisi penduduk yang bekerja menurut kelompok lapangan pekerjaan utama. Data ini digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja, sekaligus sebagai tolak ukur untuk menilai kemajuan perekonomian suatu daerah.

Tabel 5.9 Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Tahun 2023

Kategori		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pertanian	69.715	23.165	92.880
2	Manufaktur	17.509	5.183	22.692
3	Jasa-jasa	39.761	49.367	89.128
	<b>Jumlah Semua Sektor</b>	<b>126.985</b>	<b>77.715</b>	<b>204.700</b>

Sumber : BPS, Sakernas Agustus 2023

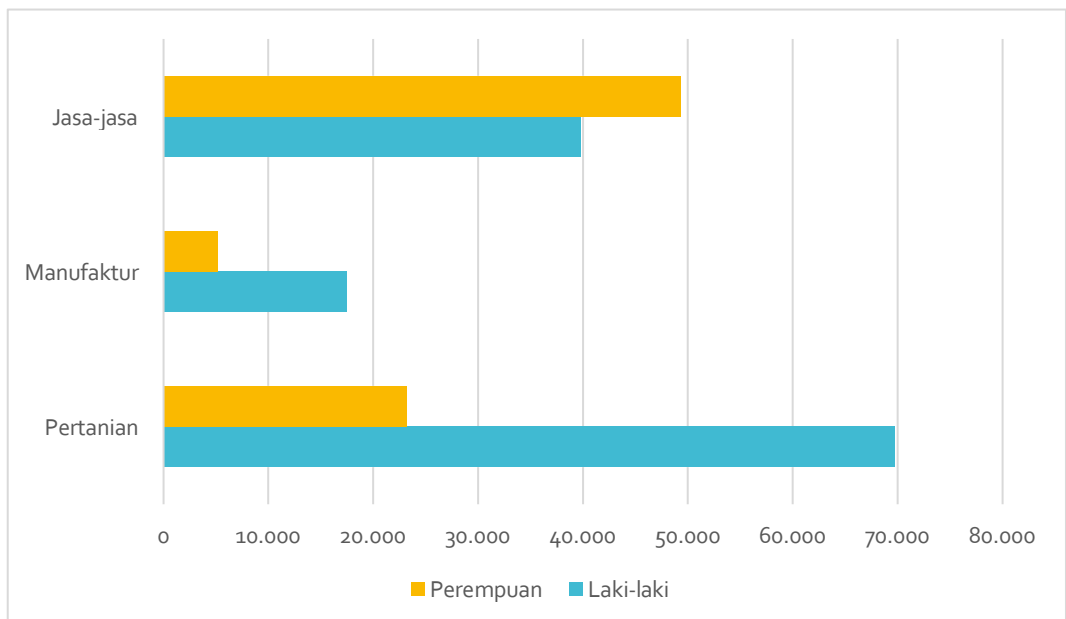
Tabel ini menunjukkan komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan jenis kelamin dan lapangan pekerjaan di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023, dengan total 204.700 tenaga kerja. Sektor pertanian menjadi lapangan pekerjaan terbesar, menyerap 92.880 orang (69.715 laki-laki dan 23.165 perempuan). Sektor jasa-jasa menempati posisi kedua, dengan 89.128 pekerja, di mana perempuan (49.367 orang) lebih banyak terlibat dibandingkan laki-laki (39.761 orang). Sektor manufaktur menyerap tenaga kerja paling sedikit, yaitu 22.692 orang (17.509 laki-laki dan 5.183 perempuan).

Data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian, dengan dominasi tenaga kerja laki-laki.

Sebaliknya, sektor jasa lebih banyak diisi oleh perempuan, menandakan pergeseran peran perempuan ke sektor jasa, yang mungkin mencakup pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya. Partisipasi perempuan dalam sektor manufaktur masih rendah, dengan hanya 5.183 pekerja dibandingkan 17.509 laki-laki, menandakan adanya tantangan dalam akses pekerjaan perempuan di sektor ini.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan perbedaan gender dalam distribusi pekerjaan di berbagai sektor. Kebijakan untuk mendorong keterlibatan perempuan di sektor manufaktur dan pertanian serta peningkatan keterampilan tenaga kerja di sektor jasa dapat membantu menciptakan keseimbangan dan memperkuat perekonomian Pasaman Barat

Gambar 5.8 Komposisi Penduduk Yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Tahun 2023



Sumber : Sakernas Agustus 2023

## 5.8 Pekerja Perempuan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Di Kabupaten Pasaman Barat

Tabel 5.10 Pekerja Perempuan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No.	Unit Organisasi	PNS			Non PNS		
		L	P	Total	PTT	THL	Total
<b>A.</b>	<b>Perangkat Daerah</b>						
1	Sekretariat Daerah	59	30	89	90	0	179
2	Sekretariat DPRD	20	4	24	24	34	82
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	19	25	44	14	38	96
4	Badan Pendapatan Daerah	13	18	31	30	35	96
5	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	10	4	14	24	11	49
6	Dinas Kesehatan	87	622	709	131	640	1480
7	Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	9	15	24	9	22	55
8	Dinas Lingkungan Hidup	15	12	27	42	65	134
9	Dinas Pariwisata	6	11	17	14	13	44
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	57	14	71	54	33	158
11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	545	1675	2220	777	1233	4230
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	6	31	37	8	11	56
13	Dinas Perhubungan	22	12	34	55	27	116
14	Dinas Perikanan	9	11	20	18	9	47
15	Dinas Perkebunan dan Peternakan	16	22	38	42	30	110
16	Dinas Sosial	7	12	19	11	34	64
17	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan	26	29	55	35	67	157
18	Dinas Tenaga Kerja	17	15	32	8	8	48

Lanjutan Tabel 5.10

No.	Unit Organisasi	PNS			Non PNS		
		L	P	Total	PTT	THL	Total
<b>B.</b>	<b>Lembaga Teknis</b>						
1	Inspektorat	32	45	77	7	7	91
2	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	17	31	11	8	50
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	18	16	34	7	17	58
4	Satuan Pamong Praja dan Kebakaran	22	4	26	208	17	251
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	13	16	29	8	8	45
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari	10	10	20	9	17	46
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	8	10	18	17	20	55
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15	7	22	11	17	50
9	Rumah Sakit Umum Daerah	46	173	219	86	178	483
10	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	6	14	20	16	21	57
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8	6	14	14	20	48
12	Dinas Ketahanan Pangan	7	15	22	9	19	50
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10	24	34	10	9	53
14	Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	14	9	23	23	15	61

**Lanjutan Tabel 5.10**

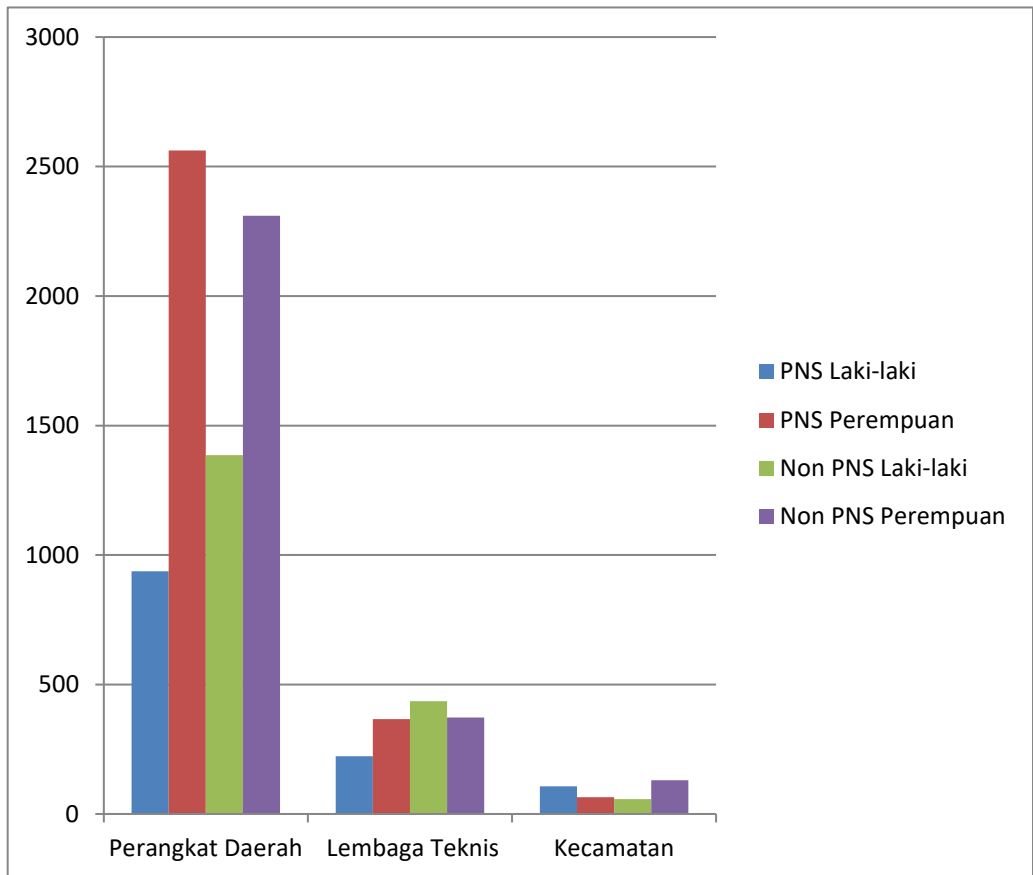
No	Unit Organisasi	PNS			Non PNS		
		L	P	Total	PTT	THL	Total
C.	Kecamatan						
1	Kecamatan Sungai Beremas	9	5	14	2	16	32
2	Kecamatan Ranah Batahan	12	2	14	5	16	35
3	Kecamatan Koto Balingka	11	7	18	6	10	34
4	Kecamatan Sungai Aur	8	5	13	8	10	31
5	Kecamatan Lembah Melintang	5	11	16	5	15	36
6	Kecamatan Gunung Tuleh	12	4	16	3	9	28
7	Kecamatan Talamau	9	8	17	3	12	32
8	Kecamatan Pasaman	12	9	21	7	9	37
9	Kecamatan Luhak nan Duo	10	4	14	8	6	28
10	Kecamatan Sasak Ranah Pasisie	8	5	13	7	13	33
11	Kecamatan Kinali	11	5	16	4	14	34
	<b>Total</b>	<b>1.273</b>	<b>2.993</b>	<b>4.266</b>	<b>1.880</b>	<b>2.813</b>	<b>8.959</b>

*Sumber : BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat*

Berdasarkan table 5.10 diatas terlihat bahwa analisa PNS dan NON PNS pada OPD juga tidak jauh berbeda, karena secara umum populasi PNS lebih bayak perempuan, baik dari kategori jabatan, kepangkatan, dan pendidikan, maka berdasarkan penempatan pada OPD juga akan terlihat jumlah PNS perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Hal ini dimungkinkan karena dari jumlah jabatan fungsional tertentu seperti tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, populasinya lebih banyak didominasi oleh perempuan. Kualifikasi pendidikan seperti bidan dan perawat juga lebih banyak dari perempuan. Sehingga dalam hal jumlah penempatan di OPD, jumlah perempuan akan lebih banyak daripada laki-laki.



**Gambar 5.9** Pekerja Perempuan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



*Sumber : BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat*

A top-down view of a wooden desk. In the top left, a portion of a silver laptop is visible, showing the keyboard and trackpad. In the top right, a white ceramic mug is filled with dark coffee. In the bottom center, a rectangular chalkboard with a light-colored wooden frame sits on the desk. The chalkboard has the word 'POLITICS' written in white, bold, sans-serif capital letters. At the bottom of the chalkboard, several white, three-dimensional letter tiles are scattered and jumbled together. The tiles include letters like 'P', 'O', 'L', 'I', 'T', 'I', 'C', 'S', 'E', 'D', 'O', 'F', 'S', 'K', 'E', 'T', 'A', 'R', 'I', 'A', 'N', 'I', 'S', 'M', 'I', 'D', 'E', 'O', 'L', 'O', 'G', 'Y', 'A', 'N', 'D', 'R', 'E', 'F', 'E', 'R', 'E', 'N', 'C', 'E', 'S'.

## *Bab VI*

# BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

POLITICS

LETTERS  
POLITICS  
REFERENCES  
POLITICS  
REFERENCES  
POLITICS  
REFERENCES

## **BAB VI**

### **BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **6.1 Keterwakilan di Lembaga Legislatif**

Partisipasi perempuan Indonesia dalam Parlemen masih sangat rendah. Menurut data dari World Bank (2019), negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk keterwakilan perempuan di parlemen. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di parlemen sedikit banyak berpengaruh terhadap isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Dalam pelaksanaan Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif terdapat dua metode yaitu berbasis pendidikan politik dengan melibatkan perempuan berperan aktif di kepengurusan partai dan pemilu sebagai calon anggota legislatif. Metode berbasis sosialisasi yaitu Kementerian dan Lembaga melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dengan berbagai saluran secara konvensional tatap muka maupun digital

##### **a. Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Menurut Partai**

Partai politik merupakan salah satu wadah dimana perempuan bisa berkiprah dalam bidang politik atau dengan kata lain untuk meningkatkan pemberdayaan politik perempuan, partai politik di Indonesia juga merupakan jenjang untuk seseorang menjadi anggota parlemen. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang seperti UU Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik yang menyatakan bahwa partai politik harus memenuhi kuota 30 persen bagi perempuan dalam partai politik

terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat. Dengan dibentuknya UU tersebut seharusnya perempuan Indonesia khususnya di Kabupaten Pasaman Barat bisa memanfaatkan peluang untuk lebih berkiprah lagi dalam bidang politik.

Pada hasil pemilu 2024 yang lalu, keterlibatan perempuan di Kabupaten Pasaman Barat dalam bursa pemilihan Anggota DPRD Pasaman Barat masih sangat rendah dimana hanya 4 orang saja yang berhasil duduk di kursi DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 6.1 Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Menurut Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2024

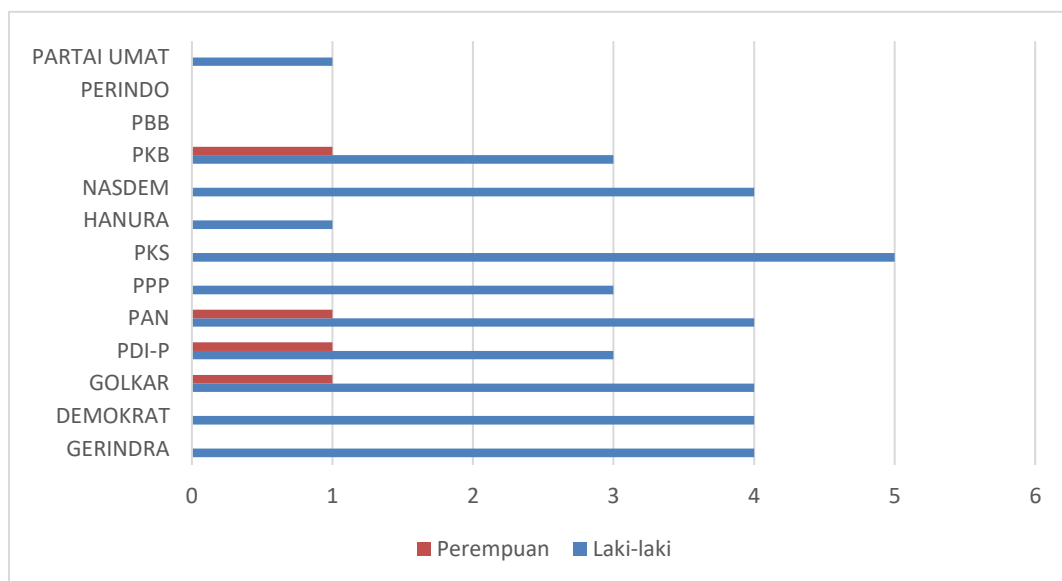
No	Partai	Anggota DPRD		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	GERINDRA	4	-	4
2	DEMOKRAT	4	-	4
3	GOLKAR	4	1	5
4	PDI-P	3	1	4
5	PAN	4	1	5
6	PPP	3	-	3
7	PKS	5	-	5
8	HANURA	1	-	1
9	NASDEM	4	-	4
10	PKB	3	1	4
11	PBB	-	-	-
12	PERINDO	-	-	-
13	PARTAI UMAT	1	-	1
	<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>40</b>

*Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat*

Tabel 6.1 di atas menunjukkan bahwa dari 40 orang anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, hanya 4 orang keterwakilan perempuan di dalamnya yakni berasal dari Partai Golkar, PDI-P, PAN dan PKB yang masing-masing berjumlah 1 orang. Kurangnya kepercayaan diri perempuan berkompetisi dengan pria dalam dunia politik menjadi salah satu faktor penyebab minimnya keterlibatan perempuan.

Disamping itu, budaya masyarakat setempat masih mempercayakan kepada laki-laki untuk memimpin. Hal itu dapat terlihat pada hasil pemilu periode 2024-2029 lalu.

**Gambar 6.1 Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Menurut Partai dan Jenis Kelamin Tahun 2024**



*Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat*

## b. Anggota DPRD Kabupaten Menurut Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD wajib menjadi anggota salah satu komisi. Komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai berikut ;

- a. Komisi I : Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
- b. Komisi II : Bidang Perekonomian dan Keuangan
- c. Komisi III : Bidang Pembangunan
- d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Rakyat

Tabel 6.2 Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2024-2029

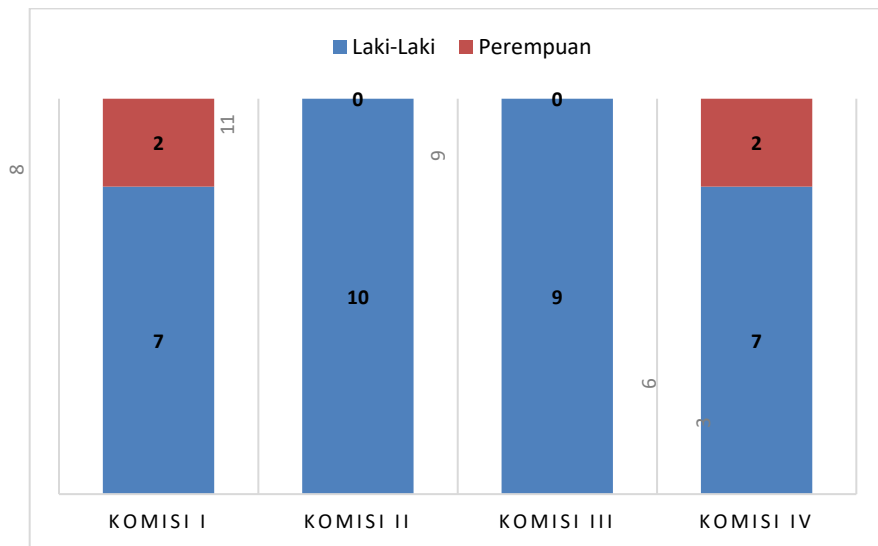
No	Komisi	Anggota DPRD Kab. Pasaman Barat		
		Laki-Laki	Perempuan	L+P
1	KOMISI I	7	2	9
2	KOMISI II	10	-	10
3	KOMISI III	9	-	9
4	KOMISI IV	7	2	9

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel di atas terlihat bahwa keterwakilan perempuan tidak mengisi keseluruhan komisi yang ada di DPRD Kab. Pasaman Barat. Dimana hanya pada Komisi I, Komisi IV yang diisi perempuan masing-masing komisi 2 orang, sedangkan pada komisi II dan Komisi III semua anggota nya didiisi laki-laki. Hal ini tentunya masih menjadi pekerjaan bersama bagaimana perempuan bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di kursi DPRD sehingga kepentingan perempuan bisa disuarakan.



Gambar 6.2 Anggota DPRD Kabupaten Pasaman barat Menurut Komisi dan Jenis Kelamin Tahun 2024-2029



Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Pasaman Barat

### c. Pengurus Organisasi Sosial dan Politik

Representasi perempuan di bidang politik boleh dikatakan masih jauh dari harapan. Meski negara kini relatif lebih akomodatif terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan (seperti tercermin dalam UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum), namun harus disadari bahwa ruang ekspresi politik perempuan yang diberikan negara (dan para elite partai) masih jauh dari spirit keadilan dan kesetaraan. Hal ini bisa dilihat pada tabel tentang pengurus partai politik dari kalangan perempuan di Pasaman Barat berikut ini.

Tabel 6.3 Pengurus Partai Politik Menurut Jenis Kelamin di Pasaman Barat Tahun 2024

No	Partai	DPP			DPW			DPC		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	PKB	-	-	-	-	-	-	15	6	21
2	GERINDRA	-	-	-	-	-	-	24	22	45
3	PDI-P	-	-	-	-	-	-	14	5	19
4	GOLKAR	-	-	-	-	-	-	46	21	67
5	NASDEM	-	-	-	-	-	-	25	11	36
6	BERKARYA	-	-	-	-	-	-	13	2	15
7	PKS	-	-	-	-	-	-	17	16	33
8	PERINDO	-	-	-	-	-	-	3	2	5
9	PPP	-	-	-	-	-	-	11	5	16
10	PAN	-	-	-	-	-	-	26	8	34
11	HANURA	-	-	-	-	-	-	8	3	11
12	DEMOKRAT	-	-	-	-	-	-	3	0	3
13	PBB	-	-	-	-	-	-	6	4	10
	<b>Pasaman Barat</b>	-	-	-	-	-	-	<b>211</b>	<b>105</b>	<b>316</b>

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

Dari tabel 6.3 di atas terlihat bahwa keterwakilan perempuan menjadi pengurus partai politik masih rendah. Pada tahun 2024, pengurus tingkat DPC partai politik laki-laki dan perempuan berjumlah 316 orang, terdiri dari 211 laki-laki dan 105 orang perempuan. Jika dilihat dari perbandingan jumlah tersebut persentase keterlibatan laki-laki sebesar 66,77% dan Perempuan 33,22% dari 13 partai politik.



#### d. Pengurus Harian Parpol

Keberadaan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi menjamin kontribusi aktif masyarakat dalam pembangunan nasional. Selain sebagai media sosialisasi dan rekrutmen politik, partai politik penting sebagai sarana artikulasi kepentingan di masyarakat. Maka dari itu, kehadiran kantor perwakilan partai politik hingga ke level ranting perlu diregulasi secara ketat oleh pemerintah pusat untuk memaksimalkan partisipasi publik. Pengurus harian partai politik di Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.4      Pengurus Harian Parpol Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Partai	Jenis Kelamin		
		(L)	(P)	L+P
1	PKB	15	6	21
2	GERINDRA	24	22	45
3	PDI.P	14	5	19
4	GOLKAR	46	21	67
5	NASDEM	25	11	36
6	BERKARYA	13	2	15
7	PKS	17	16	33
8	PERINDO	3	2	5
9	PPP	11	5	16
10	PAN	26	8	34
11	HANURA	8	3	11
12	DEMOKRAT	3	0	3
13	PBB	6	4	10
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>211</b>	<b>105</b>	<b>316</b>

Sumber : Badan Kesbangpol Kab. Pasaman Barat

Dari tabel 6.3 dapat terlihat bahwa keterlibatan perempuan dalam kepengurusan harian partai politik masih belum berimbang dimana dari total 316 orang pengurus, jumlah perempuan hanya 105 orang (33,22%) dan laki-laki 211 orang (66,77%) dari 13 partai politik pada Tahun 2024 .

## **6.2 Peranan dan Komposisi di Lembaga Yudikatif**

Teori Trias Politika, meletakkan fungsi-fungsi lembaga Negara sebagai sistem *check and balances*. Peran lembaga yudikatif dalam *check and balances* itu sebagai lembaga yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peradilan Indonesia mempunyai beberapa lingkungan dan tingkatan.

Lingkungan peradilan terdiri dari empat peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), dan Peradilan Militer yang semuanya berujung pada satu institusi, Mahkamah Agung (MA). Peraturan mengenai Peradilan di Indonesia belum mengatur keterwakilan perempuan dalam jabatan-jabatan dalam lingkungan itu. Sehingga menjadi pertanyaan bagaimanakah posisi perempuan dalam jabatan tersebut. Berikut adalah sebaran jabatan lembaga hukumberdasarkan jenis kelamin di lingkungan peradilan :

### **a. Jaksa menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI menjelaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang memegang kekuasaan di bidang penuntutan dan kewenangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kekuasaan Kejaksaan terdiri dari tiga bagian, seperti dijelaskan dalam Pasal 3 dan 4, yaitu Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota negara Indonesia dan memiliki daerah kekuasaan hukum di seluruh wilayah negara, Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan memiliki daerah kekuasaan hukum di wilayah provinsi tersebut, dan Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan memiliki daerah kekuasaan hukum di wilayah kabupaten/kota tersebut.

Definisi jaksa sendiri dijelaskan dalam Pasal 1, yakni sebagai pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memiliki wewenang lain yang berdasarkan undang-undang.

Sedangkan menurut UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004, jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Representasi perempuan menurut jabatan pada Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.5 Jaksa Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Jenis Jabatan Jaksa	Jumlah Jaksa		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Fungsional	2	1	3
2	Struktural	-	-	-
	Eselon I	-	-	-
	Eselon II/a	-	-	-
	Eselon II/b	-	-	-
	Eselon III/a	-	-	-
	Eselon III/b	1	-	1
	Eselon IV	5	1	6
	Eselon V	2	2	4
	<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>14</b>

*Sumber : Kejaksaan Negeri Pasaman Barat*

Tabel ini menunjukkan jumlah jaksa berdasarkan jenis jabatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dengan total 14 jaksa. Dari jumlah tersebut, 10 orang adalah laki-laki dan hanya 4 orang adalah perempuan, menunjukkan dominan laki-laki dalam profesi jaksa di wilayah ini.

Pada jabatan fungsional, terdapat 3 jaksa, terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan, mencerminkan keterlibatan perempuan yang lebih terlihat di posisi ini. Pada jabatan struktural, seluruh jabatan eselon diisi oleh laki-laki, tanpa ada perempuan. Eselon IV mencatat jumlah terbanyak dengan 6 jaksa, diikuti oleh eselon V dengan 4 jaksa dan eselon III/b dengan 1 jaksa.

Data ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan dalam jabatan jaksa masih sangat rendah, terutama pada jabatan struktural dan eselon, yang seluruhnya diisi oleh laki-laki. Perlu ada upaya untuk mendorong partisipasi perempuan dalam jabatan struktural agar tercipta kesetaraan gender dalam struktur organisasi kejaksaan. Selain

itu, pelatihan dan pengembangan karier bagi perempuan dalam profesi jaksa dapat membantu meningkatkan keterlibatan mereka dalam posisi kepemimpinan.

#### **b. Hakim Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin**

Hakim adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk dapat mengadili, memutuskan perkara-perkara yang tidak bertanggung dan memimpin perkara hukum yang diajukan ke Pengadilan atau Mahkamah.

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Tugas dan fungsi Hakim Agung adalah memiliki Ketua Mahkamah Agung. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga hukum yaitu hakim dan jaksa di Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2024 tampak pada tabel berikut ini.

Tabel 6.6 Hakim Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Jenis Jabatan Hakim	Jumlah Hakim		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Ketua Pengadilan Tinggi	-	-	-
2	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi	-	-	-
3	Hakim Pengadilan Tinggi	-	-	-
4	Ketua Pengadilan Negeri	1	-	1
5	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	-	-	-
6	Hakim Pengadilan Negeri	5	2	7
	<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>

*Sumber : Pengadilan Negeri Pasaman Barat*

Tabel ini menunjukkan jumlah hakim berdasarkan jenis jabatan dan jenis kelamin di Pengadilan Negeri Pasaman Barat tahun 2024, dengan total 8 hakim. Dari jumlah tersebut, 6 orang adalah laki-laki dan 2 orang adalah perempuan, menandakan dominasi laki-laki dalam profesi hakim di wilayah ini.

Pada Pengadilan Negeri, posisi Ketua Pengadilan Negeri diisi oleh 1 laki-laki, sementara Wakil Ketua Pengadilan Negeri kosong. Jabatan Hakim Pengadilan Negeri mencatat jumlah terbanyak dengan 7 hakim, yang terdiri dari 5 laki-laki dan 2 perempuan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan sebagai hakim masih terbatas, terutama pada posisi kepemimpinan seperti ketua dan wakil ketua. Meskipun terdapat keterlibatan perempuan sebagai hakim di tingkat Pengadilan Negeri, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam posisi-posisi strategis. Pengembangan karier dan peningkatan akses perempuan ke posisi pimpinan perlu diperkuat untuk menciptakan representasi yang lebih seimbang dalam sistem peradilan di wilayah ini.

### c. Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin

Kepolisian (serapan dari bahasa Belanda: politie) adalah badan petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah. Polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan dan masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah punyuh, menyeleksi, serta melakukan penyelidikan aktivitas kriminal hukum pidana dan perdata. Fungsi ini dikenal sebagai Kepolisian, polisi juga dipercayakan dengan berbagai kegiatan perizinan, pengawalan dan Pengaturan.

Peran polisi di masyarakat adalah sebagai penjaga keamanan ketertiban masyarakat dengan menindak para pelanggar hukum (perjudian, pencurian, narkoba, asusila,separatis, terorisme, pelanggaran lalu lintas, dll). Kadang kala pranata ini bersifat militaristis (Polisi Militer, *Carabinieri*) dan *paramilitaristis*.

Tabel 6.7 Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jenis Kepangkatan	Jumlah Polisi		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	<b>Perwira Tinggi (Pati) :</b>	-	-	-
A	Jenderal Polisi	-	-	-
B	Komisaris Jenderal Polisi	-	-	-
C	Inspektur Jenderal Polisi	-	-	-
D	Brigadir Jenderal Polisi	-	-	-
2	<b>Perwira Menengah (Pamen)</b>	4	-	4
A	Komisaris Besar Polisi	1	-	1
B	Ajun Komisaris Besar Polisi	3	-	3
C	Komisaris Polisi	-	-	-
3	<b>Perwira Pertama (Pama)</b>	55	3	58
A	Ajun Komisaris Polisi	24	1	25
B	Inspektur Satu Polisi	12	1	13
C	Inspektur Dua Polisi	19	1	20

Lanjutan				
No	Jenis Kepangkatan	Jumlah Polisi		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
4	<b>Bintara</b>	<b>367</b>	<b>19</b>	<b>386</b>
A	Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU)	76	-	76
B	Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA)	79	3	82
C	Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA)	105	2	107
D	Brigadir Polisi (BRIGPOL)	32	7	39
E	Brigadir Polisi Satu (BRIPTU)	52	7	59
F	Brigadir Polisi Dua (BRIPDA)	23	-	23
	<b>Jumlah</b>	<b>426</b>	<b>22</b>	<b>448</b>

*Sumber : Polres Pasaman Barat*

Tabel ini menunjukkan jumlah polisi berdasarkan jenis kepangkatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023, dengan total 448 personel. Dari jumlah tersebut, 426 adalah laki-laki dan 22 adalah perempuan, menunjukkan dominasi laki-laki dalam struktur kepolisian.

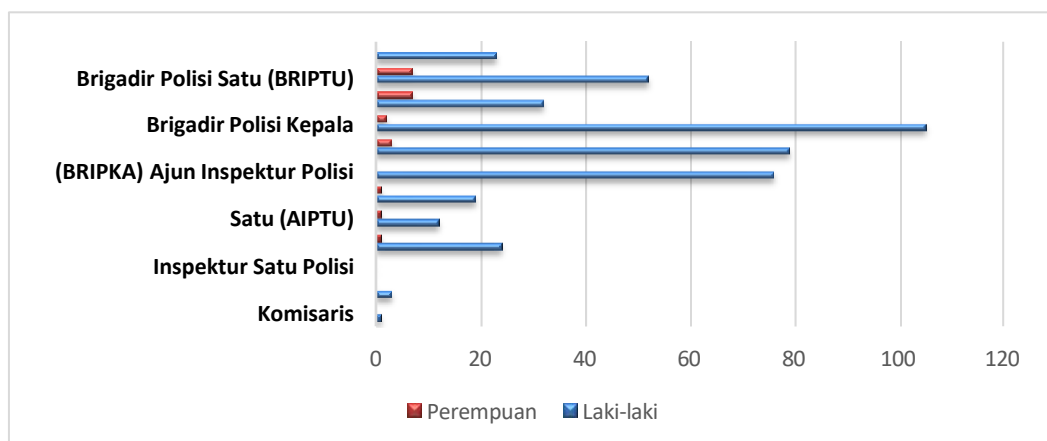
Terdapat 4 perwira menengah, semuanya laki-laki. Di antaranya 1 Komisaris Besar Polisi dan 3 Ajun Komisaris Besar Polisi. Total 58 perwira pertama, dengan 55 laki-laki dan 3 perempuan. Pangkat terbanyak adalah Ajun Komisaris Polisi (25 personel), di mana 1 di antaranya adalah perempuan. Bintara mendominasi jumlah personel dengan total 386 orang (367 laki-laki dan 19 perempuan). Pangkat Brigadir Polisi Kepala (BRIPKA) merupakan yang terbesar, dengan 107 personel, termasuk 2 perempuan. Pangkat Brigadir Polisi Satu (BRIPTU) dan Brigadir Polisi (BRIGPOL) masing-masing memiliki 7 perempuan, menunjukkan keterwakilan perempuan paling tinggi dalam level ini.



Keterwakilan perempuan masih rendah, hanya 22 orang dari 448 personel (4,91%). Perempuan sebagian besar berada di pangkat bintara, khususnya di level BRIPTU dan BRIGPOL, dengan sedikit keterwakilan di tingkat perwira pertama dan tidak ada di posisi perwira menengah atau tinggi.

Data ini menyoroti kesenjangan gender yang signifikan dalam struktur kepolisian, dengan dominasi laki-laki di seluruh tingkat kepangkatan. Keterwakilan perempuan lebih terlihat di pangkat bintara, tetapi hampir tidak ada di level perwira menengah dan tinggi. Untuk menciptakan kesetaraan gender dalam kepolisian, diperlukan upaya untuk meningkatkan akses perempuan ke pelatihan kepemimpinan dan promosi ke jabatan yang lebih tinggi. Program perekrutan dan pengembangan karier khusus bagi perempuan juga dapat membantu meningkatkan keterwakilan mereka dalam posisi strategis di kepolisian.

Gambar 6.3 Jumlah Polisi Menurut Jenis Kepangkatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023



Sumber : Polres Pasaman Barat

### **6.3 Peran dan Posisi di Lembaga Eksekutif**

Lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Saat ini, kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya serta menteri-menteri. Merujuk pengertian tersebut, presiden merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat atau memiliki kekuasaan eksekutif. Dalam arti luas, lembaga eksekutif mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Oleh sebab itu, secara sederhana, lembaga eksekutif dapat disebut sebagai pemerintah.

Kurangnya keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi pengambilan keputusan di sektor publik dapat berujung pada pembangunan keistimewaan terhadap perspektif dan kepentingan kaum laki-laki, serta investasi sumber-sumber daya nasional dengan pertimbangan keuntungan bagi kaum laki-laki.

Berdasarkan atas hal tersebut maka dirasakan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan dengan meningkatkan kuantitas perempuan dalam lembaga pemerintahan (Eksekutif).

#### **a. PNS Pusat Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin**

Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Jumlah PNS Pusat di Kabupaten Pasaman Barat menurut jenis jabatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6.8 Jumlah PNS Pusat Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jenis Jabatan PNS	Jumlah PNS		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Fungsional Umum	109	47	156
2	Fungsional Tertentu	130	250	380
3	Eselon I	-	-	-
4	Eselon II	-	-	-
5	Eselon III	5	0	5
6	Eselon IV	20	5	25
7	Eselon V	27	14	41
	<b>Jumlah</b>	<b>291</b>	<b>316</b>	<b>607</b>

Sumber : Instansi Vertikal se- Kab. Pasaman Barat

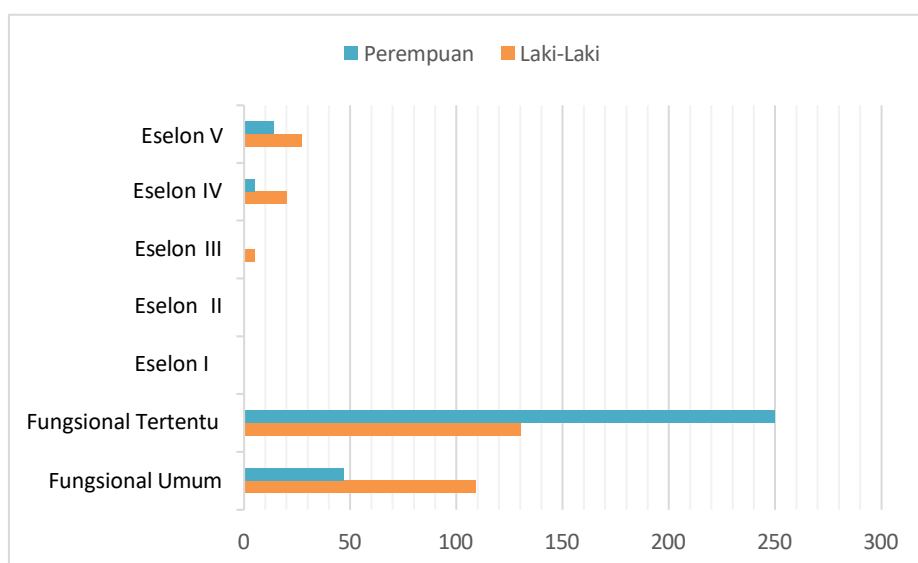
Tabel ini menunjukkan jumlah PNS pusat menurut jenis jabatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023, dengan total 607 PNS. Dari jumlah tersebut, 316 orang adalah perempuan dan 291 orang adalah laki-laki, menunjukkan partisipasi perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki secara keseluruhan.

Fungsional tertentu menjadi kategori jabatan terbesar dengan 380 PNS (130 laki-laki dan 250 perempuan), di mana perempuan mendominasi. Fungsional umum memiliki 156 PNS (109 laki-laki dan 47 perempuan), menunjukkan dominasi laki-laki pada kategori ini. Pada jabatan struktural, yaitu eselon III hingga V, keterlibatan perempuan dan laki-laki relatif seimbang di eselon IV (20 laki-laki dan 5 perempuan) dan eselon V (27 laki-laki dan 14 perempuan). Eselon III hanya diisi oleh 5 laki-laki tanpa keterwakilan perempuan, sedangkan eselon I dan II tidak memiliki PNS yang tercatat.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa perempuan lebih banyak terlibat dalam jabatan fungsional tertentu, namun pada jabatan struktural, terutama di tingkat eselon III, perempuan masih

kurang terwakili. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam jabatan eselon yang lebih tinggi diperlukan untuk mendorong kesetaraan gender dan memperkuat peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

Gambar 6.4 PNS Pusat Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023



Sumber : Instansi Vertikal se- Kab. Pasaman Barat

#### b. PNS Pusat Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Pangkat dan golongan/ruang ialah tingkat atau jenjang kedudukan seorang PNS dalam rangkaian sistem kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS.

Jumlah PNS pusat di Kabupaten Pasaman Barat menurut Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.9 Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Golongan Ruang Kepangkatan PNS	Jumlah PNS		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	I-a	-	-	-
2	I-b	-	-	-
3	I-c	-	-	-
4	I-d	-	-	-
	<b>Golongan I</b>	-	-	-
5	II-a	38	5	43
6	II-b	14	2	16
7	II-c	14	9	23
8	II-d	11	7	18
	<b>Golongan II</b>	<b>72</b>	<b>29</b>	<b>101</b>
9	III-a	50	69	119
10	III-b	43	29	72
11	III-c	26	57	83
12	III-d	63	70	133
	<b>Golongan III</b>	<b>188</b>	<b>215</b>	<b>403</b>
13	IV-a	49	60	109
14	IV-b	2	0	2
15	IV-c	-	-	-
16	IV-d	-	-	-
17	IV-e	-	-	-
	<b>Golongan IV</b>	<b>39</b>	<b>60</b>	<b>99</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>299</b>	<b>304</b>	<b>603</b>

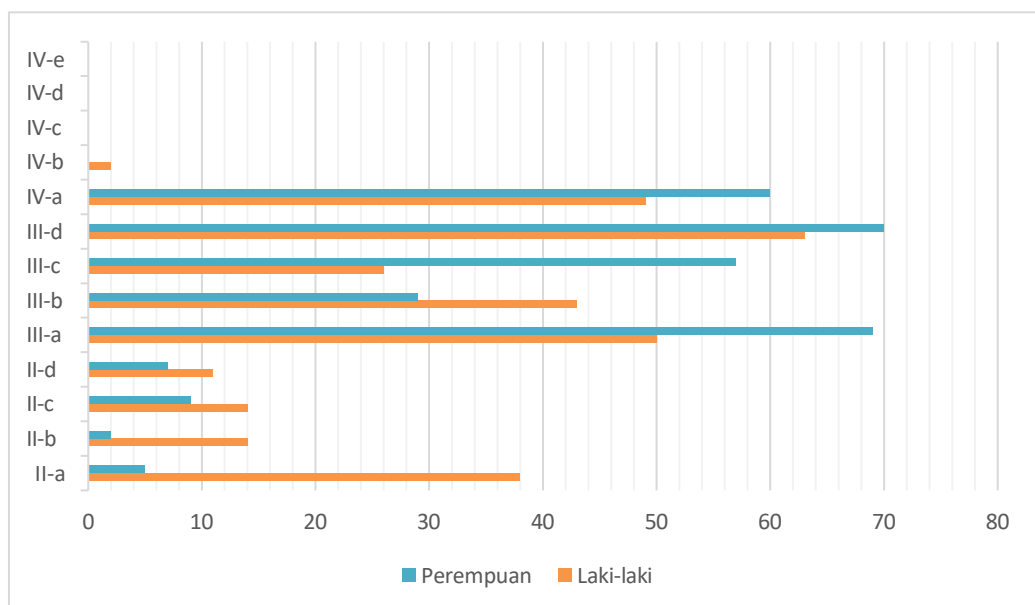
Sumber : Instansi Vertikal se- Kab. Pasaman Barat

Tabel ini menunjukkan jumlah PNS pusat menurut golongan ruang kepegangatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023, dengan total 603 PNS. Dari jumlah tersebut, 299 laki-laki dan 304 perempuan, menunjukkan komposisi yang hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan. Golongan III mendominasi dengan 403 PNS (188 laki-laki dan 215 perempuan), di mana mayoritas berada pada sub-golongan III/d dengan 133 orang. Golongan IV tercatat memiliki 99 PNS (39 laki-laki dan 60 perempuan), sedangkan Golongan I tidak memiliki

PNS yang tercatat.

Pada Golongan II, terdapat 101 PNS (72 laki-laki dan 29 perempuan), dengan mayoritas berada pada sub-golongan II/a dan II/b. Golongan IV menunjukkan keterwakilan perempuan yang lebih tinggi (60 perempuan dibandingkan 39 laki-laki), terutama pada sub-golongan IV/a dengan 109 orang. Secara keseluruhan, meskipun perempuan lebih banyak berada di golongan tinggi seperti Golongan IV, laki-laki tetap mendominasi dalam sub-golongan tertentu pada Golongan III dan II. Data ini mencerminkan partisipasi perempuan yang cukup baik dalam jabatan fungsional dan struktural, namun upaya lebih lanjut masih diperlukan untuk meningkatkan keseimbangan gender dalam semua tingkatan kepangkatan PNS di wilayah ini.

Gambar 6.5 Jumlah PNS Pusat Menurut Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2023



Sumber : Instansi Vertikal se- Kab. Pasaman Barat

### c. PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin

Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, atau dipekerjakan diluar Instansi induknya.

Tabel 6.10 Jumlah PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Jenis Jabatan PNS	Jumlah PNS		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Fungsional Umum	337	308	645
2	Fungsional Tertentu	695	2.512	3.207
3	Eselon I	0	0	0
4	Eselon II	26	4	30
5	Eselon III	110	62	172
6	Eselon IV	105	107	212
7	Eselon V	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1.273</b>	<b>2.993</b>	<b>4.266</b>

Sumber : BKPSDM Kab. Pasaman Barat

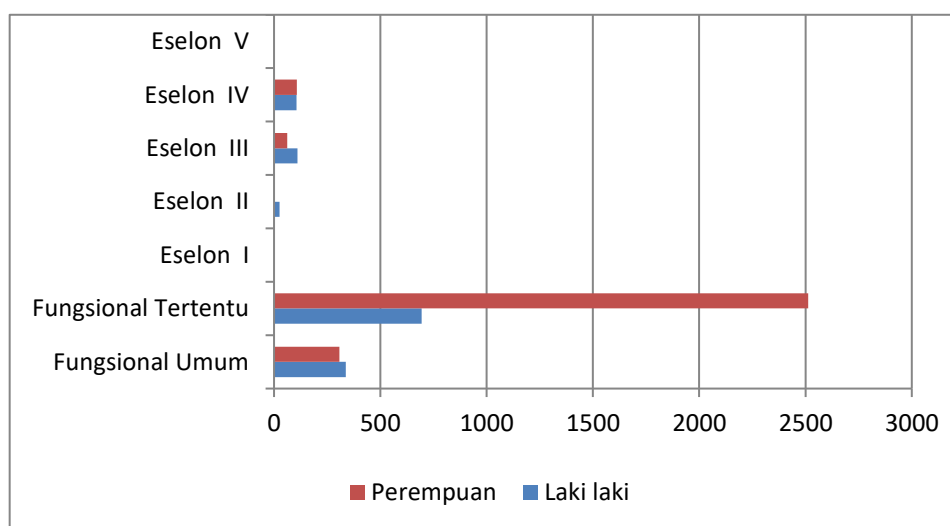
Tabel ini menunjukkan jumlah PNS daerah berdasarkan jenis jabatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dengan total 4.266 PNS. Dari jumlah tersebut, 2,993 orang adalah perempuan dan 1.273 orang adalah laki-laki, yang menunjukkan bahwa perempuan mendominasi jumlah PNS daerah. Fungsional tertentu menjadi jenis jabatan dengan jumlah terbesar, yaitu 3.207 orang, di mana 2.512 di antaranya adalah perempuan. Selain itu, fungsional umum juga memiliki jumlah yang cukup besar, dengan 645 PNS (308 perempuan dan 337 laki-laki), menunjukkan keterlibatan signifikan

perempuan di bidang ini.

Pada jabatan struktural, jumlah PNS laki-laki lebih terlihat dominan, terutama pada eselon II dan III. Eselon III memiliki total 202 PNS, dengan 136 laki-laki dan 66 perempuan, menandakan bahwa laki-laki lebih banyak menempati posisi kepemimpinan. Namun, pada eselon IV, jumlah perempuan dan laki-laki hampir seimbang, dengan 105 perempuan dan 107 laki-laki. Tidak ada PNS yang tercatat pada eselon I dan V.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa perempuan mendominasi jabatan fungsional, namun keterwakilan mereka masih terbatas pada jabatan struktural di level menengah ke atas. Upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam posisi eselon tinggi perlu ditingkatkan guna menciptakan kesetaraan gender di berbagai tingkatan pemerintahan.

Gambar 6.6 Jumlah PNS Daerah Menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : BKPSDM Kab. Pasaman Barat



#### d. PNS Daerah Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin

Jumlah PNS Daerah berdasarkan Golongan Ruang pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.11 Jumlah PNS Daerah Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Golongan Ruang Kepangkatan PNS	Jumlah PNS		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	I-a	-	-	-
2	I-b	-	-	-
3	I-c	-	-	-
4	I-d	2	1	3
	<b>Golongan I</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
1	II-a	9	7	16
2	II-b	20	4	24
3	II-c	51	84	135
4	II-d	58	94	152
	<b>Golongan II</b>	<b>138</b>	<b>189</b>	<b>327</b>
1	III-a	180	522	702
2	III-b	154	441	595
3	III-c	151	377	528
4	III-d	292	847	1.139
	<b>Golongan III</b>	<b>777</b>	<b>2.187</b>	<b>2.964</b>
1	IV-a	181	264	445
2	IV-b	133	249	382
3	IV-c	41	103	144
4	IV-d	1	-	1
5	IV-e	-	-	-
	<b>Golongan IV</b>	<b>356</b>	<b>616</b>	<b>972</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>1.273</b>	<b>2.993</b>	<b>4.266</b>

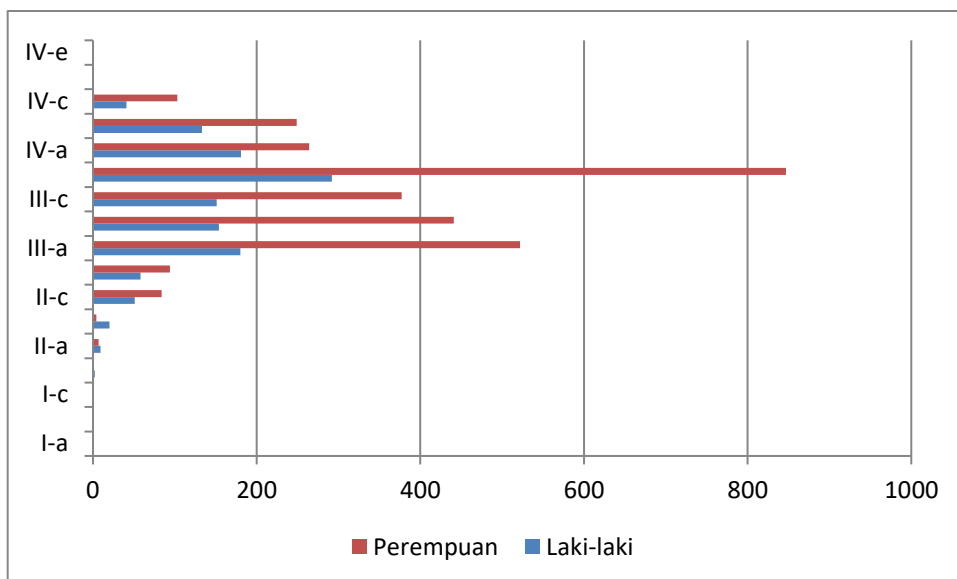
Sumber : BKPSDM Kab. Pasaman Barat

Tabel ini menunjukkan jumlah PNS daerah berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dengan total 4.266 PNS. Dari jumlah tersebut, 1.273 adalah laki-laki dan 2.993 adalah perempuan, yang menunjukkan dominan perempuan dalam komposisi PNS daerah. Golongan III memiliki jumlah terbanyak, yaitu 2.964 orang (777 laki-laki dan 2.187 perempuan), dengan sub-golongan III/d sebagai yang terbesar, yakni 1.193 orang.

Pada golongan IV, terdapat 972 PNS (356 laki-laki dan 616 perempuan), di mana sub-golongan IV/a mendominasi dengan 598 orang. Golongan II mencatat 445 PNS (181 laki-laki dan 264 perempuan), menunjukkan distribusi yang lebih merata antara laki-laki dan perempuan. Golongan I hanya memiliki 3 PNS dan menunjukkan jumlah yang sangat kecil dibandingkan golongan lainnya, dengan 2 laki-laki dan 1 perempuan di sub-golongan I/d.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa perempuan mendominasi hampir di semua golongan, terutama di golongan III dan IV, yang merupakan tingkatan jabatan menengah. Di sisi lain, meskipun perempuan mendominasi dalam jumlah keseluruhan, laki-laki masih terlihat lebih banyak di beberapa sub-golongan tertentu. Peningkatan representasi laki-laki dan perempuan secara seimbang di semua golongan, terutama pada golongan tertinggi seperti IV/b dan IV/a, dapat membantu menciptakan kesetaraan dan distribusi tenaga kerja yang lebih merata dalam struktur pemerintahan di wilayah ini.

Gambar 6.7 PNS Daerah Berdasar Golongan Ruang dan Jenis Kelamin Tahun 2024



#### e. PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah PNS Daerah menurut Tingkat Pendidikan pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.12 Jumlah PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Jenis Jabatan PNS	Jumlah PNS		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
1	SD	1	1	2
2	SLTP Sederajat	5	1	6
3	SLTA Sederajat	154	89	243
4	Diploma I, II	34	52	86
5	DIPLOMA III/Sarjana Muda/ Diploma IV	106	345	451
6	S1	817	2.289	3.106
7	S2	153	216	369
8	S3	3	-	3
	<b>Jumlah</b>	<b>1.273</b>	<b>2.993</b>	<b>4.266</b>

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat

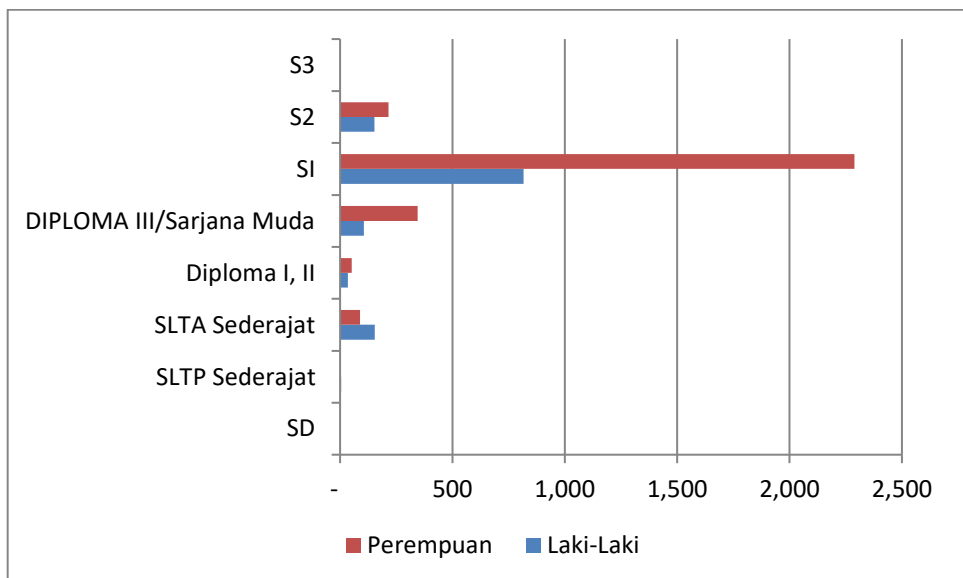
Tabel ini menunjukkan jumlah PNS daerah di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin, dengan total 4.266 PNS. Dari jumlah tersebut, 2.993 adalah perempuan dan 1.273 adalah laki-laki, yang menunjukkan dominasi perempuan dalam komposisi PNS di wilayah ini.

Mayoritas PNS memiliki pendidikan S1 (Sarjana), dengan total 3.106 orang, di mana 2.289 adalah perempuan dan 817 laki-laki. Selain itu, pendidikan Diploma III/Sarjana Muda dan Diploma IV menempati posisi kedua dengan 451 orang (106 laki-laki dan 345 perempuan), menunjukkan tingginya partisipasi perempuan di jenjang pendidikan ini. Sebaliknya, tingkat pendidikan yang lebih rendah, seperti SD dan SLTP sederajat, hanya mencatat total 8 PNS, dengan dominasi laki-laki. Pada jenjang S2, terdapat 369 PNS (153 laki-laki dan

216 perempuan), sedangkan hanya 3 orang PNS yang memiliki pendidikan S3, semuanya laki-laki.

Data ini mencerminkan bahwa pendidikan tinggi menjadi syarat utama bagi PNS di Kabupaten Pasaman Barat, dengan sebagian besar PNS berpendidikan S1 dan Diploma III/Sarjana Muda. Perempuan mendominasi pada jenjang pendidikan S1 dan Diploma III, sementara laki-laki lebih terlihat di jenjang pendidikan tertinggi (S3). Upaya lebih lanjut untuk mendorong lebih banyak perempuan mencapai pendidikan pascasarjana dan laki-laki untuk terlibat dalam jenjang pendidikan menengah dapat membantu menciptakan kesetaraan dalam pengembangan karier dan profesionalisme di kalangan PNS.

Gambar 6.8 PNS Daerah Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat

#### f. Camat

Camat merupakan pemimpin kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota.

Camat diangkat oleh Bupati atau Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Jumlah camat perempuan di Pasaman Barat bisa dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 6.13 Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sungai Beremas	1	-	1
2	Ranah Batahan	1	-	1
3	Koto Balingka	1	-	1
4	Sungai Aur	1	-	1
5	Lembah Melintang	-	1	1
6	Gunung Tuleh	1	-	1
7	Talamau	1	-	1
8	Pasaman	1	-	1
9	Luhak Nan Duo	-	1	1
10	Sasak Ranah Pasisie	1	-	1
11	Kinali	1	-	1
	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>

Sumber : DPMN Kab. Pasaman Barat

Tabel ini menunjukkan jumlah camat berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024, dengan total 11 camat yang tersebar di berbagai kecamatan. Dari total tersebut, 9 camat adalah laki-laki dan hanya 2 camat perempuan, menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi posisi kepemimpinan di tingkat kecamatan.

Perempuan sebagai camat hanya ditemukan di Kecamatan Luhak Nan Duo dan Kinali, sedangkan di sembilan kecamatan lainnya, posisi camat diisi oleh laki-laki. Data ini mencerminkan adanya kesenjangan gender dalam jabatan strategis pemerintahan daerah di tingkat kecamatan, di mana perempuan masih memiliki keterwakilan yang sangat terbatas.

Upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan sangat diperlukan guna mendorong kesetaraan gender dalam pemerintahan. Program pengembangan kepemimpinan bagi perempuan dan peluang promosi karier yang lebih inklusif bisa menjadi langkah penting untuk memastikan lebih banyak perempuan terlibat dalam posisi pengambil keputusan di masa depan.

#### **g. Walinagari**

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan Nagari sebagai organisasi pemerintahan terendah di Sumatera Barat sejak empat dasawarsa yang lalu memperlihatkan perkembangannya yang menarik, terutama dari sisi jumlah. Jika pada tahun 1976 di Sumatera Barat terdapat 543 Nagari dan dalam kurun waktu 30 tahun jumlahnya relatif tetap, bahkan terlihat berkurang pada tahun 2006 menjadi 519 Nagari. Pertambahan jumlah Nagari di Sumatera Barat tampak mulai bergerak naik pada tahun 2007 dan dari tahun ke tahun terus bertambah.

Bertambahnya jumlah nagari itu di Sumatera Barat tentu dengan berbagai latar belakang dan pertimbangan, namun bertambahnya jumlah Nagari itu tentulah hanya dalam perspektif nagari sebagai organisasi dan administrasi pemerintahan. Artinya pertambahan atau berkurangnya jumlah Nagari di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tidak senantiasa identik dengan konsep bertambah dan berkurangnya Nagari secara kualitas geneologis atau dalam perspektif adat dan budaya Minangkabau sebagai sebuah sistem.

Posisi walinagari dari kaum perempuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 6.14 Jumlah Wali Nagari Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan/Nagari	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sungai Beremas			
	1.Nagari Air Bangis	1	-	1
2	Ranah Batahan			
	1. Nagari Batahan	1	-	1
	- Nagari Batahan Utara	1	-	1
	-Nagari Batahan Tengah	1	-	1
	-Nagari Batahan Barat	1	-	1
	-Nagari Batahan Selatan	1	-	1
	2. Nagari Desa Baru	1	-	1
	- Desa Baru Barat	1	-	1
3	Koto Balingka			
	1. Nagari Parik	1	-	1
	- Nagari Koto Tengah	1	-	1
	- Nagari Koto Tuo	1	-	1
	- Nagari Koto Nan Duo	-	1	1
	- Nagari Pematang Panjang	1		1
	- Nagari Ranah Koto Tinggi	1	-	1
4	Sungai Aur			
	1. Nagari Sungai Aua	1	-	1
	- Nagari Salingka Muaro	1	-	1
	- Nagari Ranah Malintang	1	-	1
	- Nagari Ranah Air Haji	-	1	1
	- Nagari Kasik Putih Sungai Tanang	1	-	1
	- Nagari Aur Serumpun	1		1
	- Nagari Sikilang Sungai Aur Selatan	1	-	1
5	Lembah Melintang			
	1. Nagari Ujung Gading	1	-	1
	- Nagari Brastagi	1	-	1
	- Nagari Tampus Damai	1	-	1

	- Nagari Taluak Ambun	-	1	-
	- Nagari Koto gunung	-	1	-
	- Nagari Koto Sawah	1	-	1
	- Nagari Salido Saroha	-	1	
	- Nagari Kuamang Alai	1	-	1
	- Nagari Situak	1	-	1
6	Gunung Tuleh			
	1. Nagari Rabi Jonggor	1	-	1
	- Nagari Seberang Kenaikan	1	-	1
	- Nagari Bahoras	1	-	1
	- Nagari Ranah Sungai Magelang	-	1	1
	2. Nagari Muara Kiawai	1	-	1
	- Nagari Muaro Kiawai Barat	-	1	-
	- Nagari Muaro Kiawai Hilir	1	-	1
7	Talamau			
	1. Nagari Talu	1	-	1
	Nagari Persiapan			
	- Nagari Tabek Sirah	1	-	1
	- Nagari Sungai Janiah Talu	1	-	1
	2. Nagari Sinuruik	1	-	1
	3. Nagari Kajai	1	-	1
	Nagari Persiapan			
	- Nagari Kajai Selatan	1	-	1
	- Nagari Simpang Timbo Abu	1	-	1
8	Pasaman			
	1. Nagari Lingkuang Aua	1	-	1
	Nagari Persiapan			
	- Nagari Lingkuang Aua Baru	-	1	1
	- Nagari Lingkuang Aua Timur	-	1	1
	- Nagari Lingkuang Aua Bandarejo	-	1	1

	- Nagari Lingkuang Aua Jambak	1	-	1
	- Nagari Lingkuang Aua Koto alam	1	-	1
	- Nagari Lingkuang Aua Barat	-	1	1
	- Nagari Lingkuang Aua Hilia	1	-	1
	2. Nagari Aua Kuniang	1	-	1
	Nagari Persiapan			
	- Nagari Sukomananti	1	-	1
	- Nagari Pinaga	1	-	1
	- Nagari Lubuak Landua	1	-	1
	- Nagari Lembah Binuang	1	-	1
	3. Nagari Aia Gadang	1	-	1
	Nagari Persiapan			
	- Nagari Aia Gadang Barat	1	-	1
	- Nagari Aia Gadang Timur	1	-	1
9	Luhak Nan Duo			
	1. Nagari Kapa	1	-	1
	2. Nagari Koto Baru	1	-	1
	Nagari Persiapan			1
	- Nagari Giri Maju	-	1	1
	- Nagari Ophir	1	-	1
	- Nagari Mahakarya	1	-	1
	- Nagari Sariak	1	-	1
	- Nagari Sungai Talang	1	-	1
	- Nagari Jambak Selatan	1	-	1
	- Nagari Pujorahayu	1	-	1
10	Sasak Ranah Pasisia			
	1. Nagari Sasak	1	-	1
	Nagari Persiapan			
	- Nagari Padang Harapan	1	-	1
	- Nagari Ranah Pasisie	1	-	1
	- Nagari Maligi	1	-	1

<b>11</b>	Kinali			
	1. Nagari Kinali	1	-	1
	Nagari Persiapan			
	- Nagari Ampek Koto	1	-	1
	- Nagari Ampek Koto Barat	1	-	1
	- Nagari Bancah Kariang	1	-	1
	- Nagari Mudiak Labuah	1	-	1
	- Nagari Tandikek	-	1	1
	- Nagari Langgam Sepakat	1	-	1
	- Nagari Langgam Saiyo	1	-	1
	- Nagari Anam Koto Selatan	1	-	1
	- Nagari Sigunanti	1	-	1
	- Nagari Koto Gadang Jaya	1	-	1
	- Nagari Anam Koto Utara	1	-	1
	- Nagari Bandua Balai	1	-	1
	- Nagari Bunuik	1	-	1
	- Nagari Padang Canduh	1	-	1
	- Nagari Limau Purut	1	-	1
	2. Nagari Katiagan	1	-	1
	<b>Kabupaten Pasaman Barat</b>	<b>77</b>	<b>13</b>	<b>90</b>

*Sumber : DPMN Kab. Pasaman Barat*

Tabel ini menunjukkan jumlah wali nagari di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 berdasarkan kecamatan/nagari dan jenis kelamin, dengan total 90 wali nagari. Dari jumlah tersebut, 77 adalah laki-laki dan 13 adalah perempuan, menandakan dominan laki-laki dalam kepemimpinan di tingkat kecamatan dan nagari.

Kecamatan dengan keterwakilan perempuan antara lain: Koto Balingka dengan 1 perempuan di Nagari Koto Nan Duo. Sungai Aur dengan 1 perempuan di Nagari Ranah Air Haji.

Lembah Melintang mencatat beberapa perempuan di posisi wali nagari Salido Saroha. Gunung Tuleh dan Pasaman juga mencatat perempuan sebagai wali nagari di beberapa nagari.

Secara keseluruhan, laki-laki masih mendominasi jabatan camat dan wali nagari di sebagian besar wilayah, sementara perempuan hanya terlibat di 16 posisi, terutama pada nagari tertentu di kecamatan Lembah Melintang, Kinali, dan Pasaman. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan sudah mulai terlibat dalam kepemimpinan di tingkat nagari, keterwakilan mereka masih rendah. Untuk mendorong kesetaraan gender, diperlukan program pelatihan kepemimpinan dan kesempatan promosi yang lebih luas bagi perempuan, terutama di wilayah yang masih minim keterlibatan perempuan. Selain itu, dukungan kebijakan yang mendukung perempuan dalam peran kepemimpinan dapat mempercepat tercapainya kesetaraan dalam pemerintahan daerah.

#### **h. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, bahwa Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) terdiri dari Baperjakat Instansi Pusat, Baperjakat Instansi Daerah Provinsi, Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten atau Kota.

Tugas pokok Baperjakat adalah memberikan pertimbangan kepada pejabat pembina kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah. Kemudian, Baperjakat bertugas memberikan pertimbangan kepada

pejabat yang berwenang dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural Eselon I dan Eselon II.

Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.15 Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Nama Jabatan	Jumlah PNS		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Baperjakat	5	1	6
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

Sumber : BKPSDM Kabupaten Pasaman Barat

Sesuai SK Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/ /BUP-PASBAR/2024 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, jumlah pengurus dan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pasaman Barat sebanyak anggota 6 orang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

#### i. **Pengurus dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa/ Bamus Nagari**

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) atau Bamus Nagari merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/nagari. BPD/Bamus dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD/Bamus merupakan lembaga baru di desa/nagari pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD/Bamus adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Anggota BPD/Bamus terdiri dari Kepala Jorong, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD/Bamus adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD/Bamus tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa/Wali Nagari dan Perangkat Desa/Nagari.

Tabel 6.16 Pengurus dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa/ Bamus Nagari Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025

No	Kecamatan/Nagari	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kecamatan Sungai Beremas			
	1. Nagari Aia Bangih	3	1	4
2	Kecamatan Ranah Batahan			
	1. Nagari Batahan	3	2	5
	2. Nagari Batahan Barat	4	1	5
	3. Nagari Batahan Utara	4	1	5
	4. Nagari Batahan Tengah	3	2	5

5. Nagari Batahan Selatan	4	1	5
6. Nagari Desa Baru	4	1	5
7. Nagari Desa Baru Barat	3	2	5
3 Kecamatan Koto Balingka			
1. Nagari Parit	4	1	5
2. Nagari Koto Tengah	4	1	5
3. Nagari Koto Tuo	4	1	5
4. Nagari Koto Nan Duo	4	1	5
5. Nagari Pematang Panjang	4	1	5
6. Nagari Ranah Koto Tinggi	3	2	5
4 Kecamatan Lembah Melintang			
1. Ujung Gading	4	1	5
2. Brastagi Ujung Gading	4	1	5
3. Tampus Damai Ujung Gading	4	1	5
4. Taluak Ambun Ujung Gading	4	1	5
5. Koto Gunung Ujung Gading	3	2	5
6. Koto Sawah Ujung Gading	4	1	5
7. Salido Saroha Ujung Gading	4	1	5
8. Kuamang Alai Ujung Gading	4	1	5
9. Situak Ujung Gading	4	1	5
5 Kecamatan Sungai Aur			
1. Sungai Aua	4	1	5
2. Salingka Muaro	4	1	5
3. Ranah Malintang	4	1	5
4. Ranah Aia Haji	4	1	5
5. Kasikputih Sungaitanang	4	1	5
6. Aua Sarumpun	4	1	5
7. Sikilang Sungai Aur Selatan	4	1	5
6 Kecamatan Gunung Tuleh			
1. Muaro Kiawai	4	1	5
2. Rabi Jonggor	4	1	5
3. Seberang Kenaikan	4	1	5
4. Bahoras	3	2	5
5. Ranah Sungai Magelang	4	1	5
6. Muaro Kiawai Barat	4	1	5
7. Muaro Kiawai Hilir	4	1	5
7 Pasaman			
1. Lingkuang Aua	3	2	5



2. Aua Kuniang	3	2	5
3. Aia Gadang	3	2	5
4. Lingkuang Aua Timur	3	2	5
5. Lingkuang Aua Baru	4	1	
6. Lingkuang Aua Bandarajo	4	1	5
7. Lingkuang Aua Jambak	4	1	5
8. Lingkuang Aua Koto Dalam	4	1	5
9. Lingkuang Aua Barat	3	2	5
10. Lingkuang Aua Hilia	4	1	5
11. Sukomananti Aua Kuniang			
12. Aia Gadang Barat	4	1	5
13. Aia Gadang Timur	3	2	5
14. Pinaga Aua Kuniang	4	1	5
15. Lubuak Landua Aua Kuniang	4	1	5
16. Lembah Binuang Aua Kuniang	3	2	5
8 Kecamatan Talamau			
1. Kajai	2	3	5
2. Talu	4	1	5
3. Sinuruik			
4. Simpang Timbo Abu Kajai	4	1	5
5. Kajai Selatan	2	3	5
6. Sungai Janiah Talu	4	1	5
7. Tabek Sirah Talu	3	2	5
9 Kecamatan Kinali			
1. Kinali	4	1	5
2. Katiagan			
3. Ampek Koto	4	1	5
4. Ampek Koto Barat	4	1	5
5. Bancah Kariang	4	1	5
6. Mudiak Labuah	4	1	5
7. Tandikek	4	1	5
8. Langgam Sepakat	4	1	5
9. Langgam Saiyo	4	1	5
10. Anam Koto Selatan	4	1	5
11. Sigunanti	4	1	5
12. Koto Gadang Jaya	4	1	5

13. Anam Koto Utara	4	1	5
14. Bandua Balai	4	1	5
15. Bunuik	4	1	5
16. Padang Canduh	4	1	5
17. Limau Purut	4	1	5
10 Kecamatan Luhak Nan Duo			
1. Koto Baru	4	1	5
2. Kapa			
3. Giri Maju	4	1	5
4. Ophir	4	1	5
5. Mahakarya	4	1	5
6. Sariak	4	1	5
7. Sungai Talang	4	1	5
8. Jambak Selatan	3	2	5
9. Pujorahayu	4	1	5
11 Kecamatan Sasak Ranah Pasisie			
1. Sasak	4	1	5
2. Padang Harapan	4	1	5
3. Ranah Pasisie	4	1	5
4. Maligi	4	1	5
- Nagari Maligi	1		
<b>Kabupaten Pasaman Barat</b>	<b>338</b>	<b>105</b>	<b>443</b>

*Sumber : DPMN Kab. Pasaman Barat*

Tabel ini menunjukkan jumlah pemimpin nagari di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2025, dengan total 443 orang, terdiri dari 338 laki-laki dan 105 perempuan. Data ini menunjukkan dominasi laki-laki dalam kepemimpinan nagari di hampir seluruh kecamatan, dengan hanya 23,7% keterwakilan perempuan.

Keterwakilan perempuan tersebar merata di beberapa kecamatan, seperti: Ranah Batahan, dengan 12 perempuan dari berbagai nagari, misalnya Batahan Tengah dan Desa Baru Barat. Koto Balingka dan Sungai Aur memiliki beberapa perempuan di posisi pemimpin nagari,

dengan rata-rata 1-2 perempuan per nagari. Talamau menampilkan keterwakilan perempuan yang lebih tinggi, terutama di Nagari Kajai dan Kajai Selatan, yang masing-masing memiliki 3 perempuan. Pasaman dan Luhak Nan Duo juga mencatat beberapa perempuan di posisi penting, namun secara umum laki-laki tetap mendominasi.

Meskipun ada keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan di beberapa nagari, laki-laki masih mendominasi dengan proporsi signifikan di seluruh kecamatan. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan lokal, misalnya melalui pelatihan kepemimpinan, pemberdayaan perempuan, dan kebijakan afirmatif untuk membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan dalam posisi strategis.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa meskipun perempuan mulai terlibat, kesenjangan gender dalam kepemimpinan nagari masih terlihat, terutama di kecamatan-kecamatan dengan keterwakilan perempuan yang sangat rendah. Program promosi kepemimpinan bagi perempuan dapat membantu memperbaiki distribusi kekuasaan dan memastikan kesetaraan gender dalam pemerintahan lokal di Kabupaten Pasaman Barat.

# BAB VII

## BIDANG HUKUM, SOSIAL-BUDAYA DAN LINGKUNGAN



# JUSTICE

lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. sed do eiusmod tempor  
incididunt ut labore et dolore magna aliqua. ut enim ad minim veniam, quis  
ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor  
in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore  
eu fugiat nulla pariatur.

## **BAB VII**

### **BIDANG HUKUM, SOSIAL BUDAYA DAN LINGKUNGAN**

#### **7.1 Bidang Hukum dan Sosial Budaya**

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.

**a. Penghuni Lembaga Permasyarakatan ( Lapas) Menurut Jenis dan Jenjang Pendidikan**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sedangkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Tabel berikut ini menyajikan data tentang Penghuni Lapas menurut jenis lapas dan jenjang pendidikan.

Tabel 7.1 Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Lapas dan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Lapas	Pendidikan					Jumlah
		<SD	SD	SLT P	SLT A	PT	
1	Umum (Laki-laki)	42	51	33	42	2	170
2	Anak	0	0	0	0	0	0
3	Wanita	0	3	1	3	0	7
	Total	42	54	34	45	2	177

*Sumber : Lapas Kelas III Talu Kab. Pasaman Barat*

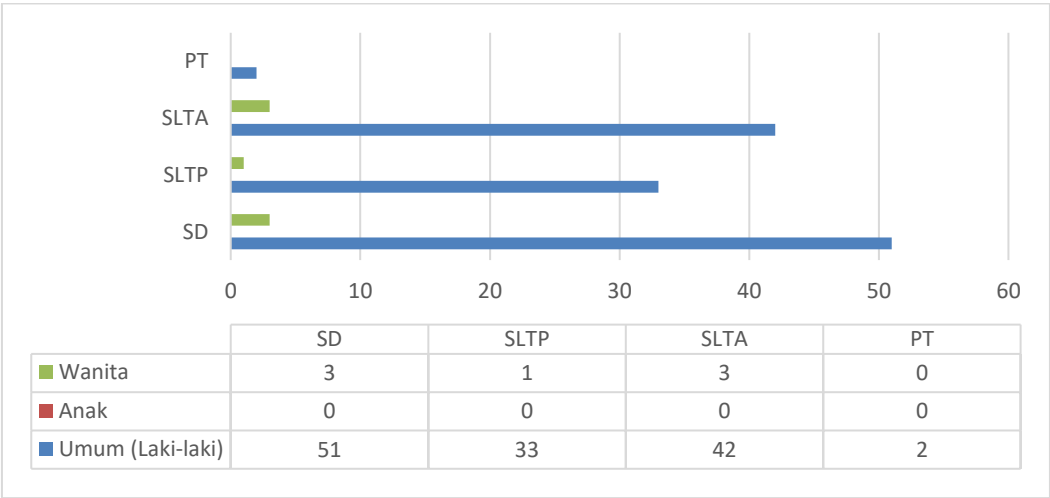
Tabel ini menunjukkan jumlah penghuni Lapas di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 berdasarkan jenis lapas dan jenjang pendidikan, dengan total 177 penghuni. Dari jumlah tersebut, 170 orang adalah laki-laki dan hanya 7 orang perempuan, sementara tidak tercatat penghuni di kategori anak. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penghuni Lapas adalah laki-laki.

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas penghuni memiliki pendidikan SD (42 orang) dan SMP/Sederajat (34 orang), sedangkan 45

orang berpendidikan SMA/ sederajat, dan 2 orang memiliki pendidikan perguruan tinggi (PT). Sebagian besar penghuni dengan pendidikan rendah, yaitu <SD dan SD, mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat pendidikan mungkin menjadi salah satu faktor yang terkait dengan perilaku kriminal atau kesulitan sosial.

Data ini juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan sangat rendah, hanya 2 orang, yang masing-masing memiliki pendidikan SD dan SMA. Secara keseluruhan, terdapat keterkaitan antara rendahnya pendidikan dan jumlah penghuni lapas, menyoroti pentingnya akses pendidikan dan program rehabilitasi untuk mencegah residivisme. Peningkatan kesempatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penghuni juga perlu diperhatikan guna mempersiapkan mereka untuk reintegrasi yang lebih baik ke masyarakat.

Gambar 7.1 Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Lapas dan Jenjang Pendidikan Tahun 2024



Sumber : Lapas Kelas III Talu Kab. Pasaman Barat

## b. Jumlah Penghuni LAPAS menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur

Tabel berikut ini menyajikan data tentang Penghuni Lapas menurut jenis lapas dan kelompok umur.

Tabel 7.2 Jumlah Penghuni LAPAS Menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur Tahun 2024

No	Jenis Lapas	Kelompok umur (Tahun)						
		18-22	23-27	28-30	31-35	36-40	41-50	>50
1	Umum (Laki-laki)	21	30	33	30	18	28	10
2	Anak	0	0	0	0	0	0	0
3	Wanita	0	2	0	0	2	3	0
	<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>31</b>	<b>10</b>

Sumber : Lapas Kelas III Talu Kab. Pasaman Barat

Tabel ini menunjukkan jumlah penghuni Lapas di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 berdasarkan jenis lapas dan kelompok umur, dengan total 156 penghuni. Penghuni laki-laki mendominasi seluruh kategori dengan jumlah 149 orang, sementara penghuni perempuan hanya 7 orang, dan tidak ada penghuni di kategori anak.

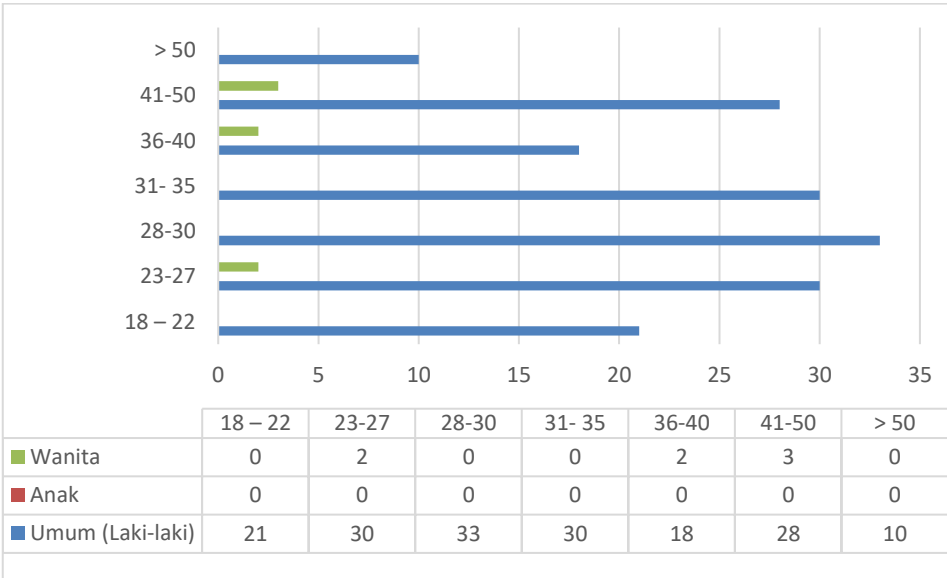
Dari sisi distribusi umur, kelompok 28-30 tahun mencatat jumlah tertinggi, yaitu 33 orang, diikuti oleh kelompok 23-27 tahun (32 orang) dan 41-50 tahun (35 orang). Kelompok usia 18-22 tahun dan 36-40 tahun juga cukup signifikan dengan masing-masing 21 dan 20 orang, sementara kelompok >50 tahun merupakan yang paling sedikit, hanya 10 orang. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penghuni berada dalam usia produktif (23-50 tahun), yang bisa mengindikasikan bahwa peluang ekonomi yang terbatas dan faktor sosial mungkin mempengaruhi perilaku kriminal pada



kelompok usia ini.

Secara keseluruhan, data ini menggarisbawahi pentingnya program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan kerja bagi penghuni, khususnya pada kelompok usia produktif, agar mereka dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat dan mengurangi risiko residivisme. Selain itu, peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum di usia muda bisa menjadi langkah preventif untuk menekan jumlah penghuni Lapas di masa mendatang.

Gambar 7.2 Jumlah Penghuni LAPAS Menurut Jenis Lapas dan Kelompok Umur Tahun 2024



Sumber : Lapas Kelas III Talu Kab. Pasaman Barat

**c. Jumlah Penghuni Lapas menurut Jenis Lapas dan Jenis Kasus**

Tabel berikut ini menyajikan data tentang Penghuni Lapas menurut jenis lapas dan jenis kasus.

Tabel 7.3 Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Lapas dan Jenis Kasus Tahun 2024

No	Lapas	Kasus							
		Pembu- nuhan	Pencu- rian	Pemer- kosaan	Asusila	NAPZA	KDRT	Koru psi	Lainnya
1	Umum (Laki- laki)	1	49	0	18	79	0	1	22
2	Anak	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Wanita	1	0	0	0	1	0	0	5
	<b>Jumlah</b>	2	49	0	18	80	0	1	27

*Sumber : Lapas Kelas III Talu Kab. Pasaman Barat*

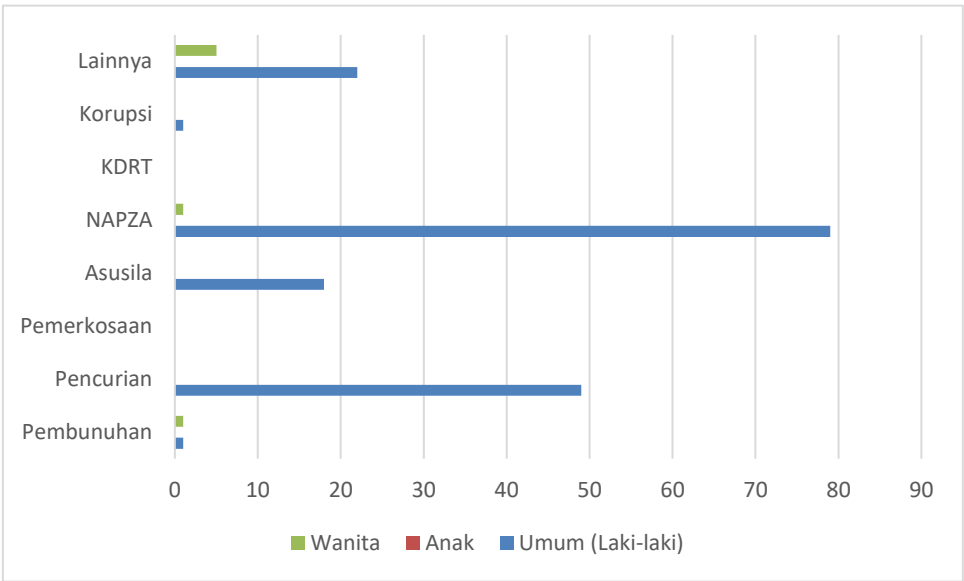
Tabel ini menunjukkan jumlah penghuni Lapas di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 berdasarkan jenis kasus, dengan total 177 kasus yang tercatat. Dari jumlah tersebut, mayoritas penghuni berasal dari Lapas umum (laki-laki) dengan 170 kasus, sedangkan wanita hanya menyumbang 7 kasus dan tidak ada kasus yang melibatkan anak-anak.

Kasus NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) mendominasi, dengan 80 penghuni yang terlibat. Kasus pencurian juga cukup signifikan, dengan 49 penghuni. Selain itu, terdapat 1 penghuni yang terlibat dalam kasus korupsi. Kasus lainnya mencatat 27 penghuni, menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus yang beragam dan tidak dikategorikan secara spesifik.

Data ini menunjukkan bahwa kasus NAPZA merupakan penyebab terbesar dari penghuni Lapas, mengindikasikan bahwa masalah narkoba masih menjadi tantangan serius di wilayah ini. Selain itu, kasus pencurian juga cukup tinggi, yang mungkin terkait dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Untuk mengurangi jumlah penghuni di masa mendatang, diperlukan program rehabilitasi khusus bagi pengguna NAPZA dan pelatihan keterampilan bagi pelaku kasus ekonomi seperti pencurian, agar mereka dapat kembali berfungsi dalam masyarakat. Selain itu, peningkatan program pencegahan dan edukasi hukum di masyarakat dapat membantu menekan angka kasus dan jumlah penghuni Lapas.

Gambar 7.3 Jumlah Penghuni Lapas Menurut Jenis Lapas dan Jenis Kasus Tahun 2024



Sumber : Lapas Kelas III Talu Kab. Pasaman Barat

#### d. Jumlah Jenis Lapas menurut Kabupaten

Tabel berikut ini menyajikan data tentang jumlah Lapas di Pasaman Barat.

Tabel 7.4 Jumlah Jenis Lapas di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kabupaten	Lapas Umum (Laki-laki)	Lapas Anak	Lapas Wanita
1	Lapas Terbuka Kelas IIB	1	-	-
2	Lapas Kelas III Talu	1	-	-

Sumber : *Lapas Kelas III Talu, Lapas Terbuka Pasaman Barat*

Dari tabel 7.4 di atas terlihat bahwa Pasaman Barat hanya mempunyai lapas khusus untuk Lapas Umum (laki-laki). Sedangkan Lapas Anak dan Lapas Wanita tidak tersedia di Pasaman Barat.

#### e. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Di Indonesia, dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan, Dinas Sosial mengelompokkan penduduk yang menjadi target, yaitu kelompok penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Menurut Dinas Sosial, setidaknya terdapat 22 definisi operasional dan karakteristik dari masing-masing jenis PMKS, salah satunya adalah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE). Faktor-faktor yang menyebabkan wanita menjadi WRSE adalah perceraian/kematian suami, tingkat pendidikan rendah, pekerjaan dengan gaji rendah.

Dalam sebuah keluarga miskin, perempuan senantiasa sebagai katup penyelamat bagi perekonomian keluarga dikarenakan oleh berbagai peran

perempuan miskin yang diambil dalam keluarga meliputi: pertama, sebagai pengelola keuangan keluarga; kedua, sebagai penanggung jawab seluruh pekerjaan domestik; ketiga, sebagai pencari nafkah keluarga; dan keempat, sebagai salah satu simpul jaringan sosial yang penting dalam hal transfer sosial, khususnya pada masa-masa kritis dan krisis.

**Tabel 7.5 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023**

No	Kecamatan	Jumlah
1	Sungai Beremas	2.941
2	Ranah Batahan	2.860
3	Koto Balingka	4.186
4	Sungai Aur	2.941
5	Lembah Melintang	4.124
6	Gunung Tuleh	3.029
7	Talamau	993
8	Pasaman	6.009
9	Luhak Nan Duo	2.797
10	Sasak Ranah Pasisie	2.330
11	Kinali	6.901
	<b>Kab. Pasaman Barat</b>	<b>39.111</b>

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat*

Tabel ini menunjukkan jumlah perempuan rawan sosial ekonomi di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023 berdasarkan kecamatan, dengan total 39.111 perempuan yang masuk dalam kategori ini. Data ini mengidentifikasi perempuan yang rentan secara sosial dan ekonomi, yang berpotensi menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya dan peluang.

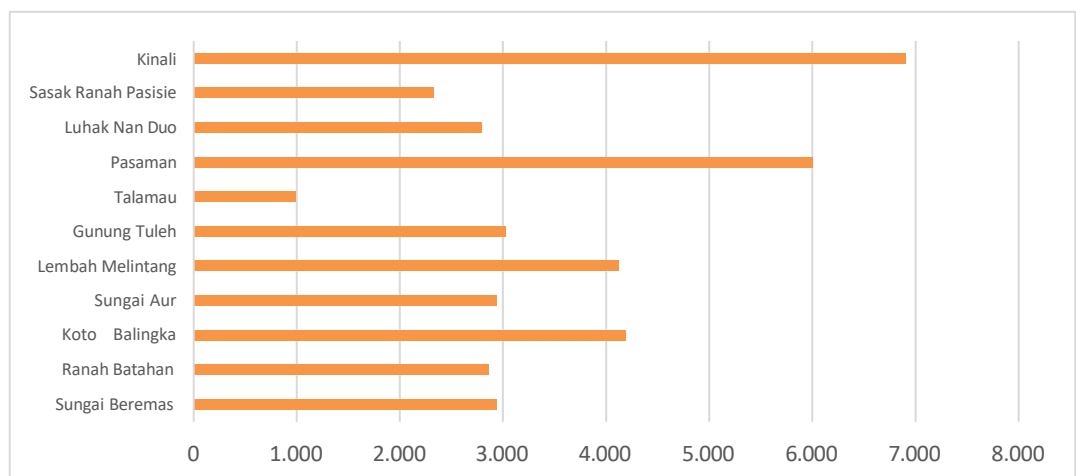
Kecamatan Kinali mencatat jumlah tertinggi dengan 6.901 perempuan yang rawan secara sosial dan ekonomi. Kecamatan Pasaman

berada di urutan kedua dengan 6.009 perempuan, diikuti oleh Koto Balingka (4.186) dan Lembah Melintang (4.124). Beberapa kecamatan dengan jumlah lebih sedikit namun tetap signifikan adalah Gunung Tuleh (3.029), Sasak Ranah Pasisie (2.330), dan Ranah Batahan (2.860).

Data ini menyoroti adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan di berbagai wilayah Kabupaten Pasaman Barat, terutama di Kinali dan Pasaman yang mencatat jumlah perempuan rawan paling tinggi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi program pemberdayaan perempuan, seperti pelatihan keterampilan dan akses terhadap peluang kerja, guna membantu mereka keluar dari situasi rentan ini.

Selain itu, peningkatan akses terhadap layanan sosial dan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial, akan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan di wilayah ini. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan untuk fokus pada kecamatan dengan jumlah tertinggi, sambil tetap memperhatikan wilayah lainnya agar kesenjangan sosial-ekonomi dapat dikurangi secara merata.

**Gambar 7.4 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Menurut Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023**



*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat*

#### **f. Penyandang Disabilitas (Penda)**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang dipandang belum berperspektif hak asasi manusia, lebih bersifat belas kasihan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Sesuai undang-undang tersebut, definisi penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik, yang dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis ABK yang terdapat pada Kabupaten Pasaman Barat adalah Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Grahita, Tuna Daksa/ Cacat Fisik, Tuna Laras, Tuna Ganda, Autis, dan Gangguan Komunikasi. Berikut penjelasan dari beberapa istilah disabilitas tersebut di atas.

1. Tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi

tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal sekalipun.

2. Tuna rungu adalah istilah yang merujuk pada orang yang tidak dapat mendengar. Seseorang dikatakan tuna rungu apabila ia tidak mampu atau kurang mampu dalam mendengar suara. Secara medis, tuna rungu atau ketunarunguan artinya kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar yang disebabkan oleh kerusakan dan non fungsi dari sebagian atau seluruh alat pendengaran.
3. Tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak, tetapi bisa pula muncul ketika dewasa. Anak dengan tunagrahita dapat dikenali dari proses berpikir dan belajar yang lebih lambat dibandingkan anak-anak lain seusianya. Tak hanya itu, seorang anak tunagrahita juga kurang cakap dalam mempraktikkan keterampilan saat menjalani kegiatan sehari-hari secara normal.
4. Tuna daksa adalah kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Ketidaksempurnaan ini hanyalah secara fisik (tulang, sendi otot), sedangkan fungsi pancaindra penderita tuna daksa masih normal sehingga kelainan ini kerap disebut juga sebagai cacat tubuh, disabilitas fisik.
5. Tuna laras adalah anak yang mengalami gangguan atau hambatan emosi dan berkelainan tingkah laku, sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Beberapa ciri tunalaras adalah suka berkelahi, memukul, punya karakter pemarah, sering melanggar aturan, tidak mau bekerja sama, dan sebagainya.



6. Tunaganda (*double handicap* atau *multiple handicap*) adalah anak yang memiliki kombinasi kelainan (baik dua jenis kelainan atau lebih) yang menyebabkan adanya masalah pendidikan yang serius, sehingga dia tidak hanya dapat diatas dengan suatu program pendidikan khusus untuk satu kelainan saja, melainkan harus didekati dengan variasi program pendidikan sesuai kelainan yang dimiliki. Berberapa macam tunaganda antara lain ; tunanetra-tunawicara, tunanetra-tunarungu, tunanetra-tunadaksa, tunanetra-tunagrahita, tunanetra-tunalaras, tunanetra-kesulitan belajar khusus.
7. Autisme adalah gangguan perilaku dan interaksi sosial akibat kelainan perkembangan saraf otak. Kondisi ini menyebabkan penderitanya sulit berkomunikasi, berhubungan sosial, dan belajar. Autisme disebut juga sebagai gangguan spektrum autisme atau *autism spectrum disorder* (ASD). Istilah spektrum sendiri mengacu pada gejala dan tingkat keparahan penyakit ini yang berbeda-beda pada tiap penderitanya. Gangguan yang termasuk dalam ASD adalah sindrom Asperger, gangguan perkembangan pervasif (PPD-NOS), gangguan autistik, dan *childhood disintegrative disorder* (sindrom Heller). Kondisi ini sering kali dikaitkan juga dengan sindrom savant.
8. Yang dimaksud dengan gangguan komunikasi meliputi berbagai lingkup masalah yaitu gangguan bicara, bahasa, dan mendengar. Gangguan bahasa dan bicara melingkupi gangguan artikulasi, gangguan mengeluarkan suara, afasia (kesulitan menggunakan kata-kata, biasanya karena memar atau luka pada otak), dan keterlambatan di dalam berbicara atau berbahasa. Keterlambatan bicara dan bahasa tergantung dari beberapa penyebab, termasuk di dalamnya adalah faktor lingkungan atau gangguan pendengaran.

Jenis dan jumlah anak berkebutuhan khusus ( ABK) Menurut Kecamatan Tahun 2024

Jenis ABK ( Anak Berkebutuhan Khusus )																										
No.	Kecamatan	Tuna Netra		Tuna Rungu		Tuna Grahita		Tuna Daksa/Cacat Fisik		Tuna Laras		Anak yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata dan/atau bukan istimewa		Tuna Ganda		Autis		Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas/GP PH (Attention and Hyperactivity Disorder/ADHD)		Lamban Belajar		Kesulitan Belajar		Gangguan Komunikasi		Total
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	
1	Sungai Beremas							1	3																	4

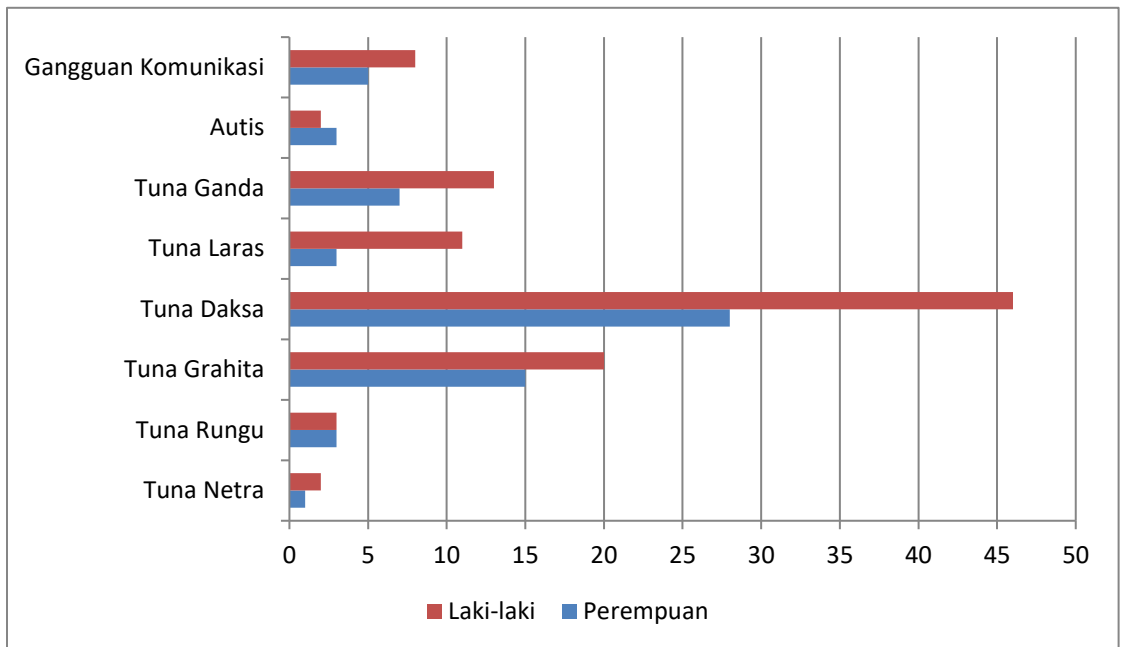
Pasaman Barat	1	2	3	9	15	20	28	46	3	11	-	-	7	13	3	-	2	-	-	-	-	-	5	8	176
---------------	---	---	---	---	----	----	----	----	---	----	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Sumber Data : Dinas Sosial

Data Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 mencatat ada 176 orang Anak Berkebutuhan Khusus, dimana banyak terdapat pada Disabilitas Daksa dengan total sebanyak 74 orang (42,04%), dengan rincian Perempuan berjumlah 28 orang (15,90%) dan laki laki berjumlah 46 orang (26,13%). Urutan kedua diikuti oleh Tuna Grahita sebanyak 35 orang (19,88%) dan Tuna ganda sebanyak 20 orang (11,36%). Urutan keempat adalah tuna laras sebanyak 14 orang atau sebesar 7,95% yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, sedangkan jumlah anak berkebutuhan khusus di urutan terakhir berdasarkan jumlah adalah tuna Netra sebanyak 5 orang 2,84%.

Analisis ini menggarisbawahi pentingnya dukungan layanan kesehatan dan pendidikan yang inklusif di Kabupaten Pasaman Barat, terutama di kecamatan dengan jumlah kasus tinggi seperti Gunung Tuleh dan Pasaman. Pemerintah perlu mengembangkan program rehabilitasi dan pelatihan keterampilan khusus bagi individu dengan kebutuhan khusus, termasuk memperkuat pelatihan bagi pendidik dan tenaga kesehatan. Selain itu, peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kebutuhan khusus ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung perkembangan individu dengan gangguan atau kecerdasan istimewa.

Gambar 7.5 Jenis dan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

Data Jenis dan Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan Tahun 2024 pada Kabupaten Pasaman Barat dapat terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.7 Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sungai Beremas	7	1	8
2	Ranah Batahan	14	26	40
3	Koto Balingka	3	6	9
4	Sungai Aur	21	12	33
5	Lembah Melintang	41	35	76
6	Gunung Tuleh	28	41	69
7	Talamau	27	60	87
8	Pasaman	19	38	57
9	Luhak Nan Duo	2	-	2
10	Sasak Ranah Pasisie	10	20	30
11	Kinali	7	17	24
Pasaman Barat		179	256	435

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

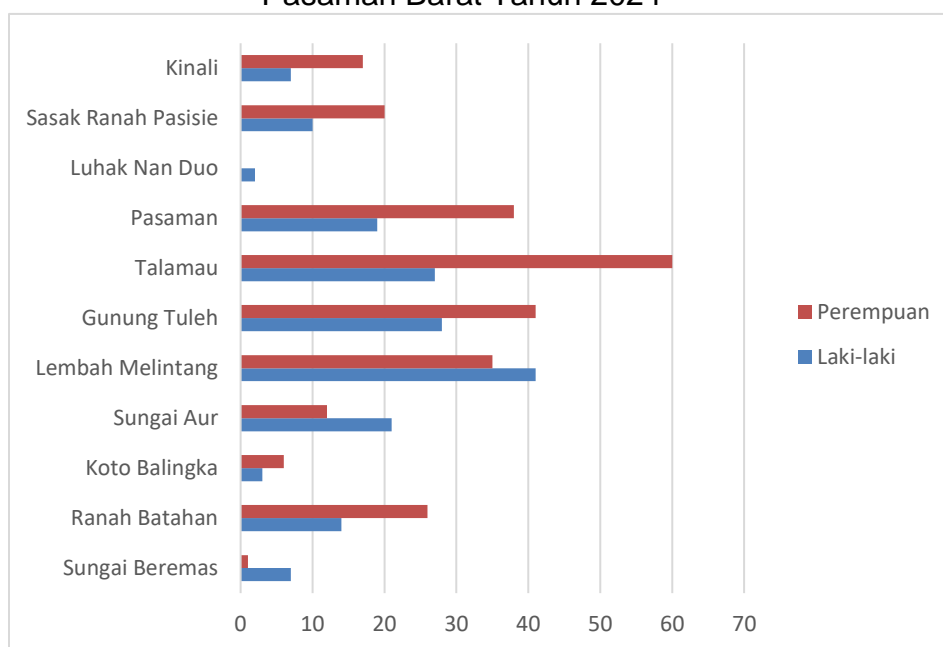
Tabel ini menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin, dengan total 435 penyandang disabilitas. Dari jumlah tersebut, 179 orang adalah laki-laki dan 256 orang perempuan, yang menunjukkan sedikit dominasi laki-laki dalam jumlah penyandang disabilitas.

Kecamatan dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak adalah Talamau sebanyak 87 orang (27 laki-laki dan 60 perempuan). Kecamatan Lembah Melintang berada di urutan kedua dengan 76 orang (41 laki-laki dan 35 perempuan). Kecamatan Gunung Tuleh dan Pasaman juga mencatat jumlah signifikan, yaitu masing-masing 76 dan 57 orang. Di sisi lain, kecamatan dengan jumlah penyandang disabilitas paling sedikit adalah Luhak Nan Duo dengan hanya 2 orang.

Data ini menyoroti pentingnya perhatian khusus terhadap kecamatan Talamau dan Lemnah Melintang, yang memiliki jumlah penyandang disabilitas tinggi. Program-program yang berfokus pada rehabilitasi, pemberdayaan ekonomi, dan pendidikan inklusif sangat dibutuhkan di wilayah tersebut. Pemerintah juga perlu memastikan akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan dan layanan sosial untuk para penyandang disabilitas, terutama di kecamatan dengan angka disabilitas tinggi.

Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan sosial terhadap penyandang disabilitas guna menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Pemerintah daerah juga dapat mengembangkan program pelatihan keterampilan dan peluang kerja untuk membantu penyandang disabilitas berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

**Gambar 7.6** Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Pasaman Barat Tahun 2024



*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat*

Tabel 7.8      Jumlah Penyandang Disabilitas/Cacat Anak dibawah Umur 18 Tahun Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sungai Beremas	3	1	4
2	Ranah Batahan	4	2	6
3	Koto Balingka	19	6	25
4	Sungai Aur	-	-	-
5	Lembah Melintang	3	1	4
6	Gunung Tuleh	21	16	37
7	Talamau	7	1	8
8	Pasaman	27	15	42
9	Luhak Nan Duo	10	4	14
10	Sasak Ranah Pasisie	6	11	17
11	Kinali	13	18	31
Pasaman Barat		113	75	188

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

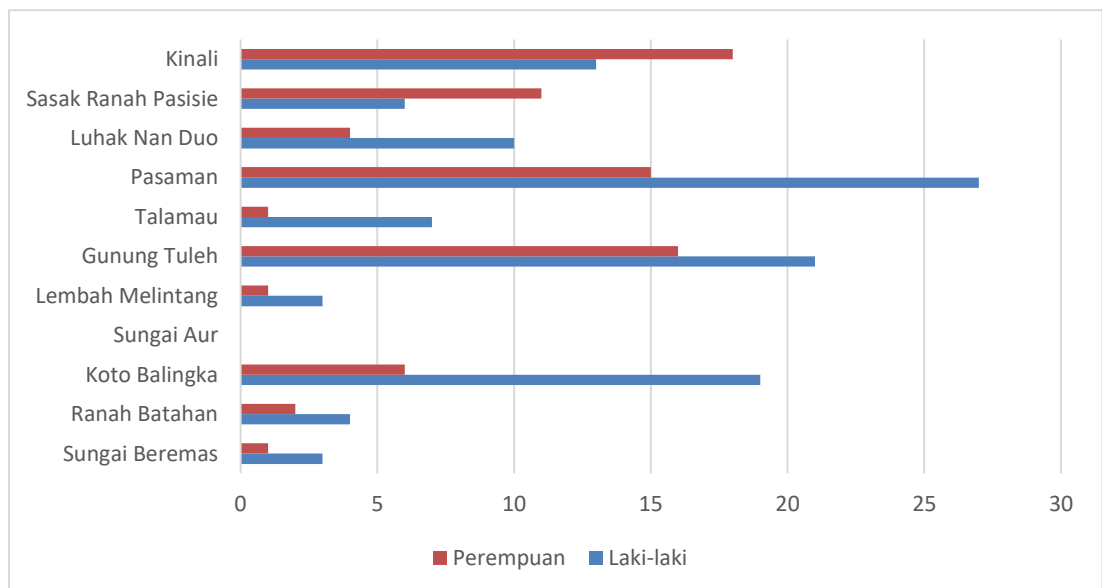
Tabel ini menunjukkan jumlah penyandang disabilitas atau cacat anak di bawah 18 tahun di Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2024 berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin. Total terdapat 188 anak yang terdata sebagai penyandang disabilitas, terdiri dari 113 anak laki-laki dan 75 anak perempuan, yang menunjukkan proporsi lebih tinggi pada anak laki- laki.

Jumlah penyandang disabilitas anak ini bervariasi di setiap kecamatan. Kecamatan Pasaman mencatat jumlah tertinggi dengan 42 anak (27 laki-laki dan 15 perempuan). Kecamatan Gunung Tuleh juga mencatat angka yang cukup tinggi dengan 37 anak (21 laki-laki dan 5 perempuan). Kecamatan Kinali berada di urutan berikutnya dengan 31 anak. Di sisi lain, beberapa kecamatan seperti Sungai Aur dan Gunung

Tuleh mencatat nol kasus, sementara Sungai Beremas dan Lembah Melintang masing-masing memiliki jumlah yang lebih kecil, yaitu 2 hingga 3 anak.

Kondisi ini menekankan pentingnya intervensi dini dan layanan kesehatan inklusif untuk anak-anak dengan disabilitas, terutama di kecamatan dengan jumlah tinggi seperti Pasaman dan Kinali. Selain itu, peningkatan akses pendidikan inklusif dan dukungan sosial dapat membantu anak-anak penyandang disabilitas berkembang secara optimal. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bekerja sama dalam menyediakan layanan rehabilitasi dan program penguatan keterampilan agar anak-anak ini bisa berpartisipasi aktif di masyarakat.

**Gambar 7.7** Jumlah Penyandang Disabilitas/Cacat Anak dibawah Umur 18 Tahun Menurut Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat*



## **7.2 Bidang Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan**

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mungkin tak ada yang menandingi Indonesia dalam hal kekayaan alam. Negeri ini begitu melimpah dengan kekayaan alam yang dapat dijadikan sumber penghidupan.

Lingkungan hidup adalah satu-satunya isu global yang mungkin bisa menyaingi isu terorisme. Dibalik dari dampaknya, penataan lingkungan hidup yang semrawut bisa memakan korban lebih besar ketimbang aksi terorisme. Banjir, longsor, badai dan puting beliung adalah beberapa contoh bencana alam yang disebabkan adanya gangguan pada lingkungan hidup.

Pemanfaatan sumber daya alam harus berwawasan lingkungan. Kita tidak seharusnya memanfaatkan sumber daya alam yang ada semuanya disekitar kita. Walaupun untuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui, kita harus menghemat dalam pemakaiannya, karena tidak dapat diperbaharui, ataupun kalau bisa dibentuk kembali memerlukan jutaan tahun lamanya.

Tabel 7.9 Data Terpilah Bidang SDA dan Lingkungan Tahun 2019

No.	Isu Strategis	Dukungan Pemerintah	Peran Masyarakat Terhadap Isu	
			L	P
1.	Mitigasi dan Adaptasi			
	"Tanam dan Peihara" Pohon ;	-	-	-
	Pelestarian hutan	-	-	-
	Pengendalian Penduduk	-	-	-
	Pengendalian Pengelolaan Sampah	Sosialisasi Program Sedekah Sampah	1200	1500
2.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Potensi SDA Daerah			
	Obat-obatan	-	-	-
	Kosmetika	-	-	-
	Makanan dan minuman	-	-	-
3.	Pemanfaatan sumber daya air dan energy			
	Penghematan air	-	-	-
	Pelestarian air	-	-	-
	Daur ulang air	-	-	-
	Penggunaan bahan ramah lingkungan-hindari kimia//B3	-	-	-
	Pendayagunaan energi bio dan diperbarukan	-	-	-
	Efisiensi transportasi	-	-	-
4.	Pengelolaan Sampah			
	<i>Reduce</i> (mengurangi sampah)	-	-	-
	<i>Reuse</i> ( <i>menggunakan ulang</i> )	Bank Sampah Tuah Basamo Kapa dan Bank Sampah Induk DLH	8	4
	<i>Recycle</i> ( <i>mendaaur ulang</i> )	-	-	-
	<i>Replant</i> ( <i>menanam kembali</i> )	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Pasaman Barat Catatan  
: Data Tahun 2024 tidak tersedia

# Bab VIII

## Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Anak



## **BAB VIII**

### **KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **8.1 Kekerasan Terhadap Perempuan**

Kekerasan pada perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan 1993).

Kekerasan pada perempuan yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi (Apong, dalam Martha 2003:113). Tindak kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi sepanjang siklus kehidupan perempuan. Dalam bab ini kita akan membahas kekerasan terhadap perempuan, baik perempuan sebagai korban maupun pelaku kekerasan terhadap perempuan itu sendiri.

##### **1. Perempuan Sebagai Korban**

Tindak kekerasan yang menempatkan seorang perempuan sebagai korban dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Kekerasan ini baik yang berupa kekerasan fisiko psikologis, finansial, spiritual, maupun seksual, terutama pada seorang perempuan dapat mengakibatkan dampak kesehatan yang sangat berat.

Dampak fisik umumnya tidak meneolok, tapi dampak psikologisnya yang pada umumnya cukup berat dan membutuhkan intervensi dari para

profesional dibidang kesehatan, sosial, dan yuridis. Dalam bidang yuridis seorang perempuan yang mengalami masalah kekerasan mempunyai beberapa hak yang dapat dipergunakannya untuk melindungi agar dampak psikologis yang dialaminya tidak bertambah parah. Jika dilihat dari sisi perempuan sebagai korban, maka kekerasan tersebut dapat dibagi lagi ke dalam beberapa kelompok.

#### a. Kelompok Umur

Tabel 8.1 Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelompok Umur			Total
		Anak (<18 Tahun)	Remaja (18-25 Tahun)	25 Tahun ke atas	
1	Sungai Beremas	1	-	1	2
2	Ranah Batahan	1	-	-	1
3	Koto Balingka	4	-	1	5
4	Sungai Aur	3	-	-	3
5	Lembah Melintang	10	1	-	11
6	Gunung Tuleh	2	-	1	3
7	Talamau	3	-	1	4
8	Pasaman	26	1	12	39
9	Luhak Nan Duo	4	1	1	6
10	Sasak Ranah Pasisie	3	-	-	3
11	Kinali	11	-	-	11
	Kab. Pasaman Barat	68	3	17	88

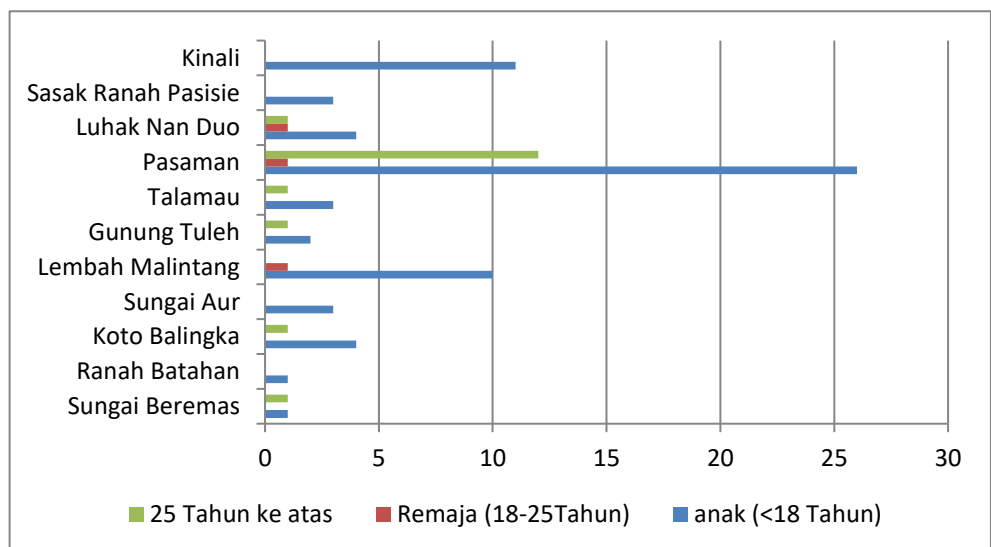
Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024

Tabel ini menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2024 berdasarkan kelompok umur. Total terdapat 88 kasus kekerasan, dengan mayoritas korban adalah anak

di bawah 18 tahun sebanyak 68 kasus. Korban dari kelompok usia 18-25 tahun (remaja) tercatat 3 kasus, sementara korban dari usia 25 tahun ke atas berjumlah 17 kasus. Kecamatan Pasaman mencatat jumlah kasus tertinggi, yaitu 39 kasus kekerasan, yang sebagian besar menimpa anak-anak. Pasaman dan Kinali juga mencatat jumlah signifikan dengan masing-masing 26 dan 11 kasus. Sementara itu, kecamatan seperti Sungai Beremas dan Ranah Batahan mencatat masing-masing 1 kasus.

Data ini menyoroti perlunya intervensi khusus dalam menangani kekerasan terhadap anak perempuan, mengingat mereka adalah kelompok korban terbanyak. Selain itu, program pencegahan kekerasan melalui edukasi di sekolah dan masyarakat perlu diperkuat, terutama di kecamatan dengan angka kekerasan tinggi seperti Pasaman dan Koto Balingka. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memastikan layanan perlindungan korban dan akses keadilan, termasuk konseling dan dukungan hukum bagi para korban.

**Gambar 8.1** Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



*Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024*

## b. Tingkat Pendidikan

Tabel 8.2 Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

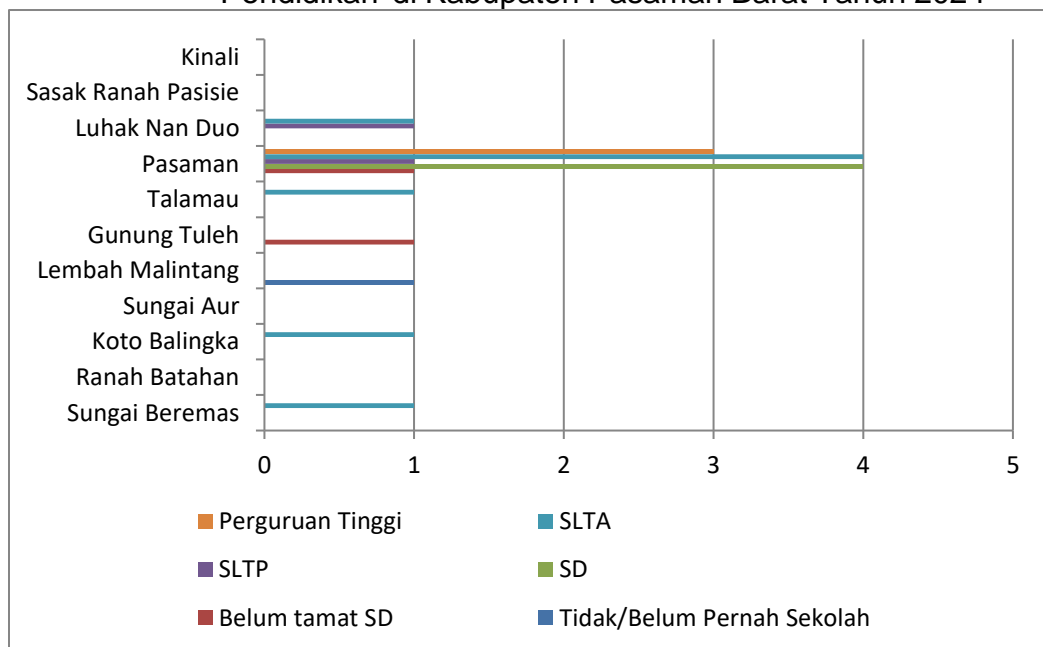
No.	Kecamatan	Tingkat Pendidikan						Total
		Tidak/ Belum Sekola h	Belum Tamat SD	SD/ Sederaj at	SMP/ Sederajat	SMA/ Sederajat	Pergur uan Tinggi	
1.	Sungai Beremas	-	-	-	-	1	-	1
2	Ranah Batahan	-	-	-	-	-	-	-
3	Koto Balingka	-	-	-	-	1	-	1
4	Sungai Aur	-	-	-	-	-	-	-
5	Lembah Melintang	1	-	-	-	-	-	1
6	Gunung Tuleh	-	1	-	-	-	-	1
7	Talamau	-	-	-	-	1	-	1
8	Pasaman	-	1	4	1	4	3	13
9	Luhak Nan Duo	-	-	-	1	1	-	2
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	-	-	-	-
11	Kinali	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>20</b>

Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam Tabel 8.2, terdapat 20 korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2024 . Korban paling banyak ditemukan pada kelompok pendidikan SMA/ sederajat, yaitu sebanyak 8 orang. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dengan pendidikan menengah cenderung lebih rentan terhadap kekerasan dibandingkan kelompok pendidikan lain. Selain itu, korban yang tidak atau belum sekolah SD/ sederajat tercatat sebanyak 4 orang, mengindikasikan adanya kerentanan di kalangan perempuan dengan akses pendidikan yang rendah.

Distribusi kekerasan tersebar di beberapa kecamatan, dengan Kecamatan Pasaman memiliki jumlah korban tertinggi, yaitu 13 orang. Selain itu, Kecamatan Luhak Nan Duo dan Gunung Tuleh masing-masing mencatatkan 2 korban. Sementara beberapa kecamatan lain seperti Sungai Beremas, Koto Balingka, Lembah Melintang, Gunung Tuleh, dan Talamau hanya mencatatkan 1 kasus. Kondisi ini mencerminkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Pasaman Barat tidak merata, dan lebih dominan di kecamatan tertentu. Akses pendidikan yang lebih baik mungkin dapat menjadi salah satu langkah pencegahan, karena terlihat bahwa korban dengan pendidikan tinggi sangat sedikit atau bahkan tidak tercatat dalam tabel ini.

Gambar 8.2 Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024



Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024



### c. Status Pekerjaan

Tabel 8.3 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Pekerjaan			
		Tidak bekerja	Mengurus rumah tangga	Mahasiswa	Pedagang
1	Sungai Beremas	-	1	-	-
2	Ranah Batahan	-	-	-	-
3	Koto Balingka	-	1	-	-
4	Sungai Aur	-	-	-	-
5	Lembah Melintang	-	-	-	1
6	Gunung Tuleh	1	-	-	-
7	Talamau	-	-	-	1
8	Pasaman	3	6	-	4
9	Luhak Nan Duo	-	2	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	-
11	Kinali	-	-	-	-
<b>Pasaman Barat</b>		<b>4</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>6</b>

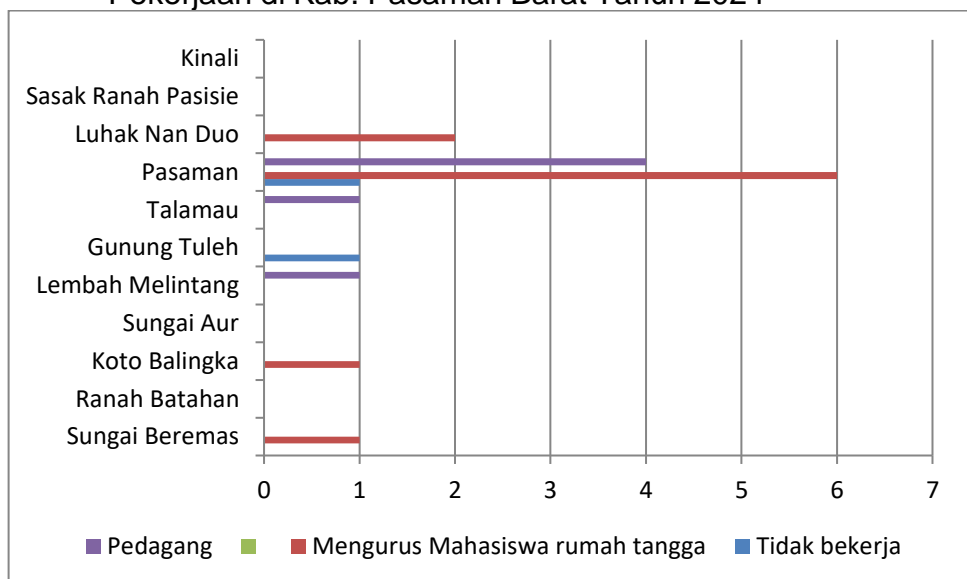
Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 8.3 tentang Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Status Pekerjaan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, tercatat bahwa jumlah total korban kekerasan sebanyak 20 orang. Distribusi korban tertinggi berada pada kelompok perempuan yang mengurus rumah tangga dengan total 10 orang. Hal ini mengindikasikan bahwa perempuan yang berperan dalam pekerjaan domestik berisiko tinggi

mengalami kekerasan. Selain itu, terdapat 4 korban dari kelompok tidak bekerja, menunjukkan bahwa ketiadaan pekerjaan formal mungkin meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kekerasan.

Dari sisi sebaran kecamatan, Kecamatan Pasaman mencatat jumlah korban terbanyak, yaitu 13 orang, dengan rincian korban berasal dari kelompok tidak bekerja, pedagang, dan pengurus rumah tangga. Beberapa kecamatan lain seperti Sungai Beremas, Koto Balingka, Lembah Melintang Gunung Tuleh, Talamau dan Luhak Nan Duo juga menunjukkan adanya kasus di berbagai kelompok pekerjaan. Sementara itu, mengurus rumah tangga, tidak bekerja, dan pedagang, juga tercatat sebagai korban meskipun dalam jumlah kecil, masing-masing 1 orang. Data ini mengisyaratkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi lintas sektor pekerjaan, meskipun perempuan yang tidak bekerja atau bekerja di sektor domestik lebih rentan.

**Gambar 8.3 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Pekerjaan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024**



*Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024*

#### d. Status Perkawinan

Tabel 8.4 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Status Perkawinan		
		Belum Kawin	Kawin	Cerai
1	Sungai Beremas	-	1	-
2	Ranah Batahan	-	-	-
3	Koto Balingka	-	1	-
4	Sungai Aur	-	-	-
5	Lembah Melintang	1	-	-
6	Gunung Tuleh	-	1	-
7	Talamau	-	1	-
8	Pasaman	2	10	1
9	Luhak Nan Duo	-	2	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-
11	Kinali	-	-	-
<b>Kab. Pasaman Barat</b>		<b>3</b>	<b>16</b>	<b>1</b>

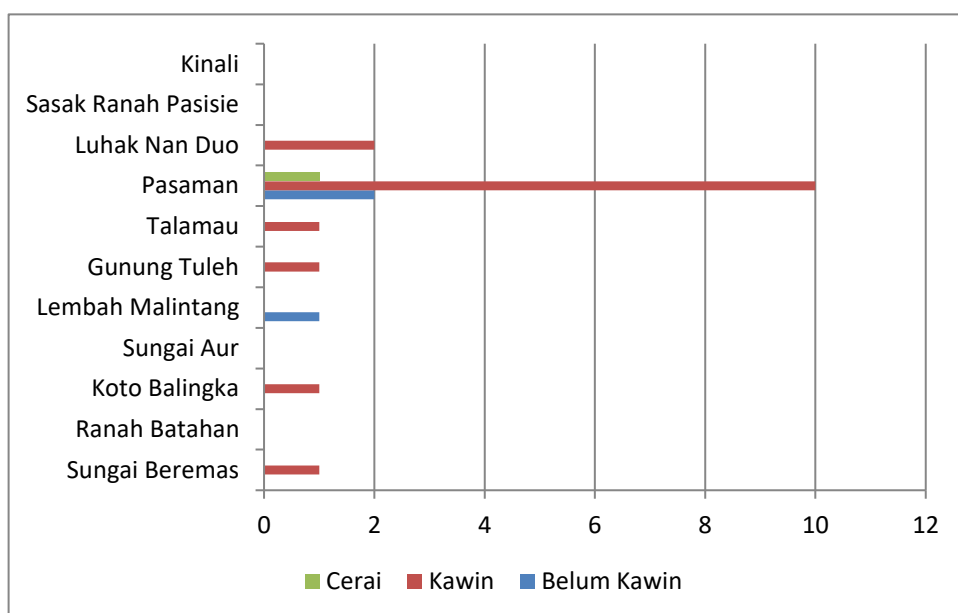
Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 8.4 tentang Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Status Perkawinan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, terdapat total 20 korban. Sebagian besar korban berasal dari kelompok perempuan yang sudah menikah, yaitu sebanyak 16 orang, yang menunjukkan bahwa perempuan dalam ikatan perkawinan lebih berisiko mengalami kekerasan. Selain itu, ada 3 korban dari kelompok belum menikah dan 1 korban yang berasal dari kelompok cerai. Hal ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dalam berbagai status perkawinan, namun perempuan menikah terlihat paling rentan.

Secara geografis, Kecamatan Pasaman mencatat jumlah korban terbanyak dengan 13 orang, diikuti oleh Luhak Nan Duo dengan

2 korban. Kecamatan lainnya mencatat kasus di beberapa kategori status perkawinan. Data ini mengisyaratkan bahwa status perkawinan bukan jaminan bagi perempuan terhindar dari kekerasan, bahkan perempuan yang menikah justru menghadapi risiko lebih tinggi. Hal ini bisa menjadi indikator penting bagi kebijakan perlindungan perempuan, terutama di lingkungan rumah tangga dan perkawinan.

Gambar 8.4 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Status Perkawinan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024



Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024

**e. Jenis Kekerasan**

Tabel 8.5      Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	1	-
2	Ranah Batahan	-	-	-	-		-
3	Koto Balingka	-	-	-	-	1	-
4	Sungai Aur	-	-	-	-	-	-
5	Lembah Melintang	-	-	1	-	-	-
6	Gunung Tuleh	-	-	1	-	-	-
7	Talamau	-	-	-	-	-	1
8	Pasaman	6	3	1	-	2	3
9	Luhak Nan Duo	2	-	-	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	-	-	-
11	Kinali	-	-	-	-	-	-
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>4</b>

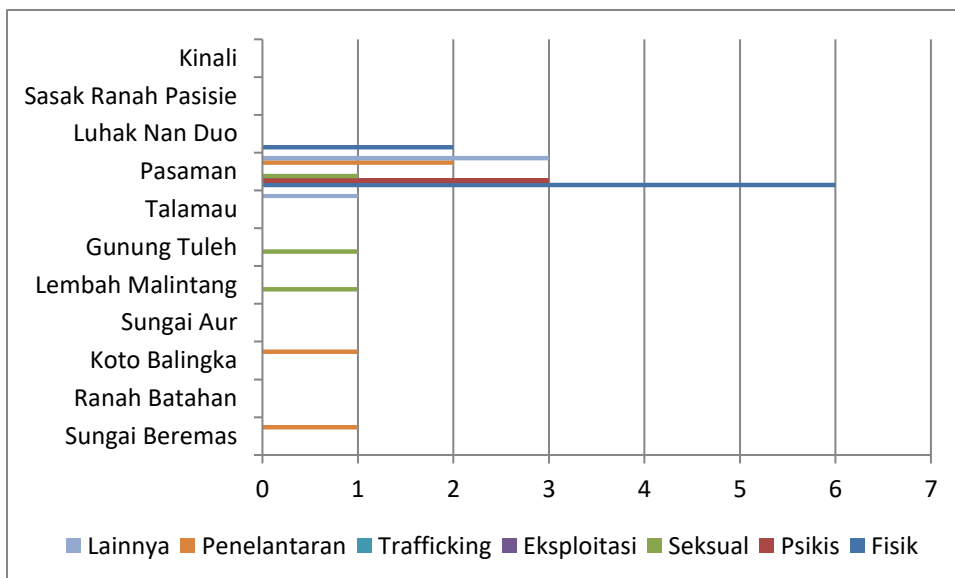
Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 8.5 tentang Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Jenis Kekerasan di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, terlihat bahwa terdapat beragam jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan. Kekerasan fisik dan psikis merupakan jenis kekerasan yang paling sering terjadi, dengan masing-masing 10 kasus. Ini menunjukkan bahwa kekerasan yang bersifat langsung terhadap tubuh dan mental perempuan merupakan masalah signifikan di wilayah ini.

Selain itu, terdapat 5 kasus kekerasan seksual, yang menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender juga menjadi isu penting.

Secara geografis, kekerasan terjadi di beberapa kecamatan dengan jenis yang berbeda-beda. Kecamatan Pasaman mencatat kasus tertinggi dengan berbagai jenis kekerasan, termasuk fisik, psikis, seksual. Kecamatan Lembah Melintang dan Kinali juga mencatat kasus kekerasan fisik dan psikis. Selain itu, ada 2 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kecamatan Luhak Nan Duo dan Pasaman, yang menjadi perhatian serius terkait eksploitasi perempuan. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Pasaman Barat bersifat multidimensional dan membutuhkan perhatian lintas sektor untuk pencegahan dan penanganannya.

**Gambar 8.5 Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024**



*Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024*

## **8.2 Perlindungan Terhadap Anak**

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedang Perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap anak adalah agar anak dapat menikmati hak-hak mereka, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial-budaya, hukum, dan keberlangsungan hidup, serta memperoleh perlindungan yang memadai. Salah satu yang perlu diperhatikan misalnya kepemilikan akta lahir, karena kepemilikan akta lahir sangat penting sebagai identitas awal sebagai warga negara Indonesia.

### **a. Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak adalah tindak kekerasan secara fisik, seksual, penganiayaan emosional, atau pengabaian terhadap anak. Di Amerika Serikat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) mendefinisikan penganiayaan anak sebagai setiap tindakan atau serangkaian tindakan wali atau kelalaian oleh orang tua atau pengasuh lainnya yang dihasilkan dapat membahayakan, atau berpotensi bahaya, atau memberikan ancaman yang berbahaya kepada anak.

Sebagian besar terjadi kekerasan terhadap anak di rumah anak itu sendiri dengan jumlah yang lebih kecil terjadi di sekolah, di lingkungan atau organisasi tempat anak berinteraksi. Ada empat kategori utama tindak kekerasan terhadap anak yakni pengabaian, kekerasan fisik, pelecehan emosional/psikologis, dan pelecehan seksual anak.

### **b. Jenis Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak dapat mengambil beberapa bentuk. Empat jenis utama adalah kekerasan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran. Kekerasan fisik adalah agresi fisik diarahkan pada seorang anak oleh orang dewasa. Hal ini dapat melibatkan meninju, memukul, menendang, mendorong, menampar, membakar, membuat memar, menarik telinga atau rambut, menusuk, membuat tersedak atau mengguncang seorang anak.

Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak di sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter).

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang lebih tua terhadap seorang anak untuk mendapatkan stimulasi seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), paparan senonoh dari alat kelamin kepada anak, menampilkan pornografi



kepada anak, kontak seksual yang sebenarnya terhadap anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak, melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Dari semua kemungkinan bentuk pelecehan, pelecehan emosional adalah yang paling sulit untuk didefinisikan. Itu bisa termasuk nama panggilan, ejekan, degradasi, perusakan harta benda, penyiksaan atau perusakan terhadap hewan peliharaan, kritik yang berlebihan, tuntutan yang tidak pantas atau berlebihan, pemutusan komunikasi, dan pelabelan sehari-hari atau penghinaan.

**Tabel 8.6** Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumah Kasus	Jumlah Korban		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sungai Beremas	1	2	1	3
2	Ranah Batahan	1	-	1	1
3	Koto Balingka	4	-	4	4
4	Sungai Aur	3	1	2	3
5	Lembah Melintang	10	6	4	10
6	Gunung Tuleh	2	2	-	2
7	Talamau	3	-	3	3
8	Pasaman	26	13	20	33
9	Luhak Nan Duo	4	1	3	4
10	Sasak Ranah Pasisie	3	2	2	4
11	Kinali	11	4	8	12
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>68</b>	<b>31</b>	<b>48</b>	<b>79</b>

*Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024*

Berdasarkan Tabel 8.6 tentang Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak menurut Kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat terlihat bahwa jumlah kasus kekerasan sebanyak 68 kasus. Dengan jumlah

korban sebanyak 79 orang ( 31 orang anak laki-laki dan 48 orang anak perempuan). Jumlah kasus paling banyak di Kecamatan Pasaman sebanyak 26 kasus ( 13 orang laki-laki dan 20 orang perempuan). Sedangkan Kecamatan Sungai Beremas dan Ranah Batahan masing-masing 1 kasus.

Tabel 8.7 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Jenis Kekerasan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan					
		Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	3
2	Ranah Batahan	-	-	1	-	-	-
3	Koto Balingka	-	-	3	-	-	1
4	Sungai Aur	1	-	2	-	-	-
5	Lembah Malintang	3	1	6	-	-	-
6	Gunung Tuleh	1	-	1	-	-	-
7	Talamau	1	1	1	-	-	-
8	Pasaman	14	4	8	-	-	8
9	Luhak Nan Duo	-	1	3	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	1	3	-	-	-
11	Kinali	3	3	4	-	-	1
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>23</b>	<b>11</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024

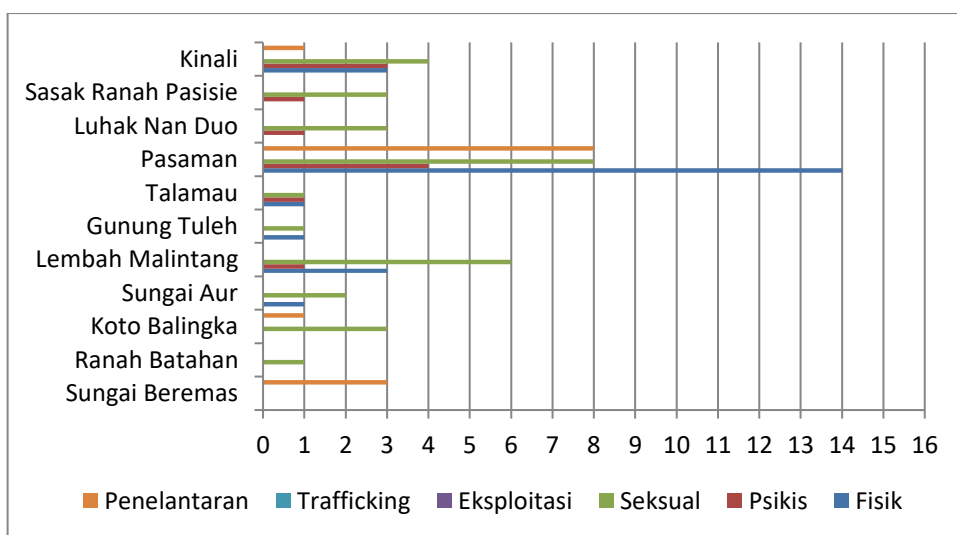
Berdasarkan Tabel 8.7 tentang Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak menurut Kecamatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pasaman Barat terlihat bahwa Jenis Kekerasan Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat, terlihat bahwa jenis kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan Seksual, dengan total 32 kasus (pada anak perempuan dan laki-laki).

Kekerasan seksual menjadi masalah utama yang dihadapi anak-anak di wilayah ini, menunjukkan adanya tantangan signifikan terkait perlindungan anak dari tindakan kekerasan seksual.

Selain kekerasan seksual, kekerasan fisik dan psikis juga tercatat 23 kasus (kekerasan fisik), dan 11 kasus (kekerasan psikis). Kekerasan fisik paling banyak terjadi Kecamatan Pasaman dan Lembah Melintang, sedangkan kekerasan psikis paling banyak terjadi di Kecamatan Pasaman dan Kinali.

Kasus penelantaran relatif sedikit, sebanyak 13 kasus. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan perlunya peningkatan fokus pada pencegahan eksploitasi dan perlindungan anak, terutama di kecamatan yang mencatat angka kekerasan tertinggi. Intervensi berbasis komunitas dan program rehabilitasi bagi korban sangat diperlukan untuk memutus rantai kekerasan ini.

Gambar 8.6 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Jenis Kekerasan Tahun 2024



Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024

### c. Tempat Kejadian Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak bisa terjadi di mana saja. Pelakunya bukan hanya orang lain, tapi juga orang terdekat. Namun, tahukan bahwa ada beberapa tempat paling krusial terjadinya kekerasan pada anak dimana saja itu. Tabel berikut ini menyajikan data kekerasan terhadap anak menurut tempat kejadian.

Tabel 8.8 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Tempat Kejadian Tahun 2024

No	Kecamatan	Tempat Kejadian				
		Rumah dihuni/ rumah kosong/ di belakang rumah	Sekolah	Wisata (pantai)	Tempat umum	LINGKUNGAN (LAINNYA)
1	Sungai Beremas	3	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	1	-	-	-	-
3	Koto Balingka	2	-	-	2	-
4	Sungai Aur	1	-	-	2	-
5	Lembah Melintang	7	-	-	3	-
6	Gunung Tuleh	1	-	-	1	-
7	Talamau	2	-	-	1	-
8	Pasaman	22	2	-	8	1
9	Luhak Nan Duo	2	1	-	1	-
10	Sasak Ranah Pasisie	4	-	-	-	-
11	Kinali	9	2	-	1	-
<b>Pasaman Barat</b>		<b>54</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>19</b>	<b>1</b>

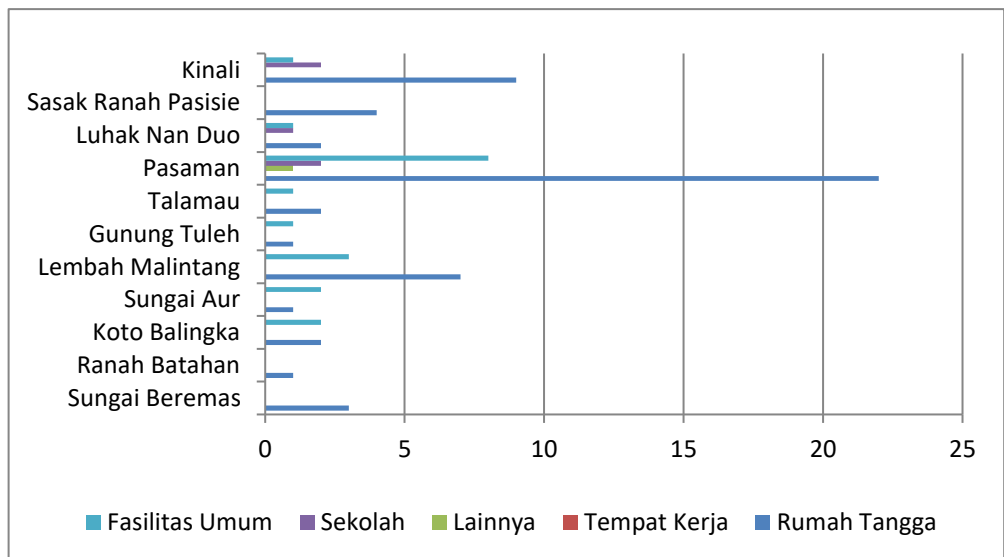
Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 8.8 tentang Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Kecamatan dan Tempat Kejadian Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat, terlihat bahwa lokasi utama terjadinya kekerasan adalah rumah atau rumah kosong, dengan total 54 kasus. Data ini menunjukkan bahwa rumah atau area yang seharusnya aman bagi anak-anak justru menjadi tempat yang paling sering terjadi kekerasan. Hal ini menegaskan

perlunya peningkatan pengawasan dan kesadaran di lingkungan rumah dan sekitarnya untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Selain itu, terdapat 5 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah, dan 1 kasus di area wisata/pantai, yang menunjukkan bahwa kekerasan juga bisa terjadi di lingkungan pendidikan dan tempat rekreasi. Tempat umum mencatat 19 kasus, begitu juga dengan kategori lingkungan lainnya, yang juga memiliki 1 kasus. Beberapa kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi di lingkungan rumah adalah Pasaman (22 kasus), Kinali (9 kasus) dan Lembah Melintang (7 kasus). Kondisi ini mengisyaratkan perlunya langkah-langkah perlindungan lebih lanjut tidak hanya di rumah tetapi juga di ruang publik dan fasilitas umum. Program pencegahan dan sosialisasi di sekolah, lingkungan keluarga, serta tempat umum sangat diperlukan untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak.

Gambar 8.7 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Kecamatan dan Tempat Kejadian Tahun 2024



Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024

#### d. Lembaga Layanan Yang Menangani Kekerasan Terhadap Anak

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, upaya hukum perlindungan terhadap anak sudah banyak mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan ditetapkan dan disahkannya beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Pemerintah juga memfasilitasi kepada lembaga kemasyarakatan dalam upaya penguatan lembaga dan jejaring serta kemitraan untuk peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Salah satu upaya tersebut adalah pembentukan Forum Lembaga Layanan yang melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak. Forum Lembaga Layanan Perlindungan Anak ini adalah suatu wadah untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga layanan, meningkatkan koordinasi dan membangun jaringan kemitraan sehingga dapat meningkatkan efektifitas layanan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 8.9 Jumlah Lembaga Layanan Yang Menangani Anak Korban Kekerasan Menurut Kabupaten Tahun 2024

No	Kabupaten	LBH	UPPA	Trauma Center	Women Crisis Center	Shelter	Rumah Singgah	RPSA	Panti Asuhan Anak
1	Pasaman Barat	-	32	-	-	-	-	-	-
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>-</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber : UPPA Polres Pasaman Barat

#### e. Sifat Lembaga Layanan Anak Korban Kekerasan

Kekerasan terhadap anak sudah berada pada tahap yang sangat mengkhawatirkan yang berdampak buruk bagi masa depan bangsa dan negara. Karena anak adalah aset bangsa dan merupakan generasi penerus bangsa, maka anak yang mengalami kekerasan perlumendapatkan penanganan secara optimal untuk mengembalikannya ke kondisinormal diperlukan suatu kebijakan berupa pedoman penanganan kekerasan terhadap anak sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap anak yang mengalami kekerasan sesuai yang dibutuhkan. Berikut ini merupakan tabel Lembaga yang Menangani Anak Korban Kekerasan Menurut Sifatnya.

Tabel 8.10 Lembaga yang Menangani Anak Korban Kekerasan Menurut Sifatnya di Kab. Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kabupaten	Lembaga Layanan	Sifat Lembaga Layanan	
			Satu Atap	Berjejaring
1	Pasaman Barat	PPT	-	-
2		UPTD PPA	-	1
3		RPSA	1	-
4		RPTC	-	-
5		Shelter/Rumah Singgah	-	-

Sumber : UPPA Polres, UPTD PPA Kab. Pasaman Barat

#### f. Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Layanan Yang Diberikan

Anak korban kekerasan telah diberikan pelayanan yang maksimal oleh pemerintah daerah, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 8.11 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak menurut Kecamatan Jenis Pelayanan Yang Diberikan dan Jenis kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis pelayanan yang diberikan				
		Penanganan pengaduan	Pelayanan kesehatan	Pendampingan	Penegakan dan bantuan hukum	Pemulangan dan reintegrasi
1.	Sungai Beremas	3	-	-	-	-
2.	Ranah Batahan	1	1	-	1	-
3.	Koto Balingka	4	1	1	1	1
4.	Sungai Aur	3	2	-	3	-
5.	Lembah Malintang	10	4	1	7	-
6.	Gunung Tuleh	2	1	-	-	2
7.	Talamau	3	-	-	1	1
8.	Pasaman	33	9	2	7	4
9.	Luhak Nan Duo	4	1	-	3	
10.	Sasak Ranah Pasisie	4	1	2	1	2
11.	Kinali	12	6	1	2	2
Pasaman Barat		79	26	7	26	10

Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024

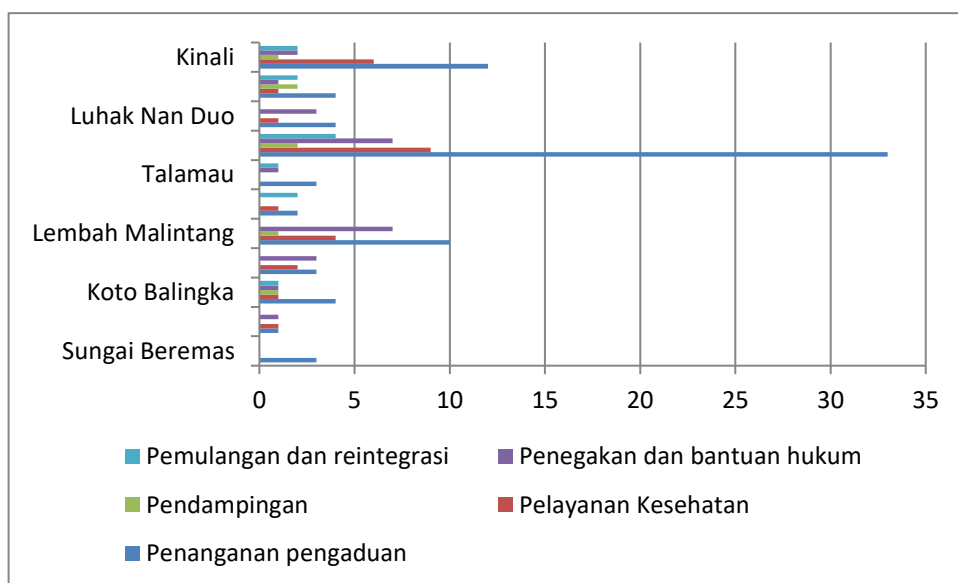
Berdasarkan Tabel 8.11 tentang Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Kecamatan, Jenis Pelayanan yang Diberikan, dan Jenis Kelamin Tahun 2024, terlihat bahwa penegakan hukum dan pelayanan kesehatan merupakan jenis pelayanan yang paling dominan diberikan, masing-masing 26 kasus. Hal ini menandakan bahwa proses penanganan hukum menjadi fokus utama dalam upaya perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan di Kabupaten Pasaman Barat.

Selain itu, terdapat 79 kasus yang menerima penanganan pengaduan, menunjukkan adanya langkah awal dalam melaporkan kasus-kasus



kekerasan. Namun, sangat sedikit penegakan hukum yang diberikan (hanya 4 kasus). Beberapa kasus yang mendapatkan rehabilitasi sosial atau pemulangan dan reintegrasi sebanyak 10 kasus. yang menjadi perhatian. Kecamatan dengan kasus penegakan hukum terbanyak adalah Pasaman dan Lembah Melintang (masing-masing 7 kasus). Data ini mengisyaratkan bahwa meskipun upaya hukum telah berjalan, pendekatan komprehensif dengan memperkuat layanan kesehatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sangat diperlukan untuk pemulihan korban secara menyeluruh.

**Gambar 8.8** Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak menurut Kecamatan Jenis Pelayanan Yang Diberikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



*Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024*

#### **g. Pelaku**

Kekerasan terhadap anak adalah peristiwa perlukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak. Oleh karena itu tidak jarang pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang-orang terdekat dari korban itu sendiri baik itu yang berada dalam lingkungan keluarga, tempat tinggal dan bahkan juga lingkungan sekolahnya. Melakukan kekerasan terhadap anak berarti melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Kekerasan pada anak bisa memunculkan masalah fisik maupun psikologis pada si anak di kemudian harinya. Secara fisik mungkin bisa dilihat dari sekujur tubuhnya ada tanda tanda bekas kekerasan. Secara psikis, anak yang menjadi korban kekerasan dapat mengalami masalah kejiwaan seperti : gangguan stres pasca trauma, depresi, cemas, dan psikotik. Orang tua sering sekali tidak menyadari atau terlambat mengetahui bahwa anaknya menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk mengenali tanda dan gejala kemungkinan anak menjadi korban kekerasan.

Tabel 8.12 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan Pelaku dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	Hubungan korban dan pelaku				
		Orang tua	Keluarga	Pacar/ teman/ orang yang dikenal	Tetangga	Lainnya
1	Sungai Beremas	2	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	1	-	-	1
3	Koto Balingka	-	-	1	1	-
4	Sungai Aur	-	-	2	1	-
5	Lembah Melintang	2	-	2	2	4
6	Gunung Tuleh	-	-	1	1	-
7	Talamau	-	-		3	2
8	Pasaman	8	2	6	4	3
9	Luhak Nan Duo	1	-	3	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	1	-	-	-	1
11	Kinali	5	2	5	1	1
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>	<b>5</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>12</b>

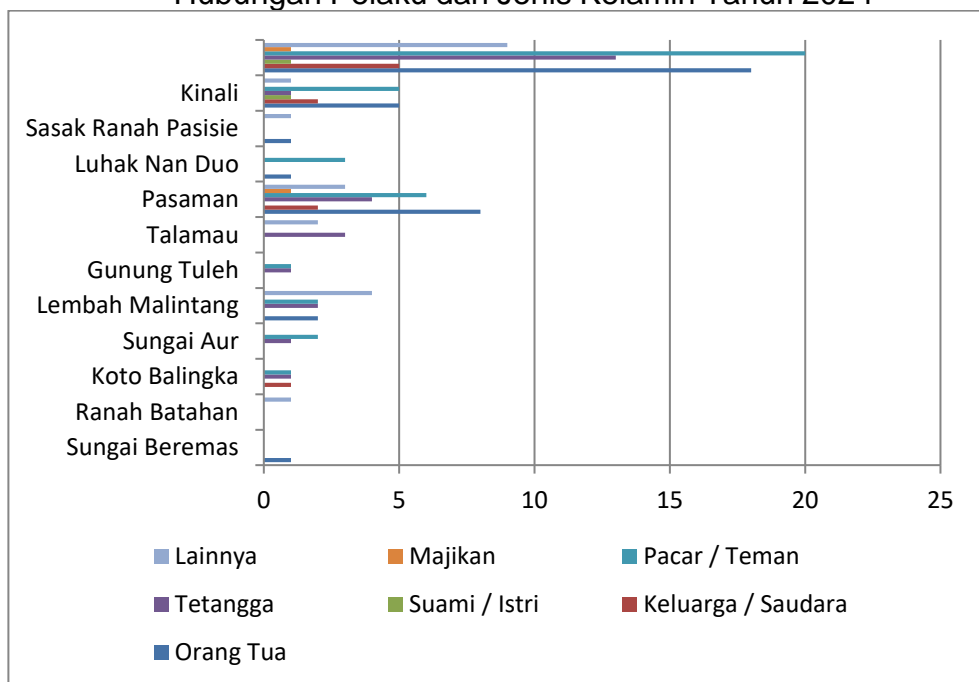
Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 8.18 tentang Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Anak menurut Hubungan Pelaku dan Jenis Kelamin Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat, terlihat bahwa mayoritas pelaku kekerasan berasal dari kalangan pacar, teman, atau orang yang dikenal korban, dengan total 20 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak sering kali dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korban, menandakan bahwa hubungan interpersonal yang tidak sehat menjadi faktor signifikan dalam kasus kekerasan terhadap anak.

Selain itu, terdapat 18 kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, yang menjadi perhatian serius karena mengindikasikan adanya kekerasan

dalam lingkungan keluarga. Kekerasan oleh tetangga tercatat sebanyak 13 kasus, sementara pelaku dari kategori keluarga sangat sedikit, hanya 5 kasus. Kecamatan dengan jumlah kasus tertinggi adalah Pasaman (26 kasus), dengan pelaku dari berbagai kategori, terutama orang tua, tetangga dan teman dekat korban. Kecamatan Kinali dan Lembah Melintang juga mencatat cukup banyak kasus, menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak tersebar di berbagai wilayah. Data ini menegaskan pentingnya program pencegahan dan edukasi terkait kekerasan dalam hubungan interpersonal dan keluarga untuk melindungi anak-anak di Kabupaten Pasaman Barat.

Gambar 8.9 Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Menurut Hubungan Pelaku dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : Simfoni Kementerian PPPA Tahun 2024

#### **h. Anak Terlantar**

Di dalam UUD 1945 Pasal 34 dikatakan sebagai berikut “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara” yang artinya adalah pemerintah dan Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembinaan dalam melindungi fakir miskin dan anak terlantar. Seringkali masyarakat seolah mengabaikan dengan adanya fakir miskin dan anak terlantar dan dianggap tidak penting dan tidak ikut andil dalam pembangunan bangsa.

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria:

1. Berasal dari keluarga fakir miskin;
2. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
3. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Pada tahun 2024, menurut data Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat terdapat laporan anak terlantar, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8.13 Jumlah Anak Terlantar Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sungai Beremas	-	2	2
2	Ranah Batahan	-	-	-
3	Koto Balingka	-	2	2
4	Sungai Aur	1	7	8
5	Lembah Melintang	1	12	13
6	Gunung Tuleh	-	4	4
7	Talamau	-	-	-
8	Pasaman	-	-	-
9	Luhak Nan Duo	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-
11	Kinali	2	2	4
<b>Pasaman Barat</b>		<b>4</b>	<b>29</b>	<b>33</b>

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Tabel 8.13 tentang Jumlah Anak Terlantar menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat, tercatat ada total 33 anak terlantar, dengan 4 anak laki-laki dan 29 anak perempuan. Data ini menunjukkan bahwa fenomena anak terlantar terjadi di beberapa kecamatan, namun dengan jumlah yang masih relatif kecil secara keseluruhan.

Anak terlantar terbanyak ditemukan di Kecamatan Lembah Melintang dengan 13 kasus. Sementara itu, Kecamatan Sungai Beremas dan Koto Balingka mencatat masing-masing 2 kasus anak perempuan terlantar. Tidak ada kasus anak terlantar yang dilaporkan di kecamatan-kecamatan lainnya. Meskipun jumlah kasus ini tidak besar, fakta bahwa fenomena ini terjadi di wilayah yang berbeda menunjukkan pentingnya perhatian khusus dari pihak berwenang, termasuk perlunya program intervensi dini dan dukungan sosial bagi anak-anak yang rentan terlantar agar mereka bisa mendapatkan hak-hak dasar dan perlindungan yang layak.

### i. Kepemilikan Akta Kelahiran

Akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selembarnya yang sudah dicetak. Setiap kalinya, istilah seperti ini dapat mengacu kepada setiap catatan resmi berlandaskan undang-undang yang resmi menetapkan hal-hal mengenai kelahiran seorang anak dan juga berlaku pada salinan lembaran pencatatan akta lahir yang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

Tabel 8.14 Jumlah Anak Yang Berumur Dibawah 18 Tahun Dengan Kepemilikan Akta Lahir Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	KECAMATAN	MEMILIKI AKTA LAHIR		TIDAK MEMILIKI AKTA LAHIR		TOTAL
		L	P	L	P	
1	Sungai Beremas	5.325	4.846	130	116	10.417
2	Ranah Batahan	9.109	8.413	48	54	17.624
3	Koto Balingka	13.568	12.722	58	47	26.395
4	Sungai Aur	4.880	4.479	38	23	9.420
5	Lembah Melintang	12.736	11.793	88	66	24.683
6	Gunung Tuleh	4.423	4.024	46	37	8.530
7	Talamau	4.803	4.665	64	60	9.592
8	Pasaman	5.641	5.323	43	30	11.037
9	Luhak Nan Duo	6.422	6.031	50	53	12.556
10	Sasak Ranah Pasisie	7.326	6.772	52	50	14.200
11	Kinali	2.550	2.396	19	21	4.986
<b>Pasaman Barat</b>		<b>76.783</b>	<b>71.464</b>	<b>636</b>	<b>557</b>	<b>149.440</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Tabel 8.14 tentang Jumlah Anak di Bawah 18 Tahun dengan Kepemilikan Akta Lahir menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat, terdapat total 149.440 anak. Dari jumlah tersebut, 76.783 anak laki-laki dan 71.464 anak perempuan telah memiliki akta lahir, sedangkan 1.193 anak belum memiliki akta lahir.

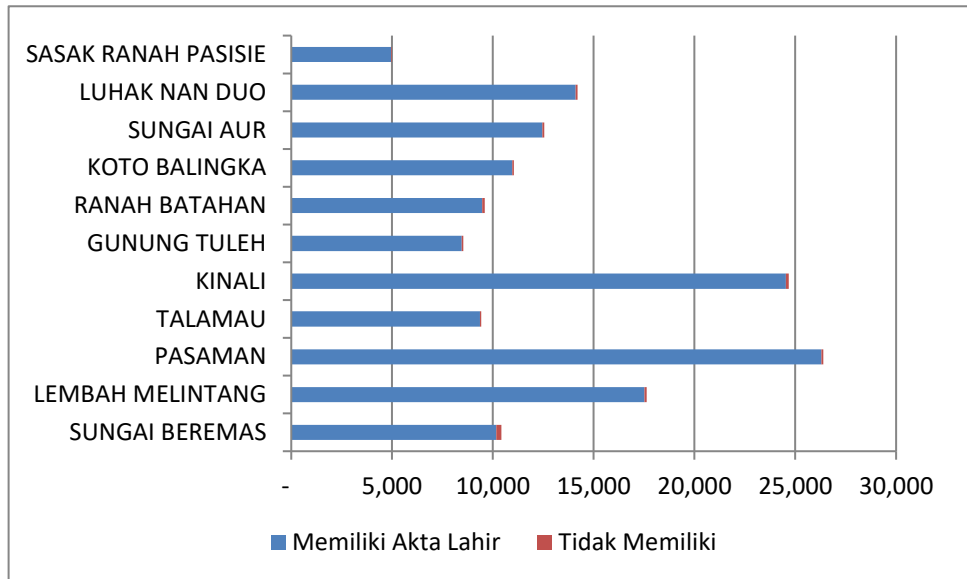
Sebagian besar anak di Pasaman Barat telah memiliki akta lahir, dengan total 148.247 anak (laki-laki dan perempuan). Kecenderungan yang serupa ditemukan di sebagian besar kecamatan, dengan jumlah anak yang memiliki akta lahir jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak memiliki.

Sungai Beremas memiliki jumlah tertinggi anak yang tidak memiliki akta lahir, yaitu 246 anak. Kecamatan Kinali dan Pasaman juga mencatatkan jumlah yang cukup signifikan, masing-masing dengan 154 dan 124 anak tanpa akta lahir. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah anak laki-laki dan perempuan dalam hal kepemilikan akta lahir.

Ketiadaan akta lahir bagi sebagian anak dapat berdampak pada akses mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. Perlu adanya program intensif untuk mempercepat pembuatan akta bagi anak-anak yang belum memilikinya, terutama di kecamatan dengan angka tertinggi seperti Pasaman, Kinali, dan Sungai Beremas. Program sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta lahir juga sangat diperlukan untuk memastikan seluruh anak di Kabupaten Pasaman Barat terdata dan mendapatkan hak-hak dasarnya.



Gambar 8.10 Jumlah Anak Yang Berumur Dibawah 18 Tahun Yang Memiliki Akta Lahir Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2024



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

#### j. Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif

Seorang anak adalah harapan orang tua yang berharga. Dalam rangka untuk mendapatkan anak yang sehat dan cerdas sesuai dengan pertumbuhan mereka, anak-anak perlu dipenuhi haknya baik untuk fisik, psikologis, kebutuhan sosial dan spiritual. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, anak memerlukan peran orang dewasa baik itu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan makan, perawatan, pendidikan, bimbingan, perasaan aman dan pencegahan penyakit.

Pengasuhan alternatif merupakan pengasuhan berbasis keluarga pengganti atau berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak di luar keluarga inti atau kerabat anak.

Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (fostering), wali (guardianship) atau pengangkatan anak dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis residential (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak). Pengasuhan tersebut, kecuali pengangkatan anak, bersifat sementara, dan apabila setelah melalui asesmen, orang tua atau keluarga besar atau kerabat anak dianggap sudah mampu untuk mengasuh anak, maka anak akan dikembalikan kepada asuhan dan tanggung jawab mereka.

Tujuan dari pengasuhan alternatif, termasuk yang dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak harus diprioritaskan untuk menyediakan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, kelekatan (attachment), dan permanensi melalui keluarga pengganti

**Tabel 8.15** Jumlah Anak Yang Ditampung di Panti Asuhan dan Non Panti Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023

No	Kecamatan	Kapasitas Panti Per Kecamatan	Jenis Kelamin		
			Laki-laki	Perempuan	Total
1	Sungai Beremas	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	200	89	86	175
3	Koto Balingka	250	88	79	167
4	Sungai Aur	200	71	43	114
5	Lembah Melintang	100	-	-	-
6	Gunung Tuleh	90	8	22	30
7	Talamau	200	43	78	121
8	Pasaman	60	9	16	25
9	Luhak Nan Duo	-	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	-
11	Kinali	-	-	-	-
<b>Pasaman Barat</b>		<b>1.100</b>	<b>308</b>	<b>324</b>	<b>632</b>

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Tabel 8.15 tentang Jumlah Anak yang Ditampung di Panti Asuhan dan Non-Panti Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023, tercatat total 632 anak yang ditampung di berbagai fasilitas, dengan 308 anak laki-laki dan 324 anak perempuan. Kapasitas panti tertinggi terdapat di Kecamatan Koto Balingka dengan 250 anak, diikuti oleh Ranah Batahan dan Sungai Aur, masing-masing dengan kapasitas 200 anak. Kecamatan seperti Sungai Beremas dan Sasak Ranah Pasisie tidak mencatat adanya anak yang ditampung, menunjukkan ketidakhadiran fasilitas penampungan di wilayah tersebut.

Distribusi anak tertinggi ditemukan di Ranah Batahan, dengan total 175 anak yang ditampung, diikuti oleh Koto Balingka dan Sungai Aur dengan masing-masing 167 dan 114 anak. Sebaliknya, Kecamatan Pasaman mencatat jumlah anak paling sedikit dengan hanya 16 anak. Perbandingan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah anak perempuan yang ditampung (324) sedikit lebih banyak dibandingkan dengan anak laki-laki (308), namun perbedaan ini tidak terlalu signifikan. Data ini mengindikasikan pentingnya peran panti asuhan di beberapa kecamatan untuk mendukung anak-anak yang membutuhkan, terutama di wilayah dengan kapasitas besar seperti Koto Balingka dan Ranah Batahan. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa fasilitas dan layanan di panti memadai untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut. Selain itu, kecamatan tanpa fasilitas penampungan perlu diberikan perhatian lebih dengan menyediakan bentuk layanan sosial alternatif untuk mendukung anak-anak yang rentan.

Adapun anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif adalah anak yang berada pada situasi sebagai berikut:

1. Keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya

2. Anak yang tidak memiliki keluarga atau keberadaan keluarga atau kerabat tidak diketahui.
3. Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, penelantaran, atau eksploitasi sehingga demi keselamatan dan kesejahteraan diri mereka, pengasuhan dalam keluarga justru bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
4. Anak yang terpisah dari keluarga karena bencana, baik konflik sosial maupun bencana alam.

Kabupaten Pasaman Barat mempunyai 9 Panti Asuhan Yatim Piatu pada 7 kecamatan, seperti yang terlihat pada table dibawah ini :

Tabel 8.16 Jumlah Panti Asuhan Yatim Piatu Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Panti Asuhan Anak Yatim Piatu
1	Sungai Beremas	-
2	Ranah Batahan	2
3	Koto Balingka	3
4	Sungai Aur	2
5	Lembah Melintang	1
6	Gunung Tuleh	2
7	Talamau	2
8	Pasaman	1
9	Luhak Nan Duo	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-
11	Kinali	-
<b>Pasaman Barat</b>		<b>13</b>

*Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat*

### **8.3 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)**

Anak berkebutuhan khusus (Heward) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam ABK antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille (tulisan timbul) dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat (bahasa tubuh).

Salah satu perlindungan khusus diberikan kepada anak penyandang cacat atau Anak Berkebutuhan Khusus di bidang pendidikan adalah adanya Sekolah Luar Biasa untuk anak-anak tersebut. Jumlah Anak berkebutuhan khusus yang tercatat oleh Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut.

#### **a. Sekolah Luar Biasa**

Sekolah Luar Biasa (SLB) adalah lembaga pendidikan yang merupakan bagian terpadu dari sistem pendidikan nasional yang secara khusus diselenggarakan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental sosial, tetapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sekolah luar biasa merupakan bagian dari lembaga pendidikan yang mampu mewadahi

dan menyelenggarakan pendidikan secara khusus untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus pula. Sekolah Luar Biasa menyelenggarakan pendidikan untuk peserta didik dengan kebutuhan khusus seperti tunanetra, tunarungu dan tunawicara, tunadaksa, tunalaras, tunaganda dan anak terbelakangan.

Tabel 8.17 Jumlah SLB Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten Tahun 2023 Kabupaten Pasaman Barat

No	Kabupaten	SLB Negeri				Jumlah	SLB Swasta				Jumlah
		TK	SD	SMP	SMA		TK	SD	SMP	SMA	
1	Sungai Beremas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Koto Balingka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sungai Aur	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
5	Lembah Melintang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Gunung Tuleh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Talamau	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
8	Pasaman	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
9	Luhak Nan Duo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kinali	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
<b>Pasaman Barat</b>		-	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	-	<b>4</b>	-	-	<b>4</b>

Sumber : referensi.data.kemdikbud.go.id

Berdasarkan Tabel 8.17 tentang Jumlah SLB Negeri dan Swasta Menurut Kabupaten Tahun 2023 di Kabupaten Pasaman Barat, terlihat bahwa terdapat total 4 Sekolah Luar Biasa (SLB) di wilayah ini, dengan komposisi 1 SLB negeri dan 3 SLB swasta. SLB negeri hanya ada di Kecamatan Sungai Aur, yang mencakup jenjang SD dan SMP, sedangkan SLB swasta tersebar di beberapa kecamatan dengan variasi jenjang

pendidikan.

SLB swasta tercatat di Kecamatan Gunung Tuleh, Talamau, dan Pasaman, dengan masing-masing memiliki 1 sekolah. Kecamatan Pasaman mencatat SLB swasta dengan cakupan jenjang pendidikan hingga SMP, menunjukkan upaya penyediaan pendidikan khusus yang lebih lengkap di wilayah ini. Namun, sebagian besar kecamatan lain tidak memiliki SLB, baik negeri maupun swasta, yang mengindikasikan adanya keterbatasan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di wilayah tersebut.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada beberapa SLB yang tersebar di Kabupaten Pasaman Barat, ketersediaannya masih terbatas di beberapa wilayah. Perlu adanya perhatian lebih untuk memperluas akses dan keberadaan SLB di kecamatan-kecamatan lain guna memastikan setiap anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan hak pendidikan yang memadai. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penambahan fasilitas SLB dan memberikan dukungan bagi lembaga pendidikan swasta untuk memperluas cakupan layanan pendidikan khusus di seluruh wilayah Pasaman Barat.

Tabel 8.18 Jumlah Siswa SLB Negeri dan Swasta Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2022

No	Kabupaten	SLB Negeri								Jumlah
		TK		SD		SMP		SMA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pasaman Barat			19	17					36

Sumber : *referensi.data.kemdikbud.go.id*

Lanjutan

No	Kabupaten	SLB Swasta								Jumlah
		TK		SD		SMP		SMA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pasaman Barat			68	56					124

Sumber : referensi.data.kemdikbud.go.id

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah siswa SLB Negeri sebanyak 36 yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Semuanya adalah siswa SDLB Negeri Sungai Aur. Sedangkan jumlah siswa SLB Swasta sebanyak 124 orang yang terdiri dari 68 orang laki-laki dan 56 orang perempuan.

Tabel 8.19 Jumlah Guru SLB Negeri dan Swasta Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No      Kabupaten		SLB Negeri								Jumlah
		TK		SD		SMP		SMA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pasaman Barat	-	-	2	9	-	-	-	-	11

Sumber : referensi.data.kemdikbud.go.id

Lanjutan

No	Kabupaten	SLB Swasta								Jumlah
		TK		SD		SMP		SMA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Pasaman Barat	-	-	1	17	-	-	-	-	18

Sumber : referensi.data.kemdikbud.go.id



Terbatasnya jumlah tenaga pengajar membuat Sekolah Luar Biasa sulit berkembang dan dipercaya para orang tua anak berkebutuhan khusus. Dari 5 sekolah SLB yang ada, jumlah guru di SLB Negeri ada 11 orang yang terdiri 2 orang guru laki-laki dan 9 orang guru perempuan. Begitu juga halnya dengan SLB Swasta, terdiri 1 orang guru laki-laki dan 17 orang guru perempuan.

#### **b. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)**

Anak berkebutuhan khusus (Heward) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Yang termasuk kedalam ABK antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan, dan kesulitan bersosialisasi. istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa dan anak cacat.

Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki, ABK memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka, contohnya bagi tunanetra mereka memerlukan modifikasi teks bacaan menjadi tulisan Braille (tulisan timbul) dan tunarungu berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat (bahasa tubuh).

Tabel 8.20 Jenis dan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tahun 2024

Jenis dan jumlah anak berkebutuhan khusus ( ABK) Menurut Kecamatan Tahun 2024																											
Jenis ABK ( Anak Berkebutuhan Khusus )																											
No.	Kecamatan	Tuna Netra		Tuna Rungu		Tuna Grahita		Tuna Daksa/Cacat Fisik		Tuna Laras		Anak yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata dan/atau bakan istimewa		Tuna Ganda		Autis		Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas/GP PH (Attention and Hyperactivity Disorder/ADHD)		Lamban Belajar		Kesulitan Belajar		Gangguan Komunikasi		Total	
		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L		
1	Sungai Beremas							1	3																		4
2	Ranah Batahan							2	3	1					1												7
3	Koto Balingka				2	3	2	2	11		1				1	4										1	27
4	Sungai Aur																										-
5	Lembah Melintang							1	3																		4
6	Gunung Tuleh							8	8						2	5									5	6	34
7	Talamau					1	1		6																		8
8	Pasaman		1			5	8	3	8	1	8				2	1	2									1	40
9	Luhak Nan Duo					1	1	5	1	1	2				1	2											14
10	Sasak Ranah Pasisie	1		1			2	2	1							1											8
11	Kinali		1	2	7	5	6	4	2						1				2								30
	Pasaman Barat	1	2	3	9	15	20	28	46	3	11	-	-	7	13	3	-	2	-	-	-	-	-	-	5	8	176
Sumber Data : Dinas Sosial																											

Berdasarkan Tabel 8.20 tentang Jenis dan Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat, terlihat bahwa berbagai kategori ABK tersebar di beberapa kecamatan.

Data Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 mencatat ada 176 orang Anak Berkebutuhan Khusus, dimana banyak terdapat pada Disabilitas Daksa dengan total sebanyak 74 orang (42,04%), dengan rincian Perempuan berjumlah 28 orang (15,90%) dan laki laki berjumlah 46 orang (26,13%). Urutan kedua diikuti oleh Tuna Grahita sebanyak 35 orang (19,88%) dan Tuna ganda sebanyak 20 orang (11,36%). Urutan keempat adalah tuna laras sebanyak 14 orang atau sebesar 7,95% yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 3 orang perempuan, sedangkan jumlah anak berkebutuhan khusus di urutan terakhir berdasarkan jumlah adalah tuna Netra sebanyak 5 orang 2,84%.

#### **8.4 Anak Berhadapan dengan Hukum**

Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Mengacu pada pasal tersebut, anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana, yaitu anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak belum genap berumur 18 tahun dan diajukan tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tersebut tetap diajukan ke persidangan anak. Dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, terdapat ketentuan khusus yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak hanya itu, terdapat perhatian khusus terhadap hak-hak anak yang harus dipenuhi saat menjalani proses peradilan pidana.

Tabel 8.21 Jumlah Anak berhadapan dengan Hukum Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Sungai Beremas	-	-	-
2	Ranah Batahan	1	-	1
3	Koto Balingka	2	-	2
4	Sungai Aur	-	-	-
5	Lembah Melintang	-	-	-
6	Gunung Tuleh	2	-	2
7	Talamau	-	-	-
8	Pasaman	2	-	2
9	Luhak Nan Duo	5	-	5
10	Sasak Ranah Pasisie	1	-	1
11	Kinali	-	-	-
<b>Pasaman Barat</b>		<b>13</b>	<b>-</b>	<b>13</b>

Sumber : UPPA Polres Kab. Pasaman Barat

Berdasarkan catatan dari Polres Kabupaten Pasaman Barat, jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Pasaman Barat selama Tahun 2023 berjumlah 13 orang anak, dimana semuanya adalah anak laki-laki.

Tabel 8.22 Peraturan Perundang-Undangan Yang Digunakan Dalam Penanganan ABH Tahun 2024

No	Peraturan Perundang-Undangan	Kepolisian	Kejaksaan	Pengadilan	Bapas	Lapas	Keterangan
1.	UU No. 23/2002	√	-	-	-	-	-
2.	KUHP	√	-	-	-	-	-
3	UU PKDRT	√	-	-	-	-	-
4.	UU TPPO	-	-	-	-	-	-
5	Lainnya	-	-	-	-	-	-

Sumber : Kepolisian, Lapas

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa terdapat 3 payung hukum yang bisa membantu anak-anak yang berhadapan dengan hukum yaitu UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, KUHP dan UU PKDRT.

#### 8.4 Anak Dibawah 18 Tahun Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA)

Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Pasal 112 dan 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa setiap orang yang menderita akibat pemakaian obat golongan I dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun serta korban penyalahgunaan wajib menjalankan rehabilitasi medis dan sosial.

Sedangkan bagi anak yang menyalahgunakan narkoba, penanganan pidananya diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

Tetapi, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak bahwa pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada seorang anak paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari pidana maksimum bagi seorang anak dengan orang dewasa.

Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tentu disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya yaitu rasa penasaran yang tinggi atau pun trend dan lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor pendukung yang paling tinggi seorang remaja menggunakan narkoba, mungkin banyak dari mereka yang berawal dari coba-coba karena bujukan teman dan berujung menjadi ketergantungan. Kurangnya edukasi terkait bahaya narkoba di kalangan remaja juga dapat membuat semakin meluasnya kasus penyalahgunaan narkoba.

Tabel 8.23 Jumlah Anak Dibawah 18 Tahun Korban Penyalah Gunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Tahun 2024

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		L	P	
1	Sungai Beremas	-	-	-
2	Ranah Batahan	-	-	-
3	Koto Balingka	-	-	-
4	Sungai Aur	-	-	-
5	Lembah Melintang	-	-	-
6	Gunung Tuleh	1	-	1
7	Talamau	-	-	-
8	Pasaman	-	-	-
9	Luhak Nan Duo	-	-	-
10	Sasak Ranah Pasisie	-	-	-
11	Kinali	-	-	-
<b>Pasaman Barat</b>		<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

Sumber : Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan Tabel 8.23 tentang Jumlah Anak di Bawah 18 Tahun Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) Tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat, tercatat ada 1 anak laki-laki yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlahnya masih relatif kecil, kasus penyalahgunaan NAPZA sudah mulai menyentuh kalangan remaja di bawah usia 18 tahun, dan anak laki-laki tampaknya lebih rentan terlibat dalam penyalahgunaan dibandingkan anak perempuan.

Kasus tersebut ditemukan di Kecamatan Gunung Tuleh dengan 1 anak laki-laki. Sementara Kecamatan lainnya tidak mencatat adanya kasus penyalahgunaan NAPZA di kalangan anak-anak.

Data ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan yang lebih serius di tingkat sekolah dan komunitas untuk menekan angka penyalahgunaan NAPZA di kalangan anak-anak dan remaja. Intervensi berupa program sosialisasi, edukasi bahaya NAPZA, dan pengawasan lingkungan sangat diperlukan, terutama di kecamatan yang sudah mencatat adanya kasus. Selain itu, dukungan bagi anak-anak yang sudah menjadi korban perlu ditingkatkan melalui layanan rehabilitasi dan konseling agar mereka bisa pulih dan tidak kembali terlibat dalam penggunaan zat adiktif.

# **BAB IX**

## **DAFTAR JENIS DATA KELEMBAGAAN**





## **BAB IX**

### **DAFTAR JENIS DATA KELEMBAGAAN**

#### **9.1 Kelembagaan Pengarusutamaan Gender**

Kelembagaan PUG adalah kelembagaan yang memenuhi unsur-unsur prasyarat PUG, yang berfungsi secara efektif dalam satu sistem berkelanjutan dengan norma yang disepakati dalam pemenuhan hak-hak asasi perempuan dan laki-laki secara adil untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan dan tingkatan pemerintahan.

PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. Indonesia telah memiliki komitmen kuat dalam mengupayakan terwujudnya kesetaraan dan pengarusutamaan gender. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen pemenuhan hak-hak dasar perempuan antara lain dalam UUD 1945, Inpres No. 9 Tahun 2000, dan Peraturan Presiden tentang RPJMN 2020-2024.

Dalam rangka mendorong, mengefektifkan serta mengoptimalkan upaya PUG secara terpadu dan terkoordinasi, di dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga,

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. PUG menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan fungsional utama semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.

Tabel 9.1      Daftar Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berdasarkan Kabupaten Tahun 2024

No	Kabupaten	Nama	Alamat	Dasar Hukum pembentuka n
	Pasaman Barat	UPTD PPA	Jl. M.Nastsir Simpang Empat Pasaman Barat	Perbup

Sumber : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat

Tabel 9.2      Jumlah dan Jenis Kebijakan/Program/Kegiatan Yang Responsif Gender Tahun 2024

No	Kabupat en	Jenis Kebijakan/Program/ Kegiatan	Nomor	Dikeluarka n Oleh	Jumla h
1.	Pasaman Barat	1. SK Pembentukan Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Kab. Pasaman Barat	188.45/ BUP.PASB AR/ 2025	Bupati Pasaman Barat	1
		2. Instruksi Bupati tentang RAD PUG Kab. Pasaman Barat Tahun 2024	400.2/     /B APPELITBA NGDA-PPM -III/2025	Bupati Pasaman Barat	1

Sumber : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat

Tabel 9.3 Jumlah dan Jenis Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Tahun 2024

No	Kabupaten	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1	Pasaman Barat	Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat	11 Tahun 2016	Bupati Pasaman Barat	1

Sumber : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat

Tabel 9.4 Jumlah dan Jenis Kebijakan/Program/Kegiatan tentang Perlindungan Perempuan Tahun 2024

No	Kabupaten	Jenis Kebijakan/Program/Kegiatan	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jml
1	Pasaman Barat	1. Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual (GN Aksa)	SK No. 188.45/232 /Bup.Pasbar/2020	Bupati Pasaman Barat	1

Sumber : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat

Tabel 9.5 Daftar Kelembagaan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Di Pasaman Barat Tahun 2024

No.	Kab/ Kota	Nomenklatur Kelembagaan	Dasar Hukum/Tahun Pembentukan	Nama Pimpinan / Eselonisasi	Alamat Kantor (Telp. Fax, Email)
1	Pasaman Barat	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Eselon II	Jl. M. Natsir Simpang Empat,

Sumber : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat

Tabel 9.6 Gugus Tugas dan Kebijakan terkait Pemeberantasan Perdagangan Orang Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024

No.	Kabupaten	Gugus Tugas		Rencana Aksi Daerah PP-TPPO		Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)		Produk Hukum (Perda/SK/SE)	Koordinasi dengan daerah lain
		Ada	Tidak	Ada	Tidak	Ada	Tidak		
1	Pasaman Barat	√		√		√		Perbup No. 18 Th. 2016 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang	

Sumber : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat

## 9.2 Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

Pengarusutamaan Hak Anak yang selanjutnya disebut PUHA adalah strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan yang sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, program, dan kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Tabel 9.7 Jumlah dan Jenis Peraturan Daerah yang peduli Anak

No	Kabupaten	Jenis Peraturan Daerah	Nomor	Dikeluarkan Oleh	Jumlah
1	Pasaman Barat	Peraturan Daerah Kab. Pasaman Barat tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak	10 Tahun 2016	Bupati	1
2	Pasaman Barat	Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Kabupaten Layak Anak	37 Tahun 2015	Bupati	1
3	Pasaman Barat	Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Tata Cara Pelayanan Penanganan Pengaduan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	12 Tahun 2020	Bupati	1

Sumber : DPPKBP3A Kab. Pasaman Barat

Tabel 9.8 Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak Tahun 2024

No	Kecamatan	Bina Keluarga Balita (BKB)	Bina Keluarga Remaja (BKR)	Posyandu	Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Panti Asuhan Anak Yatim Piatu
1.	Sungai Beremas	6	6	19	1	-
2.	Ranah Batahan	6	3	37	2	2
3.	Koto Balingka	7	2	36	3	2
4.	Sungai Aur	6	2	33	2	-
5.	Lembah Melintang	5	2	59	2	1
6.	Gunung Tuleh	10	2	33	2	1
7.	Talamau	17	4	47	1	2
8.	Pasaman	8	4	69	4	1
9.	Luhak Nan Duo	14	2	37	3	-
10.	Sasak Ranah Pasisie	7	5	20	1	-
11.	Kinali	12	5	87	1	-
	<b>Pasaman Barat</b>	<b>98</b>	<b>37</b>	<b>987</b>	<b>26</b>	<b>9</b>

SumberData : DPPKBP3A, Dinkes, Dinas Pendidikan, Dinsos

Tabel 9.9 Jumlah Kelembagaan Partisipasi Anak Tahun 2024

No	Kabupaten	Organisasi Forum Anak	Kegiatan Ekstrakurikuler	Telepon Sahabat Anak 129
1	Pasaman Barat	1	-	-

Tabel 9.10      Jumlah Kelembagaan Untuk Perlindungan Anak Tahun 2024

No	Kabupaten	Gugus Tugas Trafiking	Gugus Tugas KLA	LP A	KPAI D	Lain-lain
1	Pasaman Barat	1	1	-	-	-



# **BAB X**

## **PENUTUP**



## **BAB X**

### **PENUTUP**

Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 yang disusun oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Pasaman Barat diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melakukan analisis gender sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD. Dalam proses pengumpulan data ini, berbagai kendala dan tantangan telah dihadapi. Dengan demikian, semoga keterbatasan ini dapat dipahami bersama.

Dokumen Penyusunan Buku Profil Gender dan Anak Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam proses pengambilan keputusan atau kebijakan. Dengan demikian, integrasi gender dalam proses perencanaan dan penganggaran bisa diterapkan sesuai dengan harapan, sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas atas Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, yang dapat diwujudkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Akhirnya, setiap dokumen kebijakan/program/kegiatan dapat memperhatikan aspek gender dan mengutamakan hak anak. Sehingga terwujudnya Pembangunan yang responsf gender dan peduli anak di Kabupaten Pasaman Barat.